

Unfolding Future Progress, Today



Laporan Tahunan
Annual Report
2011



Daftar isi

Contents

01	Unfolding Future Progress, Today Unfolding Future Progress, Today	10	Visi Misi & Tujuan Vision Mission & Objective	15	Ikhtisar Keuangan Financial Highlights
02	Sekilas PII IIGF at a Glance	11	Nilai-Nilai Utama: InTIME Core Values: InTIME	16	Peristiwa Penting 2011 Event Highlights 2011
08	Sejarah Perusahaan & Jejak Langkah Company History & Milestones	12	Strategi Pengembangan Jangka Panjang Long-Term Growth Strategy	18	Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners
				24	Laporan Direksi Report from the Board of Directors



32	Analisa dan Pembahasan Manajemen Management's Discussion and Analysis	60	Tinjauan Keuangan Financial Review	68	Laporan Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Report	82	Pengelolaan Risiko Risk Management	94	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
----	--	----	---------------------------------------	----	--	----	---------------------------------------	----	---

100	Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi BOC and BOD Letter of Statement	101	Laporan Keuangan Financial Statements	147	Data Perusahaan Corporate Data
-----	---	-----	--	-----	-----------------------------------

Unfolding Future Progress, Today

Selepas dari krisis finansial, revitalisasi infrastruktur Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebagai bagian dari rencana untuk mengundang partisipasi dan membangun kemitraan dengan pihak swasta, Pemerintah Indonesia mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, sebagai lembaga yang akan menangani penjaminan bagi kewajiban finansial sektor publik dalam kontrak kerjasama dengan pihak swasta.

Following the financial crisis, revitalizing Indonesian infrastructure has been one of the Government development program priorities in the last few years. And as part of the plan to attract public-private partnership, the Government of Indonesia has established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, or IIGF, as the key institution that will manage guarantees for financial obligation of the public sector under cooperation agreement with private sector.

Sekilas PII

IIGF at a Glance

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PII, didirikan pada tanggal 30 Desember 2009, adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk sebagai respon Pemerintah Indonesia terhadap kebutuhan akan adanya penjaminan terhadap risiko politik yang melekat pada proyek infrastruktur. Ketersediaan penjaminan tersebut, diharapkan akan dapat mendorong keikutsertaan pihak swasta yang lebih luas dalam pembangunan infrastruktur khususnya melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/*Public Private Partnership* (PPP).

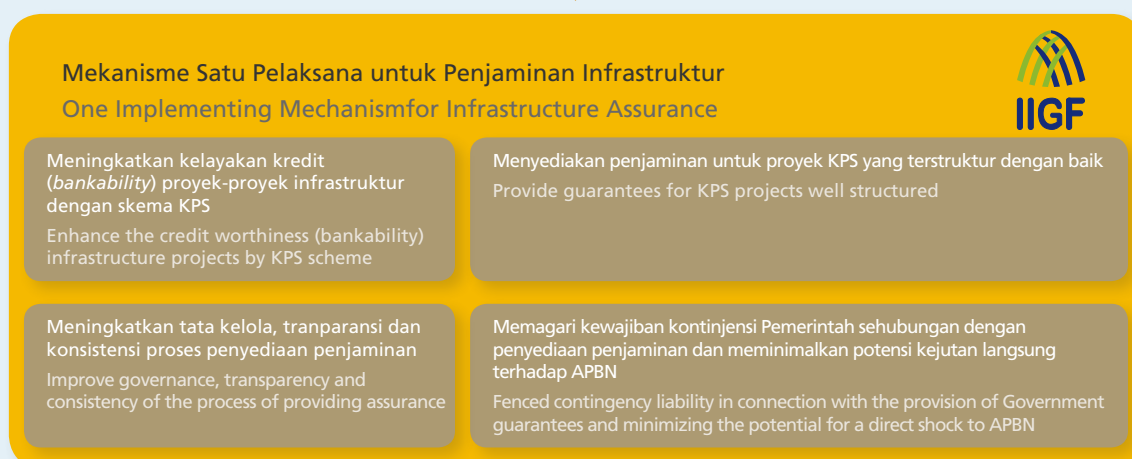
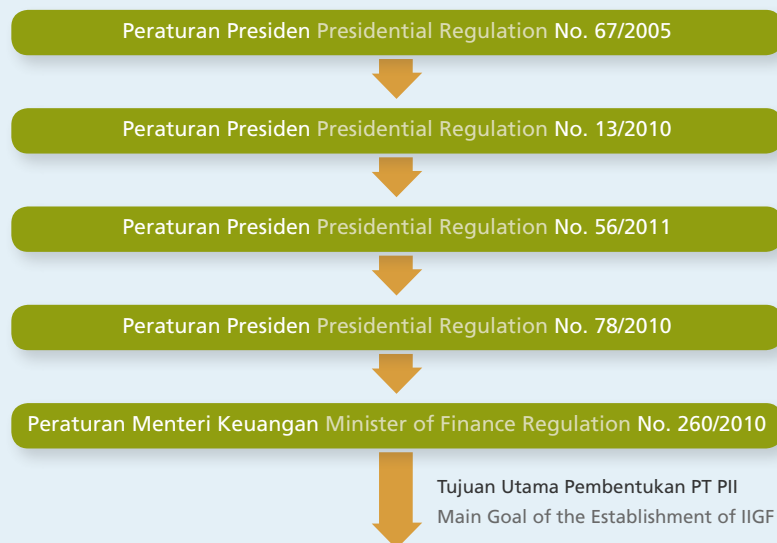
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), is a State-Owned Enterprise (SOE) established on 30 December 2009 by the Government of Indonesia as a response to the need for guarantees, against political risks inherent in infrastructure projects. The availability of guarantees is expected to attract more private participation in infrastructure particularly under Public Private Partnership (PPP) scheme.





PII berperan dalam kerangka Kebijakan Satu Pelaksana (*Single Window Policy*) untuk melaksanakan proses penjaminan pemerintah bagi pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS. Kebijakan Satu Pelaksana ini dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan konsistensi dalam pemberian jaminan dan pemrosesan klaim, dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

IIGF plays its role under Single Window Policy framework to perform government guarantee provision process for infrastructure projects development undertaken through PPP scheme. The Single Window Policy is aimed to ensure transparency and consistency in guarantee provision and claim processing, in order to improve market confidence to participate in infrastructure projects in Indonesia.



Pemerintah telah melakukan penyertaan modal ke PII sebesar Rp 3,5 triliun melalui APBN 2009, 2010 dan 2011. Seiring dengan berjalannya waktu, PII secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada APBN, dan akan meningkatkan kapasitas penjaminannya melalui kerjasama dengan institusi penyedia jaminan sejenis, seperti institusi multilateral (Bank Dunia, ADB, MIGA, dsb.), institusi bilateral (lembaga pembiayaan ekspor) atau institusi sejenis lainnya.

Keberadaan PII diharapkan memberikan nilai tambah bagi partisipasi yang lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan proyek KPS infrastruktur di Indonesia.

Manfaat bagi Indonesia:

- Mendukung pembangunan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan skema KPS
- Menjembatani kesenjangan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur

The Government of Indonesia has undertaken a State Capital Injection in IIGF for a total amount of Rp 3.5 trillion from the 2009, 2010 and 2011 State Budget. Subsequently, IIGF will gradually reduce its dependence on the State Budget, and increase its guarantee capacity through cooperation with other guarantee provider institutions including multilateral agencies (World Bank, ADB, MIGA, etc), bilateral institutions (export credit agencies), or other similar institutions.

The existence of IIGF is expected to create value towards greater participation of the various stakeholders in the development of PPP infrastructure projects in Indonesia.

Benefits for Indonesia:

- Support economic growth through the development of quality infrastructure using the PPP scheme
- Bridge the funding gap for the development of infrastructure projects

Manfaat bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/PJKP (Pemerintah Pusat/ Daerah, BUMN/BUMD):

- Menarik minat sektor swasta untuk berpartisipasi
- Memfasilitasi tercapainya tujuan-tujuan PJKP
- Mendorong kompetisi dalam proses tender proyek sehingga menghasilkan proposal proyek yang lebih berkualitas dengan harga bersaing

Manfaat bagi sektor swasta:

- Mitigasi risiko bagi sektor swasta yang tidak dapat dicakup dari pasar
- Peningkatan transparansi, kejelasan dan konsistensi proses evaluasi dan pemberian penjaminan bagi proyek
- Peningkatan *bankability* dari proyek
- Memperpanjang jangka waktu pinjaman, yang berdampak pada harga penawaran (bid) yang lebih kompetitif
- Memberikan insentif bagi PJKP untuk membuat kontrak yang memenuhi standar yang berlaku umum/internasional

Proses pemberian jaminan terhadap suatu proyek oleh PII meliputi:

- **Konsultasi/Bimbingan:** Memberikan informasi rinci tentang penjaminan oleh PII, seperti kriteria penjaminan, proses yang harus dilakukan untuk memperoleh jaminan, contoh perjanjian konsesi, dan sebagainya
- **Penyaringan:** Mengevaluasi Formulir Penyaringan (*Screening Form*) yang disampaikan PJKP kepada PII untuk menentukan kualifikasi proyek atau eligibilitas dalam memperoleh jaminan berdasarkan regulasi atau ketentuan yang ada. Beberapa kriteria umum antara lain: termasuk sektor yang tercantum dalam Perpres No. 67/2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 13/2010 dan Perpres No. 56/2011; proyek selaras dengan prioritas Pemerintah dan dokumentasi proyek telah disiapkan oleh ahli yang kredibel
- **Penilaian:** Melakukan evaluasi kelayakan (*appraisal*) proyek secara rinci dari aspek legal, teknik, ekonomi dan keuangan, serta lingkungan dan sosial, termasuk juga evaluasi terhadap kemampuan PJKP untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai perjanjian konsesi
- **Penstrukturan:** Menetapkan struktur penjaminan (*Guarantee Structuring*) serta menyusun ketentuan dan kondisi penjaminan, misalnya jangka waktu, kewajiban finansial dan risiko yang dijamin, yang disesuaikan untuk masing-masing proyek KPS

Benefits for Contracting Agency/CA (Central/Regional Government, SOEs, Regional Government-Owned Enterprise):

- Attract private sector participation
- Facilitate the achievement of CA's objectives
- Encourage fair competition in project procurement process, to obtain higher quality projects and competitive costs

Benefits for the private sector:

- Mitigate risks that are otherwise not covered by the market
- Improve transparency, clarity and consistency in appraisal and guarantee provision process for project
- Improve project bankability
- Extend the tenor of funding from lenders which results in more competitive bids
- Provide incentive for CAs to formulate project contracts according to generally-accepted or international standards

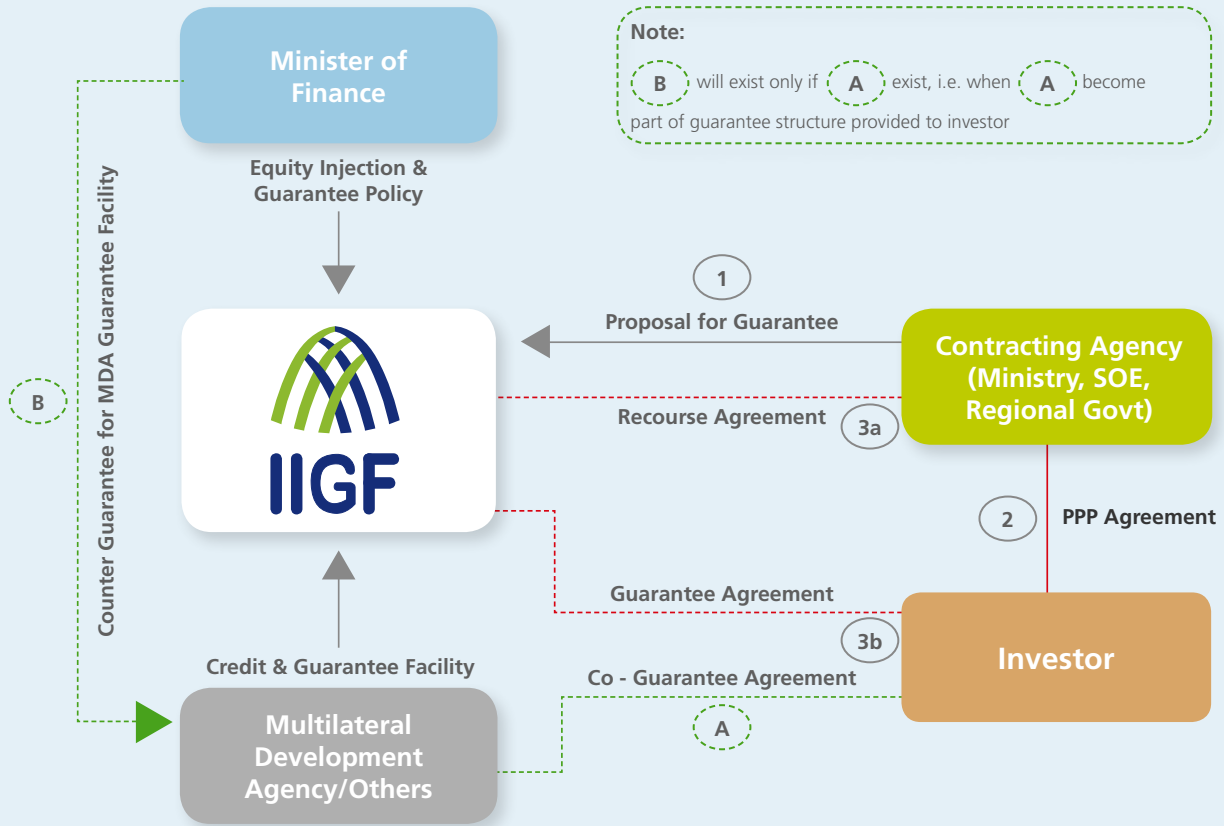
The provision of project guarantee by IIGF follows the steps below:

- **Consultation/Guidance:** Provide detailed information on IIGF's guarantee provision, such criteria for guarantee, the guarantee provision process, sample concession agreement, etc.
- **Screening:** Evaluate the Screening Form submitted by CA to determine project qualification or eligibility in obtaining a guarantee based on existing regulations. The general criteria includes among other things, the sectors named in Presidential Regulation (Perpres) No. 67/2005, as subsequently amended by Perpres No. 13/2010 and Perpres No. 56/2011; that the project is in line with the Government's priority; and that project documentation has been prepared by professional credible experts
- **Appraisal:** Conduct detailed assessment of project feasibility in various aspects i.e.: on legal, technical, economic and financial, as well as social and environment aspects, and also evaluate of CA's ability to meet its financial obligation under the concession agreement
- **Structuring:** Determine the guarantee structure as well as terms and conditions, such as the guarantee period, financial obligation and risk coverage of the guaranteed project, which is adjusted for each PPP project

Proses Bisnis PII IIGF Business Process

Suatu transaksi KPS mencakup perjanjian-perjanjian seperti berikut ini:

A typical PPP transaction involves the following agreements:



PII dapat menjamin berbagai kewajiban PJPK yang telah dialokasikan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian KPS
IIGF may provide coverage of various CA's Obligations which have been allocated to CA under PPP Agreement

Allocation of Risks in a PPP Agreement
– an Illustration

PC	Shared	CA
A		
B*		
C		
	D	
	E*	
		F
		G*
		H*

*) Risk that leads to certain financial obligation of the bearer

Possible IIGF Guarantee Coverage

Examples:

- CA Payment Obligations
 - Inability to Pay
 - Unwillingness to Pay
- Early Termination/ Other Payment Obligations due to Government Actions/Inactions, such as:
 - Change in Law
 - Expropriation
 - Currency Inconvertibility/ Non Transfer
 - Force Majeure Affecting CA



Transport
Toll Roads
Electricity
Water Supply
Waste Water
Selected Telecom
Irrigation
Selected Oil & Gas

Sectors: As per Presidential Regulation No. 67/2005 **

PC: Project Company
CA: Contracting Agency

**) as has been ammended by Presidential Regulation No. 13/2010 and No. 56/2011

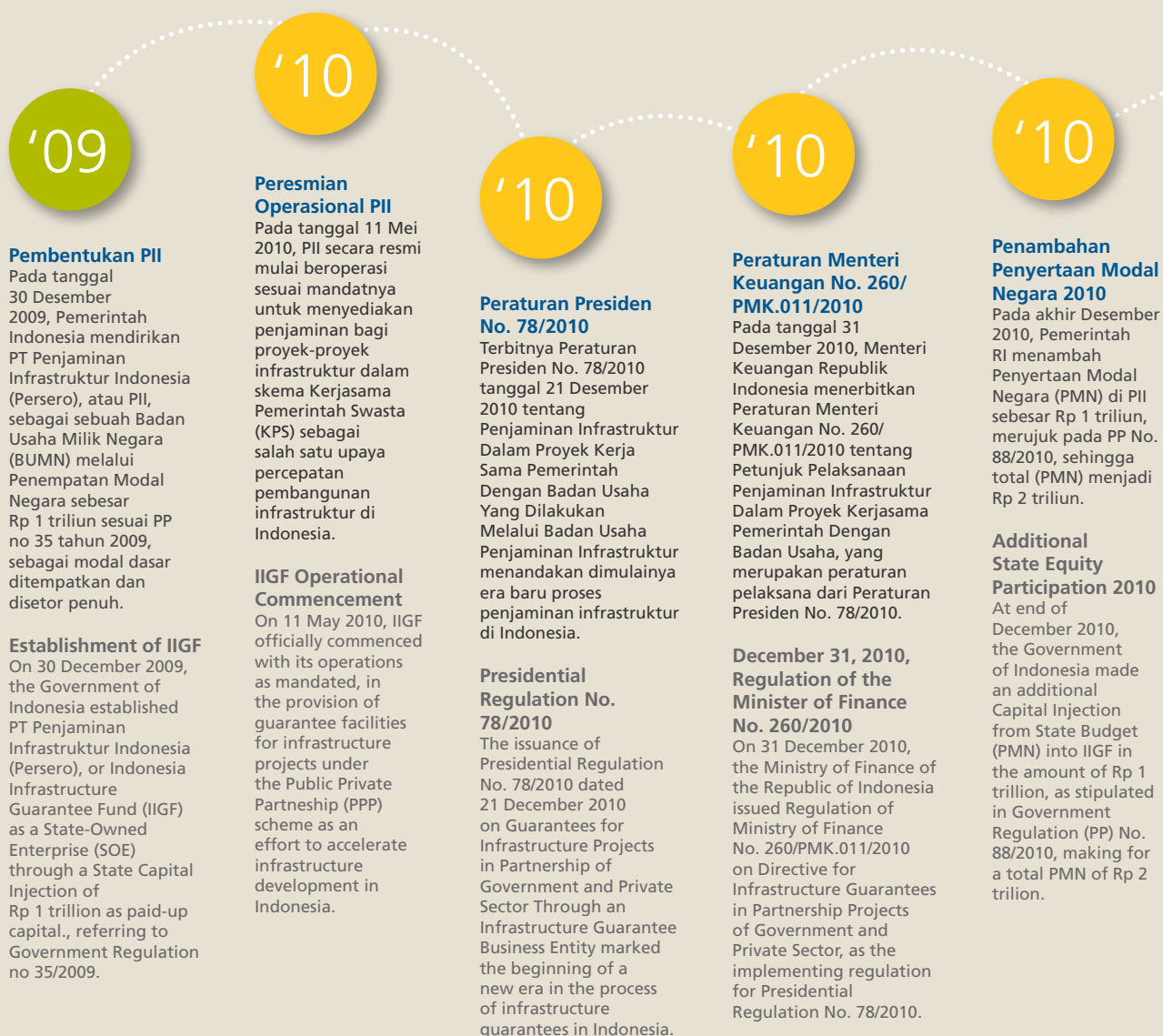
No.	Risiko Risk	Deskripsi Description
1	Lisensi, Izin dan Persetujuan Licenses, permits, and approvals	Cakupan terhadap risiko akibat keterlambatan atau kegagalan dalam memberikan lisensi, izin yang berdampak negatif terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan dimulai perolehan pendapatan). Coverage for delay or failure to grant licenses, permits, and approvals (delays that would have adverse effects on construction costs, financing charges, and the commencement of revenue).
2	Keterlambatan/Kegagalan Financial Close Financial close delay/failure	Cakupan terhadap risiko keterlambatan atau kegagalan financial close yang diakibatkan tindakan/ tidak bertindak PJP (selain isu lahan dan isu perijinan). Coverage for any delay/failure of financial closure due to any other action/inaction on the part of the CA (beyond land and licenses/permits/approvals).
3	Perubahan Regulasi dan Perundangan Change in law/regulations	Cakupan terhadap kerugian sebagai dampak dari perubahan regulasi/perundangan yang berdampak negatif terhadap proyek, seperti peraturan pajak, struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi spesifikasi teknis proyek dan menyebabkan perubahan biaya. Berlaku hanya jika kontrak secara eksplisit terhadap dan terikat dengan regulasi/ perundangan yang berlaku (melindungi terhadap perubahan regulasi/ perundangan), dimana lazim bagi PJP untuk menanggung risiko perubahan regulasi/perundangan yang bersifat diskriminatif. Coverage for impact of change in law/regulation in event that change in law adversely affects project, such as tax law, law on tariff structure, or law that affects project's technical specifications and results in changes in costs. Applies only if contract is explicit in its basis on and ties with existing law (i.e., protects from changes in law), where it is common for CA to bear the risk of discriminatory change of law.
4	Wanprestasi Breach of contract	Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindak PJP yang melanggar kontrak, atau merubah kontrak secara sepihak. Coverage for CA's action/inaction in violation of contract, or CA's changing clauses of contract unilaterally.
5	Integrasi dengan Jaringan Integration with network	Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindak PJP (atau otoritas yang berwenang) yang mempengaruhi operasional/pendapatan proyek karena kegagalan (atau tidak memadainya) integrasi dengan jaringan eksisting atau yang direncanakan. Coverage for actions/inaction that affect project operations/revenue by failure (or inadequate) integration with existing or future networks.
6	Risiko Fasilitas Pesaing Competing facility risk	Cakupan terhadap risiko adanya fasilitas/infrastruktur sejenis yang dibangun dan akan bersaing dengan penyediaan layanan yang diperjanjikan. Coverage for the risk that other similar facility/infrastructure is built which eventually competes with the delivery of the contracted services.
7	Risiko Pendapatan Revenue Risk	Cakupan terhadap pemenuhan/penerapan kewajiban PJP terhadap pendapatan proyek. Cakupan berlaku hanya jika PJP secara kontraktual menyetujui pembayaran atas layanan infrastruktur/ proyek (anuitas/dukungan fiskal terhadap kesenjangan kelayakan/pendapatan minimum). Coverage to fulfill/enforce CA's obligations on revenue. Coverage applies only to CA's contractually agreed payments (annuity/viability gap/minimum revenue).
8	Risiko Permintaan Demand Risk	Cakupan terhadap perubahan, yang ditanggung BU akibat tindakan CA, yang mempengaruhi permintaan layanan proyek. Coverage for change, borne of CA's actions, that have an influence on demand for the project's services.
9	Risiko Harga Pricing Risk	Cakupan terhadap pemenuhan tingkat pendapatan yang tidak tercapai akibat perubahan tarif secara sepihak. Coverage to fulfill level of revenue that was not reached due to unilateral change of tariff.
10	Risiko Ekspropriasi Expropriation Risk	Cakupan terhadap tindakan pengambilalihan proyek oleh CA atau otoritas lainnya yang menyebabkan berakhirnya kontrak proyek. Coverage for takeover by CA or other public agencies causing end of project contract.
11	Risiko Tidak Dapat dilakukannya Konversi dan Transfer Mata Uang Currency inconvertibility & non-transfer Risk	Cakupan terhadap risiko pendapatan/profit dari proyek tidak dapat dikonversi ke mata uang asing dan/atau tidak dapat direpatriasi ke negara asal investor. Coverage for risk that the revenue/profit from the project could not be converted to the foreign currency and/or repatriated to the investor's home country.
12	Risiko Parastatal atau Sub-nasional Sub-sovereign or Parastatal risk	Cakupan terhadap risiko suatu entitas sub-nasional atau parastatal yang bertindak sebagai CA pada suatu proyek yang gagal memenuhi pembayaran kontraktual atau kewajiban materiil lainnya (karena keputusan sepihak). Coverage for risk that the subsovereign or parastatal entity which act as the CA in the project has failed to perform its contractual payment or other material obligations (i.e. due to unilateral decision).
13	Risiko Kahar yang Mempengaruhi PJP Force majeure risk affecting CA	Cakupan terhadap risiko bahwa suatu kejadian di luar kendali kedua belah pihak (bencana alam atau akibat tindakan manusia) yang akan terjadi dan dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan CA untuk memenuhi kinerja kewajiban kontraktual. Coverage for risk that a specified event entirely outside the control of either party (e.g. act of god, man-made catastrophic event) will occur and will result in a delay or default by CA in the performance of its contractual obligations.
14	Risiko Interface Interface risk	Cakupan terhadap risiko bahwa metode atau standar layanan sektor publik akan menghambat layanan kontraktual atau sebaliknya. Risiko ini termasuk jika kualitas pekerjaan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan BU. Coverage for risk that the method or standard of delivery of the contracted services will prevent or in some way frustrate the delivery of the public sector delivered services or vice versa. The risk includes when the quality of works done by the government does not conform/unsuitable with those done by the PC, vice versa.

Sejarah Perusahaan & Jejak Langkah

Company History & Milestones

Keberadaan PII merupakan bagian dari upaya Pemerintah RI untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan fasilitas penjaminan bagi proyek infrastruktur dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

The establishment of IIGF is part of efforts by the Government of Indonesia to facilitate the development of infrastructure needed to support domestic economy growth, through the provision of guarantee facilities for infrastructure projects developed under the Public Private Partnership (PPP) scheme.





'11

Acuan Alokasi Risiko

Pada bulan Maret 2011, PII menerbitkan dokumen Acuan Alokasi Risiko yang berisi kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam skema KPS untuk proyek infrastruktur.

Risk Allocation Guidelines

In March 2011, IIGF published a Risk Allocation Guidelines document, which defines the infrastructure risk category and distribution as a reference for stakeholders in infrastructure project under PPP scheme.

'11

Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur

PII juga meluncurkan dokumen Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur yang bertujuan memberikan ilustrasi tentang langkah-langkah dalam proses pemberian penjaminan infrastruktur oleh PII.

Infrastructure Guarantee Provision Guidelines

IIGF also published the Infrastructure Guarantee Provision Guidelines document that illustrates the various steps in the processing of infrastructure guarantee provision by IIGF.

'11

PLTU Jawa Tengah

Pada tanggal 6 Oktober 2011, PII menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah, yang menjadi proyek pembangunan infrastruktur skema KPS pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh PII dan Kementerian Keuangan RI.

Central Java Power Plant

In October 6, 2011, IIGF signed the Guarantee Agreement for the Central Java Coal-Fired Power Plant 2 x 1,000 MW located in Batang, Central Java, which represented the first PPP infrastructure development project successfully implemented by the Government of Indonesia using a joint guarantee facility provided by IIGF and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

'11

Penambahan Penempatan Modal Negara

Pada tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah RI meningkatkan jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh PII melalui tambahan Penempatan Modal Negara sebesar Rp 1,5 triliun, sesuai dengan PP no 55/2011, untuk memperkuat kapasitas penjaminan PII menjadi total Rp 3,5 triliun.

Additional State Equity Participation

In 31 December 2011, the Government of Indonesia has increased the fully placed and paid-up capital of IIGF through an additional Rp 1.5 trillion of State Capital Injection, referring to Government Regulation no 55/2010, strengthening the guarantee capacity of IIGF to Rp 3.5 trillion.

visi

vision

Menjadi penyedia penjaminan yang memainkan peran penting dalam menarik modal swasta untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

To be a guarantee provider that plays a pivotal role in attracting private capital for infrastructure development to accelerate Indonesia's economic growth.

misi

mission

- Menyediakan produk-produk penjaminan melalui proses bisnis yang transparan dan baik.
 - Melaksanakan kebijakan satu pelaksana dalam proses pemberian jaminan dengan modal yang kuat dan manajemen yang profesional.
 - Meningkatkan kelayakan kredit proyek infrastruktur Indonesia.
-
- To provide guarantee products through transparent and robust business processes.
 - To implement a "Single Window" policy in guarantee provision through a solid capital base and professional management.
 - To improve the creditworthiness of infrastructure projects in Indonesia.

tujuan

objectives

- Memastikan proyek infrastruktur yang didukung memiliki struktur yang baik sehingga dapat meningkatkan kelayakan kredit dan proyek infrastruktur.
 - Memfasilitasi pengembangan proyek Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (yaitu Kementerian/ Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah) dengan menyediakan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur dan jasa konsultasi terkait.
 - Mengembangkan tata kelola yang baik dari implementasi penyediaan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur.
 - Memagari kewajiban kontinjensi Pemerintah sehubungan dengan pemberian jaminan Pemerintah.
-
- Ensuring the proper structuring of infrastructure projects in order to improve creditworthiness and quality of the respective infrastructure projects.
 - Facilitating the deal flow for Contracting Agencies (i.e. Ministries, SOEs, Regional Governments) through the provision of financial instruments to improve project creditworthiness, as well as related project consultation services.
 - Developing good governance practices in the provision of financial instruments in order to improve project viability.
 - To ring-fence the Government's contingent liabilities related to the provision of guarantees by the Government.

Nilai-Nilai Utama: InTIME

Core Values: InTIME

"INTEGRITY" (INTEGRITAS)

1. Bekerja dengan standar etika tertinggi
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan
3. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain
4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas
5. Mentaati aturan perusahaan
6. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan

"TEAM WORK" (KERJA SAMA)

1. Beroperasi sebagai sebuah tim
2. Memberi kontribusi ketrampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim
3. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan perusahaan

"THINK BIG" (BERPIKIRAN LUAS)

1. Memiliki pemikiran luas dan mutakhir
2. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi perusahaan dan bagi pemangku kepentingan
3. Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan perusahaan
4. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik

"MUTUAL TRUST" (SALING PERCAYA)

1. Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal perusahaan maupun dengan mitra perusahaan
2. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan
3. Mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis

"EXCELLENCE" (KEUNGGLAN)

1. Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan
2. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus
3. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan

INTEGRITY

1. To work with the highest standard of ethics
2. To be honest with oneself and other persons in all interactions
3. To put the interest of the Company above the interest of the individual, group and/or other parties
4. To maintain commitment in the execution of one's duties
5. To always comply with Company regulations
6. To always be responsible in all actions

TEAM WORK

1. To operate as a team
2. To contribute in skills and knowledge for the benefit of the team
3. To uphold the interest of the team in striving for Company objectives

THINK BIG

1. To be broad-minded and cognizant of the latest issues
2. To consider alternatives that can led to improved results for the benefit of the Company and stakeholders
3. To strive at all times for innovations for the progress of the Company
4. To be receptive to current developments in the work environment that can led to the best results while adhering to the principles of good governance

MUTUAL TRUST

1. To uphold the highest of business ethics with all components within the Company as well as with business partners
2. To consistently fulfil the agreed service level standard
3. To trust and respect one another in good faith in order to earn the confidence of co-workers and business partners

EXCELLENCE

1. To commit to be the best in all of one's endeavor
2. To strive for continuous improvement
3. To develop comprehensive and thorough knowledge that can support one's work and deliver results that are above expectation

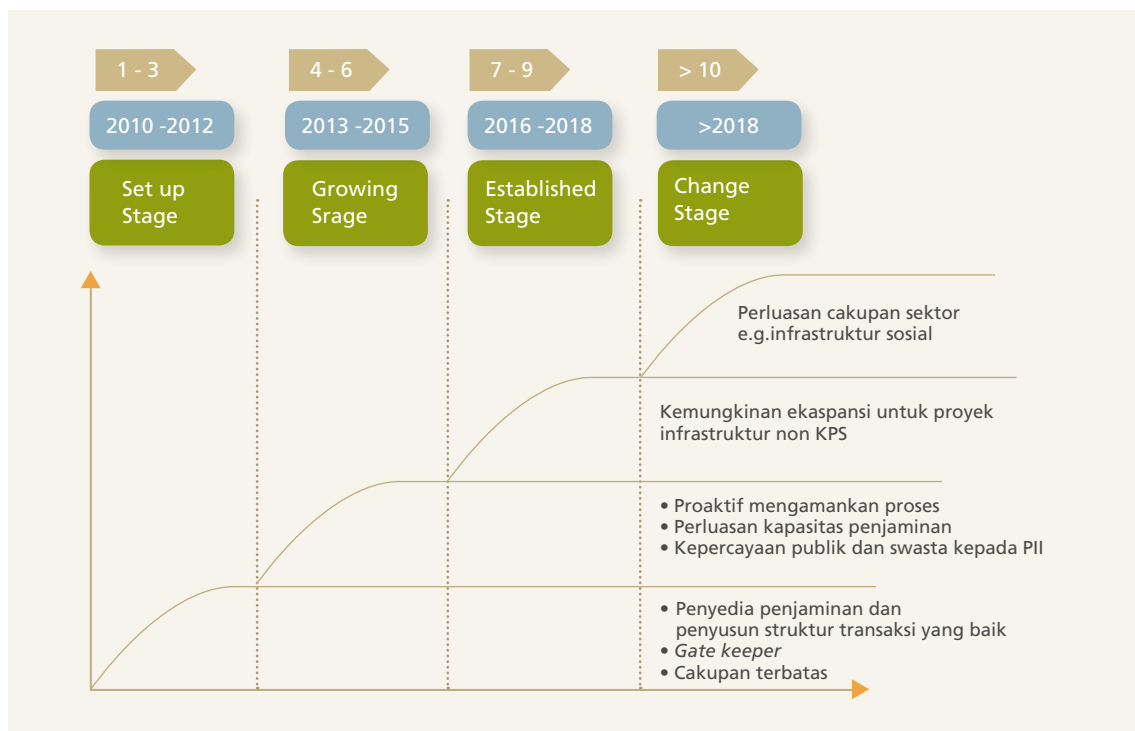
Strategi Pengembangan Jangka Panjang

Long-Term Growth Strategy



PII telah merumuskan sebuah road-map strategi yang membagi rencana pengembangan PII dalam empat tahapan utama.

IIGF has formulated a strategy road map that defines IIGF's long term growth plans, into four principal stages.



- **Tahap Persiapan:** PII akan meletakkan landasan serta dasar-dasar proses penjaminan, sekaligus memastikan *good governance* dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu proyek yang akan diberikan penjaminan.
- **Tahap Pertumbuhan:** PII akan berusaha mendapatkan kepercayaan publik dan sektor swasta atas perannya, memperluas jenis risiko yang dapat dijamin Perusahaan serta meningkatkan kapasitas penjaminan.
- **Tahap Pematangan:** PII akan melakukan ekspansi penjaminan di luar proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta.
- **Tahap Perubahan:** PII akan melakukan ekspansi penjaminan diluar proyek infrastruktur ekonomi.

- **Set-up Stage:** IIGF will lay the foundation and the basic principles of the underwriting process, while ensuring good governance in assessing the feasibility of any project that will receive underwriting.
- **Growth Stage:** IIGF will strive to earn the trust of the public and private sector in its role, expand the types of risks that the Company can underwrite and improve its underwriting capacity.
- **Established Stage:** IIGF will expand its underwriting activities beyond Public-Private Partnership projects.
- **Transformation Stage:** IIGF will expand its underwriting beyond economic infrastructure projects.

Strategi Tahun 2011

Pada tahun 2011, PII berada di Tahap Persiapan, yang akan berlangsung sampai tahun 2012. Dalam tahap ini PII fokus pada strategi Orientasi Pelanggan, serta pengembangan sumber-sumber daya internal melalui strategi Orientasi Internal serta Orientasi Pembelajaran dan Pertumbuhan. Pada tahap ini, PII juga memperhatikan aspek kapasitas penjaminan, terutama modal penjaminan, yang tengah digalang bersama

Strategy for 2011

In 2011, IIGF was on the Set-Up Stage that will continue into 2012. In the Set-up Stage, the Company will focus on Customer Orientation strategy, as well as the development of internal resources through Internal and Learning Orientation, and Growth Orientation strategies. In this stage, the Company also paid attention to its guarantee capacity, primarily underwriting capital, which is being raised together with the

pemegang saham, dengan turut melibatkan dukungan dari berbagai badan multilateral, dan institusi finansial terkemuka dunia.

Strategi dalam lingkup Orientasi Pelanggan antara lain berupa penjaminan yang dapat menjadikan proyek infrastruktur yang lebih *bankable*. Selain itu, PII juga secara proaktif berupaya mengembangkan portofolio penjaminan proyek, melakukan eksekusi penjaminan yang handal, memberi konsultasi dan edukasi kepada pihak terkait, serta memberi masukan terhadap berbagai regulasi terkait.

Strategi dalam lingkup Orientasi Internal antara lain adalah peningkatan kapasitas PII, proses *appraisal* yang transparan dan tepat waktu, penetapan kebijakan *fee* penjaminan, pengelolaan dana yang optimal dan penyelesaian kewajiban kepada para pemangku kepentingan, seperti pembuatan laporan secara tepat waktu dan pembuatan matriks alokasi risiko.

Untuk Orientasi Pembelajaran dan Pertumbuhan, strategi utama yang dilakukan antara lain berupa pengembangan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, termasuk penyiapan *Key Performance Indicator* (KPI) tiap divisi dan masing-masing individu, dan pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis.

shareholders, by involving the support of global prominent multilateral agencies and financial institutions.

Strategies within the scope of Customer Orientation include, among others, underwriting that can improve the bankability of infrastructure projects. Moreover, the Company also proactively seeks to develop its project underwriting portfolio, execute reliable underwriting, provide consultation and education to related parties, and provide input on various related regulations.

The strategies within the scope of Internal Orientation, among others, are building the Company's capacity, ensuring a transparent and timely appraisal process, developing policies for underwriting fees, conducting optimal funds management, and fulfilling obligations to the stakeholders such as timely reporting and the creation of a risk allocation matrix.

For Learning and Growth Orientation, the principal strategies that will be implemented are, among others, to improve the capability of human resources, including the establishment of Key Performance Indicators for each division and individual, and to develop an integrated Information System to support business processes.

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam Laporan Tahunan ini menggunakan notasi bahasa Inggris

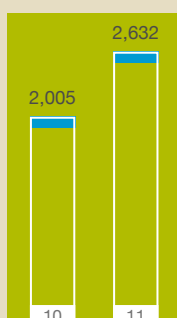
Numerical notations in all tables and graphs in this Annual Report are in English

Rp000

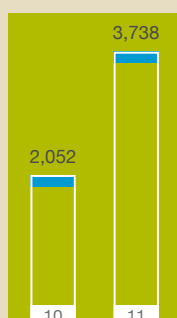
Rp000

	2011	2010	
Laba Rugi Komprehensif			Comprehensive Income
Pendapatan Operasi	228,349,244	77,107,079	Operating Revenue
Beban Operasi	37,218,439	15,067,587	Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak	191,130,805	62,039,492	Profit Before Income Tax
Laba Bersih	157,141,089	46,597,011	Net Income
Jumlah Pendapatan Komprehensif	157,657,468	46,597,011	Total Comprehensive Income
Neraca			Balance Sheet
Kas dan Setara Kas	2,632,388,309	2,005,997,131	Cash and Cash Equivalent
Penempatan Investasi Dana	1,078,119,828	30,000,000	Investment Fund Placement
Jumlah Aset	3,738,631,127	2,052,921,455	Total Assets
Kewajiban	34,842,648	6,324,444	Liabilities
Ekuitas	3,703,788,479	2,046,597,011	Equity
Laporan Arus Kas			Cash Flow Statement
Arus Kas Operasi	176,871,698	38,707,348	Cash Flow from Operations
Arus Kas Investasi	1,050,473,285	1,034,564,063	Cash Flow from Investments
Arus Kas Pendanaan	1,499,992,765	2,000,000,000	Cash Flow from Financing
Rasio			Ratio
Marjin Laba Operasi	82.1%	79.0%	Operating Profit Margin
Marjin Laba Bersih	68.8%	60.4%	Net Profit Margin
ROE	7.0%	4.2%	ROE

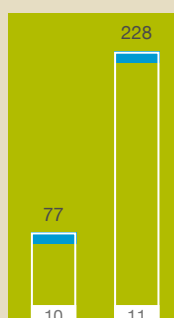
Kas dan Setara Kas (Rp Miliar)
Earnings Assets-Net (Rp Billion)



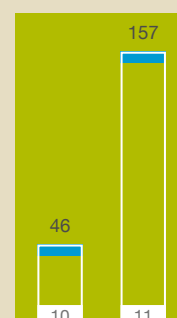
Jumlah Aset (Rp Miliar)
Total Assets (Rp Billion)



Pendapatan Operasi (Rp Miliar)
Operating Revenue (Rp Billion)



Laba Bersih (Rp Miliar)
Net Income (Rp Billion)



Peristiwa Penting 2011

Event Highlights 2011

24 Jan

PII menandatangani MOU bersama MIGA untuk mempromosikan investasi infrastruktur melalui berbagai kegiatan bersama. MIGA merupakan grup Bank Dunia yang memberikan jaminan investasi terhadap risiko non-komersial bagi negara anggota MIGA yang melakukan investasi di negara berkembang anggota MIGA.

IIGF signed an MoU with MIGA to engage in joint promotion programs for investments in infrastructure. MIGA is a member of the World Bank Group that provides guarantee against non-commercial risks for investments made by MIGA's member countries in developing countries that are also members of MIGA.

21-23 feb

Studi banding ke Philipina untuk mempelajari kesuksesan Manila Water terkait konsesi air minum.

A comparative study visit to the Philippines to learn from the successful Manila Water project.

3-5 mar

Executive Workshop Public-Private Partnership (PPP) bertempat di Melbourne dan Sydney, Australia, bekerjasama dengan University of New South Wales (UNSW), Australia.

Executive Workshop Public-Private Partnership (PPP) in Melbourne and Sydney, Australia, in cooperation with the University of New South Wales (UNSW), Australia.

15 mar

Penandatanganan Perjanjian Pernyataan Kesediaan dan Draft Final Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek KPS PLTU Jawa Tengah.

Signing of Acceptance Agreement and final drafts of Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the Central Java Powerplant PPP project.

6 okt



Penandatanganan *Power Purchase Agreement*, *Guarantee Agreement* dan *Recourse Agreement* untuk proyek PLTU Jawa Tengah.

Signing of the *Power Purchase Agreement*, *Guarantee Agreement* and *Recourse Agreement* for the Central Java Power Plant project.

13 okt

PII menyelenggarakan Media Gathering untuk semua media di Jakarta untuk memberi edukasi mengenai PII dan sekaligus meningkatkan hubungan baik dengan media.

IIGF organized a Media Gathering attended by media representatives in Jakarta to provide knowledge about IIGF and also to build and enhance effective media relations.

27-29 okt

Penyelenggaraan lokakarya "Canadian PPP: Best Practice for Benchmarking" di Bali dengan peserta tim Kementerian Keuangan.

Workshop on "Canadian PPP: Best Practice for Benchmarking" in Bali, attended by teams Ministry of Finance.

30 nov



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek Rel Kereta Api Kalimantan Tengah, dihadiri oleh Ketua DPRD Kalteng, Gubernur Kalteng, Dirjen Planologi Kemenhut dan Dirjen KA Kemenhub.

Signing of the Cooperation Agreement for the Central Kalimantan Railway Project, attended by Chairman of the Central Kalimantan Parliament, the Governor of Central Kalimantan, DG Planology Ministry of Forestry and DG Railways Ministry of Transportation.

30 nov



PII mendukung peningkatan kapasitas guru Sekolah Dasar melalui lokakarya "Paradigma Baru dalam Mengajar" sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PII.

IIGF provided capacity building for Elementary School teachers through the "New Paradigm in Teaching" workshop as part of its Corporate Social Responsibility commitments.

12-14 Apr  PII menjadi peserta Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2011 di Jakarta Conference Center, sekaligus menyelenggarakan Business Gathering bagi para pemangku kepentingan. IIGF participated in Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2011 at the Jakarta Conference Center, while also organizing a Business Gathering for relevant stakeholders.	29 Apr Lokakarya dan diskusi <i>Risk Management Capacity Building</i> di Amerika Serikat dengan MIGA (anggota grup Bank Dunia) dan <i>PPP Implementation and Best Practice di Kanada</i> dengan Infrastructure Ontario. Workshop and discussions on Risk Management Capacity Building in the United States with MIGA (Member of the World Bank Group) and PPP Implementation and Best Practice in Canada with Infrastructure Ontario.	6 Jun Lokakarya dan diskusi tentang PPP Infrastructure – <i>the Canadian Model Experience</i> di Jakarta bekerjasama dengan pihak Kedutaan Besar Kanada dan Davis, LLP. Workshop and discussions on PPP Infrastructure - the Canadian Model Experience in Jakarta organized in cooperation with the Canadian Embassy and Davis, LLP.	8-9 Jun Lokarya bertajuk <i>Political Risk Guarantee and Insurance in Infrastructure PPP Projects</i>, menghadirkan pakar sekaligus praktisi bidang asuransi risiko politik. Workshop on Political Risk Guarantee and Insurance in Infrastructure PPP Projects, featuring experts and practitioners in political risk insurance.
1 nov PII dan The Export-Import Bank of China (Exim Bank) menandatangani MOU untuk kerjasama jangka panjang antara kedua belah pihak. IIGF and The Export-Import Bank of China (Exim Bank) signed an MoU for long-term cooperation between the two entities.	8-10 nov PII mensponsori dan menjadi salah satu nara sumber dalam Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis Ketenagalistrikan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung. IIGF became a sponsor and also one of the speakers in the National Seminar on Electricity Technology and Business organized by Institut Teknologi Bandung.	14 nov PII menandatangani MOU Pengawasan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan <i>diagnostic check</i> terhadap penerapan GCG di PII yang bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait aspek penerapan GCG yang perlu diperbaiki di masa mendatang. IIGF signed an MoU on Supervision and Good Corporate Governance with the Finance and Development Supervising Agency (BPKP) to perform a diagnostic check on the implementation of GCG at IIGF, in order to provide input on areas of GCG that need to be improved in the future.	23-24 nov PII menjadi narasumber dan moderator dalam acara Indonesia Infrastructure – <i>Tollroad Stakeholders Forum</i> di Jakarta. IIGF was a speaker and moderator in the Indonesia Infrastructure – Tollroad Stakeholders Forum in Jakarta.
2 des PII menjadi pembicara pada acara Asia Finance Risk Mitigation Forum yang diselenggarakan di Singapura oleh Asian Development Bank. IIGF was a speaker in the Asia Finance Risk Mitigation Forum organized in Singapore by the Asian Development Bank. PII ambil bagian dalam acara Peluncuran Pra Kualifikasi Proyek KPS Air Minum Bandar Lampung, sebagai salah satu pihak yang ikut memfasilitasi persiapan proyek Air Bandar Lampung bersama BPPSPAM, World Bank dan SCE. IIGF participated at Commencement of Pre - Qualification of the Bandar Lampung Water Supply PPP Project, as institution facilitating preparation of the Bandar Lampung Water Supply project with BPPSPAM, World Bank and SCE.	14 des 	21-23 des PII menyelenggarakan lokakarya “Pengadaan Proyek Infrastruktur – Pembelajaran dari Proyek PLTU Jawa Tengah” di Bandung, diikuti oleh para PJPK Air Minum Umbulan, Air Minum Semarang Barat, Air Minum Bandar Lampung dan Perusahaan Pengelola Jalan Tol. IIGF organized a workshop on “Infrastructure Development - Lessons from the Central Java Power Plant Project” in Bandung, attended by CAs from Umbulan Water Project, West Semarang Water Project, Bandar Lampung Water Project, and Toll Road Management Companies.	30 des PII menerima tambahan Penyerahan Modal Negara sebesar Rp 1,5 triliun sehingga total modal disetor PII menjadi Rp 3,5 triliun. IIGF received an additional Rp 1.5 trillion of State Equity Injection, increasing its paid-up capital to a total of Rp 3.5 trillion.

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

PII telah mencatatkan pencapaian yang memuaskan sekaligus membuktikan bahwa skema KPS dapat diimplementasikan di Indonesia.

Freddy Rikson Saragih
Komisaris Utama President Commissioner



Rp 1,500
Miliar Billion

Penambahan Penyertaan Modal Negara pada akhir tahun 2011.
Additional State Capital Injection made at the end of 2011.

IIGF has accomplished much in proving the viability of PPP implementation in Indonesia.

Pemegang Saham yang Terhormat,

Pada tahun 2011, Indonesia mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebesar 6,5%, melanjutkan tren pertumbuhan beberapa tahun terakhir ini yang semakin menempatkan Indonesia di jajaran negara-negara dengan pertumbuhan tinggi di dunia. Ke depan, didukung oleh struktur demografis penduduk yang menguntungkan, keberadaan sumber-sumber daya yang signifikan, dan pasar konsumen domestik yang kuat, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup prospektif.

Dear Shareholders,

Indonesia recorded a 6.5% growth in Gross Domestic Product in 2011, continuing the strong growth trend in the last couple of years that has increasingly placed Indonesia among the ranks of the strongest growth economies in the world. Going forward, with its favorable demographic structure, its many and significant resources, as well as a huge domestic market, the prospects for economic growth in Indonesia remain quite promising.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners



Freddy Rikson Saragih
Komisaris Utama
President Commissioner

Ayu Sukorini
Komisaris
Commissioner

Pada saat yang sama, hal ini memberikan tuntutan tersendiri bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur, sebagai faktor kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satu skema untuk menarik modal swasta ke investasi di bidang infrastruktur adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang telah banyak diterapkan di berbagai negara. Namun demikian masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, antara lain mengubah paradigma penyediaan layanan infrastruktur menggunakan anggaran belanja negara menjadi paradigma kemitraan antara sektor publik dan sektor swasta.

Di tengah tantangan tersebut, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PII, telah mencatatkan pencapaian yang memuaskan sekaligus membuktikan bahwa skema KPS bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diimplementasikan di Indonesia. Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek KPS PLTU 2 x 1.000 MW di Jawa Tengah merupakan tonggak pencapaian penting bagi PII di tahun 2011, karena merupakan proyek *show case* KPS berskala besar pertama yang berhasil direalisasikan dengan dukungan penjaminan oleh PII dan Kementerian Keuangan RI. Sepanjang tahun 2011, PII juga telah mencapai banyak kemajuan dalam mempersiapkan beberapa proyek lainnya seperti Proyek Air Minum Bandar Lampung, Proyek Rel Kereta Api Batubara di Kalimantan Tengah, dan beberapa proyek Jalan Tol di berbagai wilayah di Indonesia.

Di sisi lain, pengalaman di lapangan dalam memproses proyek-proyek tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan skema KPS masih tersendat oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesiapan dan kemampuan pihak pemilik proyek untuk menstruktur proyek-proyek yang *bankable* and layak secara komersil. Dalam konteks ini, Dewan Komisaris menilai bahwa aktivitas PII, di luar fungsinya sebagai penyedia fasilitas penjaminan, telah mampu memberikan nilai tambah melalui upaya-upaya pendampingan, sosialisasi, *capacity building*, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk investor dan perbankan potensial. Termasuk dalam hal ini adalah keberhasilan PII menerbitkan buku *Risk Allocation Guideline* yang menjadi acuan dalam mengalokasikan risiko proyek KPS di Indonesia.

At the same time, this growth creates its own demand for Indonesia to catch up with its current deficiencies in infrastructure development, widely recognized as a key element to support and sustain further economic growth in the country. The Public Private Partnership (PPP) presents an alternative scheme to attract private investments in infrastructure projects, and has been implemented in a number of countries. However, implementation of PPP is not without its challenges and, among others, includes the paradigm shift from the provision of public infrastructure funded by the state budget to the development of infrastructure in a partnership between the public and the private sectors.

In this regards, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), or the Indonesian Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), has accomplished much in proving the viability of PPP implementation in Indonesia. The signing of the Guarantee Agreement and the Recourse Agreement for the 2 x 1,000 MW Central Java Power Plant (CJPP) project represented a milestone achievement for IIGF in 2011, as the first large-scale PPP show case project that was successfully brought into realization with guarantee support provided by IIGF and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Also in 2011, IIGF made major progress in processing a number of other potential PPP projects, including the Potable Water Project in Bandar Lampung, the Coal Railway Project in Central Kalimantan, and several Toll Road projects in various regions in Indonesia.

On the other hand, first-hand experiences in the actual processing of those projects have shown a number of impediments to a smooth PPP implementation, including lack of proper preparation as well as inability of project owners in structuring bankable and economically viable infrastructure projects. In this context, the Board of Commissioners is of the opinion that the activities of IIGF, in addition to its function as a guarantee provider, have provided much needed added value in terms of advisory and socialization efforts, capacity building, and also coordination with the various parties involved, including potential investors and lenders. Noteworthy among these efforts was the formulation of a Risk Allocation Guideline by IIGF, serving as a useful reference in the allocation of risks for PPP projects in Indonesia.

Dari sisi keuangan, Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 228,35 miliar, terutama dikontribusikan oleh pendapatan pengelolaan dana, serta laba bersih sebesar Rp 157,14 miliar pada tahun 2011. Pada periode yang sama, total aset Perseroan tercatat meningkat dari Rp 2.052,92 miliar menjadi sebesar Rp 3.738,63 miliar, dengan adanya tambahan Penempatan Modal Negara sebesar Rp 1.500 miliar pada akhir tahun 2011. Dengan kinerja ini, Perseroan telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan 2011 dari Kantor Akuntan Publik yang bereputasi internasional; dan PII dianggap memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dihasilkan dari audit kepatuhan oleh Kantor Akuntan Publik yang sama.

Sepanjang tahun 2011, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kepengurusan PII melalui rapat-rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, yang diselenggarakan secara berkala sebanyak enam kali pada tahun tersebut. Seluruh anggota Komisaris dan Direksi hadir dalam setiap rapat yang juga dihadiri oleh staf senior PII lainnya sesuai agenda rapat bersangkutan.

Sampai dengan akhir tahun 2011, PII masih belum memiliki struktur komite di bawah Dewan Komisaris, dikarenakan keterbatasan sumber daya Perseroan yang masih harus berkonsentrasi penuh pada aktivitas bisnis dan operasional yang lebih mendesak serta urgensi pembentukannya apabila dikaitkan dengan volume transaksi yang relatif kecil dan baru mulai berkembang. Dewan Komisaris mengharapkan kelengkapan struktur komite Komisaris akan dapat diwujudkan dalam waktu dekat.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan kerangka struktur Tata Kelola Perusahaan yang sesuai dengan standar praktik internasional terbaik. Beberapa upaya yang perlu diapresiasi antara lain adalah pementasan proses bisnis dan standard operation procedure, pemutakhiran *Operations Manual*, penetapan Nilai-nilai Perusahaan, dan penerbitan Pedoman Kode Etik Perusahaan. Kami percaya bahwa hal ini akan menjadi salah satu keunggulan PII dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan para Penanggung Jawab Pelaksana Kerjasama (PJPK), kementerian terkait, komunitas investor, institusi keuangan internasional dan sebagainya.

In terms of financial performance, the Company managed to book Rp 228.35 billion in operating revenues, mainly contributed by revenues from fund management, as well as Rp 157.14 billion in net income, for the year of 2011. In the same year, the Company's total assets increased from Rp 2,052.92 billion to Rp 3,738.63 billion, due mainly to an additional Rp 1,500 billion of State Capital Injection made at the end of 2011. Along with this performance, the Company's Financial Statements for 2011 have received an unqualified opinion in the audit by an internationally reputable public accounting firm. Moreover, according to the result of a compliance audit performed by the same public accounting firm, IIGF was found to be in full compliance with all applicable laws and regulations.

In 2011, the Board of Commissioners carried out active supervision of the management of IIGF through regular meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, for a total of six meetings throughout the year. All Commissioners and Directors were present in each of those meetings, which were attended also by other senior staff of IIGF as needed by the agenda under discussion.

Up until year-end 2011, the IIGF has not established the Board of Commissioners committee structure. This was mostly on account of the limited available company resources that had to be concentrated on the more pressing needs of business and operational activities, and also the level of urgency of such committees in view of the relatively small volume of transactions at this early stage of operations. However, the Board of Commissioners expects that the committee structure could soon be properly established.

The Board of Commissioners also greatly appreciated efforts by the Board of Directors in developing the Company's corporate governance structure according to best in class international practice and standards. Examples of the fine work done in this area include the establishment of various work processes and standard operation procedures; the updating of the Operations Manual; the development of corporate Core Values; and the formulation of the Company's Code of Conduct. We believe that these will serve IIGF well as a strong point in its interactions with Contracting Agencies (CA), the various government ministries involved, investor communities, international financial institutions, and other stakeholders of the Company.

Memandang ke depan, dan dengan melihat pada kinerja serta prestasi yang telah dicapai PII di tahun 2011, Dewan Komisaris merasa optimis akan prospek Perseroan. Optimisme tersebut juga ditunjang oleh beberapa perkembangan yang terjadi menjelang akhir tahun 2011, terutama pengesahan UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh DPR dan kenaikan peringkat Indonesia sebagai negara layak investasi (*investment grade*) oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings.

Kedua perkembangan tersebut diharapkan akan berdampak positif dalam meningkatkan kontribusi sektor swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, dimana PII dapat berkontribusi melalui penyediaan penjaminan yang dibutuhkan.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada Direksi dan segenap jajaran PII yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan profesionalisme dalam mewujudkan tahun 2011 sebagai tahun pencapaian penting dan awal dari berbagai kemajuan di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja sama dan berkontribusi pada kemajuan PII sampai dengan saat ini.

Dengan dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan oleh pemangku kepentingan, kami yakin bahwa PII akan mampu menyelesaikan Tahap Persiapan di tahun 2012 dan siap memasuki Tahap Pertumbuhan, sesuai dengan *road map* rencana pengembangan PII ke depan.

Untuk dan Atas nama Dewan Komisaris,



Freddy Rikson Saragih
Komisaris Utama
President Commissioner

Looking forward, on the basis of the fine performance and achievements of IIGF in 2011, the Board of Commissioners views the Company's prospects with optimism. A number of recent developments towards the end of 2011 also lend support to this optimism, namely the ratification by the House of Representatives of the Land Bill regulating land acquisition in development projects for public interest, and the upgrade by international rating agency Fitch Ratings of Indonesia's sovereign rating to investment-grade.

These two developments are expected to provide positive impetus to advance investments from the private sector in Indonesia's infrastructure projects, where IIGF can contribute its part through the provision of the needed guarantee facilities.

In closing, we would like to extend our appreciation to the Board of Directors and all staff at IIGF, who have worked hard with dedication and professionalism in making 2011 into a year of milestone achievements and the beginning of much more progress to be unfolded in future years. We would also like to thank all other stakeholders for their cooperation and contribution towards the continuing progress of IIGF.

With continuing support and trust from the stakeholders, we are confident that IIGF will be able to complete its Preparatory Stage in 2012 and go on to the Growth Stage, on track with the road map of IIGF development plans into the future.

For and On behalf of the Board of Commissioners,

Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

Struktur transaksi dan tata kelola yang baik dalam mengeksekusi suatu proyek akan dapat meningkatkan daya tarik untuk memperoleh investor yang kredibel dan memastikan perolehan pendanaan bagi proyek.

Sinthya Roesly
Direkur Utama President Director



A well-structured transaction and good governance in project execution will improve project attractiveness in acquiring credible investors and ensuring financial closure of the project.

Rp **157.14**
Miliar Billion

Laba setelah pajak pada tahun 2011, meningkat signifikan dibandingkan laba setelah pajak tahun 2010 sebesar Rp 46,60 miliar.

Net income after tax in 2011, a significant increase compared to income after tax of Rp 46.60 billion in 2010.

Tahun 2011 merupakan tahun kedua keberadaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII sebagai instrumen kebijakan fiskal Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan penjaminan atas risiko politik bagi proyek-proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia. Meskipun regulasi tentang penjaminan infrastruktur baru terbit pada akhir tahun 2010, berkat kerja keras seluruh jajaran manajemen dan staf PII sepanjang tahun 2010, Perseroan telah dapat memasuki tahun 2011 dengan landasan operasional yang telah mulai tertata, baik menyangkut model bisnis dan kapasitas institusi, maupun dukungan regulasi dan keterbukaan para Pemangku Kepentingan terhadap peran dan fungsi PII.

The year of 2011 was the second year for Indonesian Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) to operate as a fiscal policy instrument of the Government of Indonesia for the provision of guarantees against political risks in infrastructure projects under Public Private Partnership (PPP) scheme in Indonesia. While the regulations for infrastructure guarantee were only issued at the end of 2010, because of the hard work of the whole IIGF management and staffs during the year, IIGF was able to enter 2011 with a proper operational foundation in terms of business model and institutional capacity as well as regulatory support and acknowledgment from various stakeholders on the role and function of IIGF.

Direksi

Board of Directors

Armand Hermawan
Direktur Keuangan dan Administrasi
Director of Finance and Administration

Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director

Yadi J. Ruchandi
Direktur Operasi
Director of Operations



Di tahun 2011, PII berkonsentrasi pada sistem dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan penjaminan bagi beberapa proyek infrastruktur yang telah mulai digarap sejak tahun 2010. Pada saat yang bersamaan, Perseroan juga terus melanjutkan berbagai program kerja yang terkait dengan kelengkapan kerangka kerja organisasi maupun pembangunan kapasitas institusi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan mandat PII.

Kami bersyukur dapat melaporkan kepada Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan Perseroan lainnya mengenai berbagai kemajuan dan perkembangan penting lainnya yang telah dicapai oleh PII di tahun 2011.

Kinerja Operasional

Pada tanggal 6 Oktober 2011, PII mencatat suatu pencapaian penting dengan ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan (*Guarantee Agreement*) antara PII, Pemerintah RI dan PT Bhimasena Power Indonesia serta Perjanjian Regres (*Recourse Agreement*) antara PII dan PT PLN (Persero) untuk mendukung proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 1.000 MW di Jawa Tengah. Proyek KPS PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek showcase KPS skala besar pertama berdasarkan Perpres No. 67/2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 13/2010 dan Perpres No. 56/2011, yang didukung penjaminan PII bersama-sama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mengingat nilai proyek yang demikian besar dan melibatkan investor asing, maka transaksi ini membutuhkan dukungan pemerintah berupa penjaminan atas berbagai risiko yang terkait dengan tindakan maupun non-tindakan pemerintah.

Bagi PII sendiri, proyek KPS PLTU Jawa Tengah menjadi penting artinya karena memberikan suatu model proyek yang nantinya dapat menjadi acuan bagi proyek-proyek KPS infrastruktur lainnya. Namun yang lebih penting lagi, proyek KPS PLTU Jawa Tengah membuktikan bahwa keberadaan PII mampu menciptakan nilai tambah nyata yang bermanfaat langsung bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan proyek baik berupa transparansi dalam berproses maupun peningkatan kompetisi yang mampu menghasilkan harga jual beli listrik terbaik.

Throughout 2011, IIGF focused on the necessary systems and processes to provide guarantees for a number of infrastructure projects that have been worked out since 2010. At the same time, the Company continued with a variety of initiatives related to organizational framework as well as the institutional capacity development needed for implementation of duties and mandate.

We are pleased to deliver this report to the shareholders and other stakeholders of IIGF about our progress and other important developments achieved in 2011.

Operational Performance

On 6 October 2011, IIGF recorded a milestone achievement with the signing of the Guarantee Agreement between IIGF, the Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia, and the Recourse Agreement between IIGF and PT PLN (Persero), to support a 2 x 1,000 MW Coal-Fired Powerplant PPP project in Central Java. The Central Java Powerplant PPP project represents the first large-scale showcase PPP project based on Presidential Regulation (Perpres) No. 67/2005, as subsequently amended by Perpres No. 13/2010 and Perpres No. 56/2011, which received a guarantee provided jointly by IIGF and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. In view of the high value of the project and the involvement of overseas investors, the Central Java Powerplant PPP deal needs support from the government in the form of guarantee against risks associated with government actions or inactions.

For IIGF, the Central Java Powerplant PPP project is particularly important as it provides an actual working model that can later serve as a reference for other PPP infrastructure projects. Even more importantly, the Central Java Powerplant PPP project proves that through its activities, IIGF is able to create added value with direct and tangible benefits to project stakeholders, in terms of process transparency as well as increased competition, ultimately resulting in the best possible power purchase price.

Bagi pihak pemilik proyek, adanya struktur transaksi dan praktik tata kelola yang baik dalam mengeksekusi suatu proyek akan dapat meningkatkan daya tarik untuk memperoleh investor yang kredibel dan memastikan perolehan pendanaan. Bagi sektor swasta, baik investor proyek maupun penyedia dana, ketersediaan penjaminan atas risiko infrastruktur dapat menjadi elemen kunci bagi keputusan berinvestasi pada sebuah proyek infrastruktur di Indonesia. Pada gilirannya nanti, masyarakat dan pengguna jasa akan diuntungkan dengan adanya berbagai infrastruktur tersebut.

Pada tahun 2011, PII juga mencatat berbagai pencapaian dalam proyek di sektor air, perkeretaapian dan ketenagalistrikan. Proyek Air Minum Bandar Lampung dengan kapasitas 500 liter/detik telah memasuki tahap Pre Qualification yang diikuti oleh 10 peminat dari pihak swasta nasional maupun internasional. Minat yang sangat tinggi ini menjadi indikasi kepercayaan para investor terhadap proyek yang ikut difasilitasi oleh PII, SCE dan Bank Dunia dalam menstruktur proyek.

Di sektor perkeretaapian, PII dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penugasan untuk Persiapan dan Transaksi Proyek Kereta Api Kalimantan Tengah. Proyek ini merupakan bagian dari Koridor Kalimantan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ("MP3EI") yang persiapan pendahuluannya telah difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ("Bappenas").

Di sektor ketenagalistrikan, PII juga dalam persiapan untuk ikut membantu PT PLN (Persero) dalam melakukan percepatan persiapan dan eksekusi proyek KPS PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan 10.

Proyek lain yang sedang dalam tahap kajian persiapan bersama PJPK meliputi: Proyek Air Minum Semarang Bagian Barat, Proyek Air Minum Umbulan, Proyek Akses Tol Tanjung Priok, dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Kesemuanya merupakan bagian dari proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah RI untuk diwujudkan melalui skema KPS.

For the project owner, a well-structured transaction and good governance in project execution will improve project attractiveness in acquiring credible investors and ensuring financial closure of the project. For private sector, either investors in the project or their lenders, the availability of guarantees against infrastructure risk may become a key element to invest in infrastructure projects in Indonesia. And in turn, the availability of these various infrastructure developments will bring benefits to the public and society at large.

In 2011, IIGF also made considerable progress related to several infrastructure projects in the water, railway and electricity sectors. The 500-liter/second Water Supply System project in Bandar Lampung has entered the Pre-Qualification stage with 10 interested domestic and overseas private sector bidders. The high number of participants is an indication of market confidence in the project, which is facilitated by IIGF, SCE and the World Bank in structuring the project.

In the railway sector, IIGF and the Provincial Government of Central Kalimantan have signed the Cooperation Agreement for the preparation and transaction of the Central Kalimantan Railway Project. The project, whose early stage preparation has been facilitated by the National Development Planning Agency (Bappenas), is part of the Kalimantan Growth Corridor of the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI).

In the power sector, IIGF has been involved in assisting PT PLN (Persero) to accelerate the preparation and execution of Mine Mouth Coal-Fired Powerplant Sumsel 9 and 10 PPP projects.

Other projects which were in the preparatory review stage with the respective Contracting Agency (CA) include: the West Semarang Drinking Water Project, Umbulan Drinking Water Project in East Java, Tanjung Priok Access Tollroad and Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Tollroad. These projects are part of the government priority infrastructure projects to be implemented through PPP scheme.

Kinerja Keuangan

Di sisi keuangan, PII membukukan laba setelah pajak sebesar Rp 157,14 miliar pada tahun 2011, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 46,60 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pendapatan pengelolaan dana, yang tercatat tumbuh dari Rp 77,11 miliar di 2010 menjadi sebesar Rp 183,12 miliar pada tahun 2011. Sampai dengan akhir tahun 2011, pendapatan pengelolaan dana masih merupakan komponen dominan dari arus pendapatan Perseroan.

Total aset tercatat tumbuh menjadi sebesar Rp 3.738,63 miliar pada akhir tahun 2011, dibandingkan Rp 2.052,92 miliar pada akhir tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset Perseroan terutama karena tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1.500 miliar yang diterima PII pada tanggal 30 Desember 2011. Tambahan PMN tersebut dimaksudkan untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan kapasitas penjaminan PII di beberapa tahun mendatang.

Tata Kelola Perusahaan

Sejak awal berdirinya, PII memiliki komitmen untuk menerapkan standar praktik internasional terbaik terkait dengan tata kelola perusahaan termasuk struktur organisasi, prosedur operasional, serta penanganan aspek sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas Perseroan. Hal ini erat kaitannya dengan upaya membangun reputasi dan kredibilitas PII sebagai sebuah institusi keuangan, termasuk dalam berhubungan dengan mitra domestik maupun internasional.

Sampai dengan akhir tahun 2011, PII telah melengkapi dan menyempurnakan berbagai dokumen kebijakan perusahaan dan prosedur operasi standar yang dapat mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun tersebut, PII antara lain telah menyelesaikan *Internal Audit Charter* dan *Internal Audit Manual*, yang disusul dengan penyempurnaan Kerangka Pengelolaan Risiko dan *Standard Operating Procedures* (SOP). Dengan demikian, PII telah menyelaraskan Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management/ERM*) dengan standar internasional seperti COSO-ERM, ISO:31000 dan AS/NZ 4360.

Financial Performance

In terms of financial performance, IIGF posted net income after tax of Rp 157.14 billion in 2011, a significant increase compared to Rp 46.60 billion in 2010. The increase was contributed mainly by the growth in income from fund management, which rose from Rp 77.11 billion in 2010 to Rp 183.12 billion in 2011. Up until year-end 2011, income from fund management still represents the main contributor to the Company's revenue streams.

Total assets meanwhile has grown to Rp 3,738.63 billion as at year-end 2011, compared to Rp 2,052.92 billion last year. The growth in the Company's total assets was mainly due to an additional State Capital Injection (PMN) of Rp 1,500 billion received by IIGF on 30 December 2011. The additional State Capital Injection was meant to strengthen the Company's capital structure and to increase its guarantee capacity over the next couple of years.

Corporate Governance

Since its establishment, IIGF has maintained a commitment to implement international best-practice standards in corporate governance, including in areas of organizational structure, operational procedures, as well as social and environment aspects in its activities. This commitment is closely inter-related with the Company's efforts in building its reputation and credibility as a financial institution, notably in its interactions with domestic and international partners.

Up until year-end 2011, IIGF has completed and further enhanced a variety of Company policies and standard operating procedures as part of the implementation of good corporate governance. In 2011, among other accomplishments, IIGF completed the Internal Audit Charter and Internal Audit Manual, followed by improvements to the Risk Management Framework and related Standard Operating Procedures (SOP). At the same time, IIGF has ensured the alignment of its Enterprise Risk Management (ERM) framework with international standards such as COSO-ERM, ISO:31000 and AS/NZ 4360 standards.

PII juga telah menetapkan nilai-nilai perusahaan yang terdiri dari : Integritas (*Integrity*), Kerjasama (*Teamwork*), Berpikiran Luas (*Think Big*), Saling Percaya (*Mutual Trust*) dan Keunggulan (*Excellence*), atau disingkat InTIME. Nilai-nilai perusahaan ini kemudian dijadikan rujukan dalam menerbitkan Pedoman Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*) yang akan menjadi pedoman perilaku bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengoperasikan perusahaan dan bermitra dengan PII. Pedoman ini akan terus disosialisasikan dan dimonitor implementasinya dari waktu ke waktu agar Perseroan dapat terus beroperasi dengan berdasar pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta etika bisnis yang baik.

Sebagai pelaku bisnis yang berada di tengah-tengah masyarakat, PII juga menyadari pentingnya memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain kewajiban sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) and *Corporate Social Responsibility* (CSR), PII meyakini tumbuhnya perusahaan harus diikuti oleh tumbuhnya masyarakat sekitar. Oleh karena itu PII melaksanakan program CSR untuk masyarakat di daerah Kabupaten Batang dan Kotamadya Bandar Lampung yang berfokus pada bidang pendidikan. Pada tahun 2011, program CSR utama kami adalah memberikan pelatihan 'Paradigma Baru dalam Mengajar' kepada guru-guru Sekolah Dasar dan memberikan bantuan infrastruktur pendidikan untuk beberapa sekolah dasar di kedua wilayah tersebut. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi kepada masyarakat melalui berbagai program yang berkelanjutan.

IIGF has also formulated its core corporate values, comprising values of Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust and Excellence, or known as InTIME principles. These core corporate values have become the reference points for the development of the Company's Code of Conduct, and provide a comprehensive guideline for the expected behavior of all stakeholders in conducting all operations of the Company or in a partnership with IIGF. These guidelines continued to be socialized and their implementation are monitored from time to time, in order to ensure that the Company continues to operate in compliance with prevailing laws and regulations and in accordance with the highest standard of business ethics.

As a business entity operating within communities, the Company is aware of the importance of contributing to improve the quality of life of communities. In addition to its mandatory obligation as a State-Owned Enterprise to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR) programs, IIGF also believes that business growth and community growth should go hand in hand. Accordingly, IIGF engaged in CSR activities with a focus in education for the benefit of local communities in Batang Regency and Bandar Lampung Township. In 2011, our primary CSR activities centered on organizing a workshop for elementary school teachers with the theme of 'New Paradigm in Teaching', and donations of educational facilities to a number of elementary schools in the two above-mentioned areas. Going forward, we remain committed to contribute further to the welfare of communities through continuing and sustainable CSR programs.

Unfolding Future Progress, Today

Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dalam pengerjaan proyek KPS PLTU Jawa Tengah di tahun 2011 serta perkembangan Perseroan di berbagai aspek lain, telah menjadi modal yang berharga bagi PII untuk memasuki tahun 2012 dengan lebih percaya diri untuk mencapai target-target Perseroan. Oleh karenanya, ungkapan *'Unfolding Future Progress, Today'* sebagai tema Laporan Tahunan ini dapat menggambarkan kemajuan yang dicatat PII sepanjang tahun 2011, sehingga menempatkan PII pada posisi yang lebih mantap dan fokus pada eksekusi proyek. Dengan demikian kami berharap dapat memberi hasil yang kongkrit dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan mendukung kemajuan masyarakat di masa mendatang.

Atas nama Direksi, saya ingin memberikan penghargaan yang tulus kepada seluruh karyawan PII yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi untuk mewujudkan target-target kinerja Perseroan di tahun 2011. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, para mitra kerja PII di berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintahan baik di pusat maupun daerah, para Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, investor dan penyandang dana serta para pemangku kepentingan lainnya yang telah bekerja sama dengan baik bersama PII sepanjang tahun 2011. Keberlanjutan dukungan, kepercayaan serta kerja sama yang baik tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PII di masa mendatang sehingga dapat memberikan kontribusi yang semakin berarti bagi bangsa Indonesia.

Untuk dan Atas nama Direksi,



Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director

Unfolding Future Progress, Today

The experience and knowledge gained in processing the Central Java Powerplant PPP project in 2011, as well as encouraging developments made by the Company in other areas, have provided IIGF with more confidence in entering 2012 towards the achievement of our corporate targets. In that context, the theme of this Annual Report, *'Unfolding Future Progress, Today'*, appropriately illustrates the progress of IIGF throughout 2011, and how that achievement has placed IIGF in a strategic position to focus more on project execution and deliver tangible results in its continuing support for the acceleration of infrastructure development and future progress of Indonesia society.

On behalf of the Board of Directors, allow me to extend our sincere appreciation to all staffs at IIGF who have worked hard with full dedication towards the achievement of the Company's performance targets in 2011. We are also grateful for the support and trust that we continue to receive from our Shareholders, the Board of Commissioners, our counterparts in the various Government Ministries and Agencies in central and regional governments, the Contracting Agencies, investors and financiers as well as all other stakeholders which have cooperated well with IIGF throughout 2011. With your continuing support, trust and cooperation, IIGF will be able to continue to improve its performance in the coming years thus making a meaningful contribution to Indonesia.

For and On behalf of the Board of Directors,

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management's Discussion &
Analysis

82.1%

Pertumbuhan
Total Aset
Total Aset
Growth



Total aset Perseroan meningkat menjadi Rp 3.738,63 miliar di akhir tahun 2011, dari Rp 2.052,92 miliar di tahun 2010.

The Company's total assets increased to Rp 3,738.63 billion at year-end 2011, from Rp 2,052.92 billion in 2010.

Peluang & Tantangan

Challenge & Opportunities

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8%-9% setahun pada periode 2011 - 2025.

The Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) set an economic growth target of 8% -9% a year in the period 2011 to 2025.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan perekonomian paling dinamis di dunia selain negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India dan Cina). Seiring dengan hal tersebut, timbul kesadaran yang makin tinggi akan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dalam konteks *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), target pertumbuhan ekonomi 8%-9% setahun pada periode 2011 - 2025 hanya akan tercapai apabila tersedia infrastruktur yang memadai.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur di tahun 2010 – 2014 mencapai Rp 1.924 triliun. Namun hanya sekitar 30% yang dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan sisanya harus diupayakan melalui investasi sektor swasta. Salah satu cara untuk mengundang dan memfasilitasi investasi swasta tersebut adalah melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Melalui KPS, badan usaha swasta bertanggung jawab untuk

The performance of Indonesia's economy in recent years has increasingly pushed the country up front among the highest growth economies in the world, comparable to the BRIC (Brazil, Russia, India and China) countries. Along with this, there is a growing recognition of the need for accelerated infrastructure development in support of further growth of Indonesia's economy going forward. Within the context of the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI), adequate infrastructure is in fact a prerequisite for the achievement of annual economic growth target of 8%-9% in the 2011-2025 period.

Government estimation presents that infrastructure development in 2010-2014 would require funding of Rp 1,924 trillion. Of this amount, however, the State Budget can only cover about 30%, while the remaining is expected to come from private investment. A possible approach to attract and facilitate private sector investments is through the Public Private Partnership (PPP) scheme. In the PPP scheme, a private entity will undertake to design, develop, operate and finance an infrastructure facility.



mendesain, membangun, mengoperasikan dan mendanai fasilitas infrastruktur. Atas pelayanan infrastruktur tersebut pengguna atau Pemerintah akan membayar dalam bentuk tarif, ongkos dan pada akhir masa konsesi aset dapat diserahkan kepada Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme KPS untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur melibatkan dukungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam perencanaan dan persiapan proyek, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam memasarkan dan mempromosikan proyek, serta Kementerian Keuangan untuk menyediakan regulasi dan ketentuan terkait pendanaan dan penjaminan proyek serta fasilitas *viability gap funding* (VGF).

Sedangkan pihak yang memiliki peran penting dalam persiapan dan pelaksanaan proyek KPS adalah Penanggung Jawa Pelaksana Kerjasama (PJPK), yang merupakan mitra mewakili Pemerintah dalam KPS. Entitas ini dapat berupa Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab menyediakan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

The public users or the Government will then compensate the private entity for the use of the infrastructure in the form of charges or fee payments. At the end of the concession period, ownership of the respective asset will revert back to the Government.

In its implementation, the PPP mechanism for the development of infrastructure projects will involve the participation of the National Development Planning Agency (Bappenas) in project planning and preparation, the Investment Coordination Board (BKPM) for project marketing, and the Ministry of Finance who are responsible the various regulations concerning project funding and underwriting as well as for the provision of viability gap funding (VGF) facilities.

The key player in the preparation and implementation of PPP projects is the Contracting Agency (CA), which represents the Government in the PPP scheme. These CAs are Government ministries or agencies, local governments, State-Owned Enterprises (BUMN), or Local Government Enterprises (BUMD) who are responsible for the provision of various infrastructure developments as mandated by laws and regulations.



Ketenagalistrikan

Power

Sesuai dengan Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik tahun 2010-2019, Pemerintah dan PT PLN (Persero) / PLN berencana meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik nasional menjadi sebesar sekitar 85.800 MW pada tahun 2019. Peningkatan kapasitas tersebut diperlukan untuk mengimbangi kenaikan permintaan tenaga listrik sebesar sekitar 9% per tahun, termasuk peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi 90% pada tahun 2019, dari sekitar 65% pada tahun 2010.

Sampai dengan tahun 2011, selain berhasil melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres bagi proyek PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW, PII juga telah mulai memproses penjaminan proyek PLTU Mulut Tambang 9 di Sumatera Selatan (2 x 600 MW) dan PLTU Mulut Tambang 10 di Sumatera Selatan (1 x 600 MW).

As outlined in the General Plan for Electricity Development 2010-2019, the Government and PT PLN (Persero)/PLN are planning to increase total domestic power generation capacity to approximately 85,800 MW by 2019. The increase in generating capacity is necessary to keep pace with the growth in electricity demand of some 9% annually, including to meet the goal of increasing the national electrification rate to 90% in 2019, up from around 65% in 2010.

Up until 2011, in addition to Conducting Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the 2 x 1,000 MW Coal-Fired Central Java Power Plant, IIGF has also initiated the necessary preliminary processes for the underwriting of the Coal-Fired Mine Mouth Power Plant 9 in South Sumatra (2 x 600 MW) and the Coal-Fired Mine Mouth Power Plant 10 in South Sumatra (1 x 600 MW).

Sistem Penyediaan Air Minum Water Supply System

Pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan salah satu upaya penting untuk mencapai target *Millenium Development Goals* (MDG) Pemerintah sampai dengan tahun 2015, khususnya untuk meningkatkan akses penduduk Indonesia terhadap layanan air minum dan sanitasi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tanggung jawab penyediaan SPAM ada di pihak Pemerintah (kabupaten, kota maupun provinsi), yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Keterlibatan swasta melalui skema KPS dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan PDAM dalam aspek teknis, manajemen maupun keuangan, yang selama ini menjadi kendala dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat.

Pada tahun 2011, selain proyek SPAM di Bandar Lampung yang akan segera menentukan *shortlisted bidders*, PII juga mulai mendukung persiapan proyek SPAM di Semarang bagian Barat dan proyek SPAM Umbulan, Jawa Timur.

Selain dari proyek-proyek tersebut, saat ini terdapat beberapa proyek penyediaan air minum yang tengah disiapkan oleh PJPK untuk dikembangkan melalui skema KPS.

The development of Water Supply System (SPAM) infrastructure represents an important part towards fulfillment of the Government's Millennium Development Goals (MDGs) up to year 2015, and especially as regards improved access to potable water and sanitary services for the people of Indonesia. Current laws and regulations stipulate that responsibility for the provision of SPAM rests with local governments (municipal, regency or provincial level), and carried out by Local Water Utility Companies (PDAM).

Private sector participation through the PPP scheme offers a solution to offset deficiencies in technical and managerial expertise as well as financial capability of PDAMs, which hitherto have been a hindrance for increased potable water service coverage and quality for the public.

In 2011, other than the Bandar Lampung SPAM project that will soon enter the shortlisted bidders selection process, IIGF has also supported initial preparation for SPAM projects in West Semarang and Umbulan, East Java.

In addition, several other drinking water projects are currently being considered by the respective CAs for development through PPP scheme.





Jalan dan Jembatan Tol

Toll Roads and Bridges

Dilihat dari sisi kebutuhan konektivitas, pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu aspek yang strategis untuk mencapai target-target MP3EI. Di sisi lain, upaya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk pengembangan jalan dan jembatan tol, masih menghadapi keterbatasan pendanaan dan masalah pembebasan lahan.

Pengembangan jalan dan jembatan tol merupakan salah satu prioritas Pemerintah untuk dilaksanakan melalui skema KPS. Hingga akhir tahun 2011, tercatat 8 (delapan) proyek pembangunan jalan dan jembatan tol senilai lebih kurang Rp 43 triliun yang telah disampaikan *screening form*-nya oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) kepada PII.

Sedangkan dua proyek yang tengah dipersiapkan proses penjaminannya oleh PII adalah proyek jalan tol Akses Tanjung Priok, DKI Jakarta; dan tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

In terms of economic connectivity needs, the development of road and bridge infrastructure represents a strategic element in the achievement of MP3EI targets. However, development of road and bridge infrastructure, including toll roads, has been held back by funding constraints as well as issues of land acquisition.

Development of toll roads through the PPP scheme is on the Government's priority list. As of end 2011, there were 8 (eight) toll road and bridge constructions projects amounted to Rp 43 trillion which the screening form has been submitted by Toll Road Management Agencies (BPJT) to IIGF.

IIGF was preparing the guarantee processes for the Tanjung Priok Access toll road in Jakarta and the Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi toll road in North Sumatra.

Transportasi Transportation

Elemen konektivitas ekonomi lain dalam konteks MP3EI adalah infrastruktur transportasi udara, laut dan darat. Di sektor ini, skema KPS boleh diaplikasikan pada pengembangan pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan, serta sarana dan prasarana perkeretaapian.

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah membuka peluang bagi swasta untuk berinvestasi di sektor pelayanan jasa kebandarudaraan bagi fasilitas darat.

Sampai saat ini, belum ada proyek proyek bandara yang siap untuk dikerjasamakan dalam skema KPS.

Another economic connectivity element within the context of MP3EI is air, sea and land transportation. In this sector, the PPP scheme can be applied for the development and operation of airport services, the development and operation of seaport services, and the development of railway infrastructure and facilities.

Law No. 1 Year 2009 on Aviation provides for private sector investments in the development of airport services on the ground.

At present, however, there are no airport projects ready to be implemented through the PPP scheme.





Di sektor kepelabuhanan, pada tahun 2011, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mulai diimplementasikan, yang membuka peluang bagi partisipasi pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Peluang pasar sebagai daya tarik investasi cukup besar, mengingat masih sangat minimnya fasilitas pelabuhan yang ada saat ini untuk melayani pertumbuhan arus barang, baik dalam perdagangan internasional maupun pelayaran antar-pulau di dalam negeri.

Sampai saat ini, belum ada proyek proyek pelabuhan yang siap untuk dikerjasamakan dalam skema KPS.

Di sektor perkeretaapian, infrastruktur yang ada saat ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sebagian kecil di Sumatera. Belum ada pengembangan yang signifikan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Di lain pihak, besarnya populasi Indonesia, terutama di Jawa dan Bali,

In the seaport services sector, 2011 is the starting year for the implementation of Law No. 17 Year 2008 on Shipping, which provides for the participation of local governments and the private sector in the development and operation of seaport infrastructure in Indonesia. Market incentives for investments are quite attractive, as current seaport facilities are definitely inadequate to cope with increasing volumes of maritime cargo traffic in international trade as well as in domestic inter-island shipping.

At present, however, there are no seaport projects ready to be implemented through the PPP scheme.

In the railway sector, the existing infrastructure is concentrated in the island of Java, and a small portion in Sumatra, with no significant development being undertaken in recent years. On the other hand, there is a pressing need for alternatives in extensive, reliable and affordable



semakin menuntut adanya alternatif sistem transportasi darat yang ekstensif, handal dan terjangkau harganya. Di Sumatera dan Kalimantan, infrastruktur perkeretaapian juga akan dibutuhkan untuk mendukung konektivitas industri pertambangan, khususnya penambangan batu bara.

Pemerintah saat ini telah mengembangkan masterplan penyelenggaraan perkeretaapian yang baru yang membuka kemungkinan partisipasi swasta pada pengembangan infrastruktur perkeretaapian.

Di tahun 2011, PII tengah dalam proses memfasilitasi penstrukturan proyek kereta api batubara di Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku PJKP.

land transportation systems to serve Indonesia's huge population especially in Java and Bali. Meanwhile, Sumatra and Kalimantan also have needs for railway infrastructure in support of better connectivity in the mining industry, especially coal mining.

At present, the Government has developed a new masterplan for railway development that opens the way for private sector participation in the development of railway infrastructure.

In 2011, IIGF was involved in facilitating the structuring of the Central Kalimantan coal railway project in cooperation with the Provincial Government of Central Kalimantan as Contracting Agency.



Air Limbah & Persampahan

Sewage & Solid Waste

Sektor air limbah dan persampahan padat juga merupakan peluang investasi bagi swasta, melalui penyediaan instalasi pengolahan air limbah terpusat maupun sistem pengangkutan dan pembuangan sampah padat. Instalasi pengolahan air limbah terpusat akan semakin diperlukan untuk melayani kawasan pusat komersil di kota-kota besar maupun di kawasan industri.

Dalam hal pengelolaan sampah padat, UU No. 18 Tahun 2008 antara lain telah mengatur mengenai penutupan atau revitalisasi fasilitas-fasilitas pembuangan sampah akhir yang menggunakan sistem penumpukan terbuka (*open dumping*). Ini memberi peluang bagi proyek-proyek pengembangan sistem sanitary atau *controlled landfill* sebagai penggantinya. Karena sistem *open dumping* menghasilkan gas metana, pengembangan fasilitas *sanitary landfill* dimungkinkan untuk memperoleh dukungan pendanaan dalam skema Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism/CDM*). Selain itu, penggunaan teknologi modern juga memungkinkan pengelola fasilitas pengolahan sampah untuk memproduksi energi listrik maupun pupuk pertanian organik sebagai sumber pendapatan tambahan.

The sewage and solid waste sector also represents investment opportunities for the private sector in the provision of centralized waste water treatment facilities and solid waste transportation and disposal systems. Facilities for the centralized treatment of waste water are increasingly needed in commercial centers in large cities as well as in industrial estates.

In regards management of solid waste, Law No. 18 Year 2008 contains provisions for the closure or revitalization of existing open-dump municipal solid waste disposal facilities. This provides opportunities for the development of sanitary or controlled landfill disposal systems in replacement of existing open-dump facilities. As methane gas is generated in open-dump systems, development of sanitary landfill facilities may take advantage of funding support within the Clean Development Mechanism (CDM) scheme. In addition, operators of landfill waste disposal facilities may also utilize modern technology to produce electricity or organic compost fertilizers from the processing of solid wastes, and thus generate additional income from their operations.



Sektor-sektor Lain

Other Sectors

Sesuai Peraturan Presiden No. 13/2010, beberapa sektor infrastruktur lain yang juga dapat dikembangkan melalui skema KPS adalah:

- sektor pengairan, meliputi infrastruktur saluran pembawa air baku
- sektor telekomunikasi dan informasi, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government
- sektor minyak dan gas bumi, meliputi infrastruktur transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

Sampai dengan tahun 2011, belum ada proyek infrastruktur pada sektor-sektor tersebut di atas yang telah disiapkan oleh Pemerintah bagi pengembangan melalui skema KPS.

According to Presidential Regulation No. 13/2010, there are several other infrastructure sectors that can be developed through PPP scheme, as follows:

- irrigation sector, comprising the infrastructure for the conveyance of raw water
- telecommunications and information sector, for telecommunication networks and e-government infrastructure
- oil and gas sector, comprising infrastructure for oil and gas transmission and distribution.

Up until the year 2011, there have been no infrastructure projects in those sectors that have been prepared by the Government for implementation through PPP scheme.

Membawa Manfaat Nyata bagi Pemangku Kepentingan

Bringing Progress to the stakeholder

Sepanjang tahun 2011, PII melanjutkan proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan penjaminan bagi beberapa proyek infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPS.

Throughout 2011, PII continued the processes needed to realize the guarantees for some infrastructure projects undertaken through the PPP scheme.

Di tahun 2011 PII mencatat sebuah pencapaian penting sejak berdirinya dengan terbitnya regulasi tentang penjaminan pada akhir tahun 2010 yang menjadi landasan yuridis dan operasional bagi PII. Pada tanggal 6 Oktober 2011, PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Bhimasena Power Indonesia dan Perjanjian Regres dengan PT PLN (Persero) untuk proyek KPS PLTU Jawa Tengah yang menjadi proyek pengembangan infrastruktur pertama di Indonesia dalam skema KPS dengan fasilitas penjaminan oleh PII.

The year 2011 marks a milestone achievement by IIGF following its establishment and the issuance of the regulation on infrastructure underwriting at year-end 2010 as its legal and operational basis. On 6 October 2011, IIGF signed the Guarantee Agreement and the Recourse Agreement for the Central Java Coal-Fired Power Plant PPP project, representing the first infrastructure project in Indonesia to be developed in the PPP scheme with guarantee facility from IIGF.

Memfasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur Facilitating Infrastructure Development Program

Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan salah satu proyek infrastruktur yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang dicanangkan oleh Pemerintah RI pada tahun 2011. Sebelum itu, pada tahun 2006, Pemerintah juga telah menetapkan proyek PLTU Jawa Tengah sebagai salah satu model proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan melalui skema KPS, menyusul keluarnya Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

The Central Java Coal-Fired Power Plant PPP project is one of infrastructure projects included in the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) introduced by the Government in 2011. Prior to this, in 2006, the Government had also earmarked the Central Java Power Plant project as one of several infrastructure projects to be developed in the PPP scheme, following the issuance of Presidential Regulation No. 67/2005 on Government Partnership with Private Entity in Infrastructure Development.



Penandatanganan dokumen proyek PLTU Jawa Tengah membuktikan bahwa skema KPS yang didasarkan pada proses yang adil, terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel dapat dilakukan di Indonesia. Ke depan, terwujudnya proyek-proyek lain melalui skema KPS akan berdampak positif terhadap program pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah, khususnya terkait dengan keterbatasan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setelah beroperasi nanti, proyek PLTU Jawa Tengah akan memberikan tambahan yang substansial terhadap kapasitas produksi listrik oleh *Independent Power Producer* (IPP) yang menjual listrik kepada PT PLN sebagai operator sistem transmisi dan distribusi listrik di Indonesia. Selain itu, adanya fasilitas penjaminan dari PII juga membuat struktur pendanaan yang lebih ekonomis dalam pembangunan proyek PLTU Jawa Tengah, yang berdampak pada harga jual listrik yang lebih rendah kepada PLN. Pada gilirannya, hal ini akan berdampak pada penurunan biaya pokok produksi PLN dan juga subsidi Pemerintah kepada PLN.

The signing of the documents for the Central Java Power Plant project proves the viability of the PPP scheme in Indonesia with clear, competitive, transparent and accountable processes. Going forward, the application of the PPP scheme in other projects is expected to facilitate the Government's infrastructure development program, particularly in view of the limited funding available from the State Budget (APBN).

After it becomes operational, the Central Java Coal-Fired Power Plant will add a substantial electricity production capacity from the respective Independent Power Producer (IPP) for sale to the State Power Company, PLN, as the operator of electricity transmission and distribution system in Indonesia. In addition, IIGF's guarantee facility has also enabled a more economic financing structure for the development of the Central Java Power Plant project, resulting in a relatively lower electricity sales price to PLN. In turn, this will ultimately impact on lower cost of production for PLN and lower Government subsidy to PLN.



Membuka Peluang Investasi

Creating Investment Opportunities

Dari sisi investor swasta, ketidakpastian aspek hukum dan perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu faktor negatif yang mempengaruhi perhitungan risiko untuk berinvestasi pada sebuah proyek infrastruktur. Selain itu, proyek-proyek KPS infrastruktur umumnya memerlukan investasi awal dalam jumlah yang besar, namun membutuhkan waktu lama untuk pengembalian investasi. Akibatnya, calon investor sering menemui kesulitan untuk memperoleh dukungan pendanaan dari bank-bank di Indonesia yang tidak terbiasa memberikan pembiayaan jangka-panjang sebagaimana yang diperlukan.

Dengan kondisi tersebut di atas, fasilitas penjaminan dari PII merupakan faktor krusial untuk terwujudnya proyek PLTU Jawa Tengah pada tahun 2011. PT Bhimasena Power Indonesia (lihat box) sebagai pihak swasta pelaksana proyek PLTU Jawa Tengah memperoleh penjaminan dari PII atas kewajiban-kewajiban finansial tertentu dari PLN, antara lain terkait dengan kelangsungan pembelian listrik oleh PLN.

For prospective private investors, the uncertain legal and regulatory environment prevalent in Indonesia presents a negative factor into the risk calculation and decision to invest in infrastructure projects. In addition, an infrastructure project generally requires large amounts of up-front capital, while taking a long time before it begins to generate revenues. As a result, potential investors often find it difficult to obtain funding from domestic lenders who are mostly unaccustomed to provide the necessary long-term financing facilities.

In such condition, the availability of a guarantee facility from IIGF represents a crucial element for the successful deal of the Central Java Power Plant project in 2011. PT Bhimasena Power Indonesia (see box) as the private partner and developer of the Central Java Power Plant project has secured a guarantee from IIGF covering certain financial obligations on the part of PLN, such as the continuity of power purchase by PLN.

Memberi Manfaat Nyata bagi Komunitas

Providing Tangible Benefits to Communities

Menyusul penandatanganan Perjanjian Penjaminan proyek PLTU Jawa Tengah di tahun 2011, tahap *Financial Close* diharapkan dapat terlaksana pada bulan Oktober 2012, dan pembangunan fisik fasilitas PLTU Jawa Tengah kemudian dapat segera dimulai. Pembangunan PLTU Jawa Tengah diperkirakan akan memberikan peluang lapangan kerja bagi sedikitnya ribuan orang penduduk setempat selama jangka waktu konstruksi sekitar empat tahun sampai operasi komersil pertama di tahun 2016 dan operasi komersil kedua di tahun 2017. Selain lapangan kerja langsung di proyek pembangunan, penduduk lokal di sekitar lokasi proyek juga akan memperoleh kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas produktif dalam memenuhi kebutuhan proyek konstruksi maupun kebutuhan pekerja yang terlibat di dalamnya.

Following the signing of the Guarantee Agreement for the Central Java Power Plant project in 2011, the Financial Close transaction is expected to be carried out by October 2012, to be followed by physical construction of the power plant. The construction of the Central Java Power Plant is expected to result in thousands of job opportunities for people in the surrounding communities during the approximately four-year construction time until the first stage commercial operation in 2016 and the second stage commercial operation in 2017. Aside from job opportunities at construction sites, the local people will also be able to engage in a variety of productive activities in supplying the needs of the construction projects and of the workers at the construction sites.





Proyek PLTU Jawa Tengah

PLTU Jawa Tengah merupakan fasilitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas 2.000 MW yang akan dibangun di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU Jawa Tengah terdiri dari dua unit pembangkit berkapasitas masing-masing 1.000 MW - kapasitas unit terbesar di Indonesia sampai saat ini - yang menggunakan teknologi ultra supercritical *boiler* untuk pembangkitan uap. Penggunaan teknologi maju tersebut memungkinkan efisiensi lebih tinggi sehingga dapat menghemat pemakaian batu bara sebagai bahan bakar, selain juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan PLTU konvensional yang ada di Indonesia saat ini. Dengan perkiraan operasi komersil mulai akhir tahun 2016, pembangunan PLTU Jawa Tengah dilaksanakan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) dengan skema *Built-Own-Operate-Transfer* (BOOT) dalam masa konsesi 25 tahun. BPI merupakan konsorsium dari PT Adaro Power, anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk, perusahaan penambangan batu bara dari Indonesia, serta dua perusahaan konstruksi Jepang yaitu J-Power dan Itochu Corporation, yang akan mendanai proyek senilai lebih dari US\$ 3 miliar tersebut dengan dukungan pendanaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Central Java Power Plant Project

The Central Java Power Plant is a coal-fired power plant with a total generating capacity of 2,000 MW to be built in Batang Regency, Central Java. The facility will consist of two generating units each of 1,000 MW capacity - the largest single unit capacity in Indonesia to date - that utilizes the ultra supercritical boiler technology to generate steam. The use of this advanced technology allows for much higher boiler efficiencies resulting in lower consumption of coal used as the heat source for the boilers, while also reducing the negative impact to the environment due to lower carbon emissions compared with existing conventional coal-fired power plants in Indonesia today. With a scheduled commercial operation by year-end 2016, construction of the Central Java Power Plant will be undertaken by PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) in a Built-Own-Operate-Transfer (BOOT) scheme with a 25-year concession period. BPI - a consortium of PT Adaro Power, a subsidiary of PT Adaro Energy Tbk, a coal mining company in Indonesia, and two Japanese companies, J-Power and Itochu Corporation - will finance more than US\$ 3 billion construction project with funding support mostly from the Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Pre-Appraisal Work

Pre-Appraisal Work

Dalam urutan tahapan proses pemberian jaminan bagi suatu proyek KPS, terdapat tahap penyaringan dimana PII mengevaluasi Formulir Penyaringan (*Screening Form*) yang disampaikan oleh PJPK bersangkutan. Evaluasi dilakukan terhadap beberapa kriteria berdasarkan ketentuan yang ada, antara lain kelengkapan dokumentasi proyek. Cukup sering terjadi, kesiapan dokumentasi proyek atau keterbatasan kapasitas PJPK menyebabkan proyek bersangkutan tidak lolos dari proses penyaringan PII. Kondisi seperti ini merupakan pemborosan sumber daya, selain menyebabkan berkurangnya potensi bisnis PII dan pada akhirnya, keterlambatan atau penundaan realisasi proyek-proyek KPS infrastruktur.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengupayakan agar PII dapat terlibat lebih dini dalam penyiapan proyek KPS yang dilakukan oleh PJPK. Untuk itu, PII pada tahun 2011 membentuk fungsi *Pre-Appraisal Works* (PAW) atau *Transaction and Guarantee Advisory* (TGA) dalam organisasinya. Proses-proses PAW dilakukan oleh PII bagi proyek-proyek yang menunjukkan indikasi awal cukup layak secara ekonomi, finansial dan teknis, serta proses persiapannya telah 'setengah jadi' atau bukan dari nol.

Dalam lingkup PAW, PII menyediakan dukungan kepada PJPK ataupun melakukan kajian pada aspek-aspek berikut:

- *Pre-Feasibility Study* (struktur KPS, *demand survey*, *legal due diligence*, serta kelayakan teknis, finansial, ekonomi, lingkungan dan sosial)
- Perhitungan kebutuhan dukungan Pemerintah
- Analisa kebutuhan Penjaminan
- Alokasi risiko
- Perjanjian KPS
- *Project management plan*
- *Market feedback*

Proses-proses PAW umumnya menyangkut keterlibatan pihak ketiga sebagai konsultan teknik, konsultan finansial/transaksi maupun konsultan hukum.

Melalui aktivitas PAW, PII dapat meningkatkan kepastian dan kontinuitas proses menuju penjaminan, sekaligus memastikan bahwa proyek telah disiapkan dan distruktur dengan baik sehingga mengurangi risiko klaim penjaminan di kemudian hari.

One of the processing stages in the guarantee provision for a PPP project is the Screening Stage where IIGF will evaluate the Screening Form submitted by the respective CA. The evaluation is based on a set of established criteria that include, among others, the completeness of project documentation. Here, it is possible that the project proposal will fail the screening stage due to inadequate project documentation readiness or capacity, skills or knowledge of the respective CA. In addition to being a waste of resources, this reduces IIGF's business potential and, ultimately, may result in delays or the postponement of PPP infrastructure projects delivery.

One way to get around that problem is through a much earlier involvement of IIGF in the preparation processes of the PPP project conducted by the CA. It is for this purpose that IIGF established the Pre-Appraisal Works (PAW) or Transaction and Guarantee Advisory (TGA) function in its organization in 2011. IIGF will undertake pre-appraisal work processes for projects with initial indications of commercial, financial and technical feasibility, and the preparatory process is already 'half-done', or not from square one.

Within the scope of PAW, IIGF will provide support for CAs by conducting reviews on the following issues:

- Pre-Feasibility Study (PPP structure, demand survey, legal due diligence, and technical, financial, commercial, environmental and social feasibility)
- Calculation of the needs for Government support
- Guarantee requirement analysis
- Alokasi risiko
- PPP agreement
- Project management plan
- Market feedback

The processes in PAW usually require the involvement of third parties as technical consultants, financial/transaction consultants or legal consultants.

Through PAW activities, IIGF intends to improve process continuity towards guarantee provision, while also ensuring that the respective projects have been well prepared and structured so as to reduce the risk of guarantee claims in the future.

Proyek dalam Proses

Projects in the Pipeline

Sepanjang tahun 2011, PII juga terus melanjutkan proses yang diperlukan untuk mewujudkan penjaminan bagi pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan melalui skema KPS. Kemajuan aktivitas PII dalam proyek-proyek tersebut sampai dengan akhir tahun 2011 disajikan pada tabel berikut.

No	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Estimasi Nilai Proyek (Rp Miliar) Estimated Project Value (Rp Billion)	
1	Proyek Air Minum - Way Sekampung Water Supply System - Way Sekampung	Penyediaan air minum dengan kapasitas 500 liter/detik untuk 8 kecamatan di Bandar Lampung. Water supply system with capacity of 500 liter/second, serving 8 districts in Bandar Lampung.	800	
2	PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 (2 x 600 MW) Coal-fired Mine Mouth Power Plant Sumsel 9 (2 x 600 MW)	Pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas 2 x 600 MW di area mulut tambang batu bara, Sumatera Selatan. Coal-fired power plant with a capacity of 2 x 600 MW sited at coal mine mouth, South Sumatera.	16,200	
3	PLTU Mulut Tambang Sumsel 10 (1 x 600 MW) Coal-fired Mine Mouth Power Plant Sumsel 10 (1 x 600 MW)	Pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas 600 MW di area mulut tambang batu bara, Sumatera Selatan. Coal-fired power plant with a capacity of 600 MW sited at coal mine mouth, South Sumatera.	8,100	
4	Kereta Api Batu Bara, Kalimantan Tengah Coal Railway, Central Kalimantan	Pembangunan rel kereta api pengangkut batu bara sepanjang ± 200 Km yang menghubungkan Puruk Cahu - Bangkuang. Construction of ± 200 Km railway line for coal transportation between Puruk Cahu - Bangkuang.	22,000	
5	Akses Tol Tanjung Priok + W1, W2 Tanjung Priok Access Toll Road + W1, W2	Pembangunan jalan akses sepanjang 16,67 km ke pelabuhan Tanjung Priok, yang menghubungkan bagian timur laut dari JORR dengan jalan pelabuhan Jakarta. Construction of a 16.67 km access road to Tanjung Priok port, connecting the north-east section of the JORR with the Jakarta port road.	6,000	
6	Proyek Air Minum - Kota Semarang bagian Barat Water Supply System - West Semarang	Penyediaan air minum dengan kapasitas 1.050 liter/detik untuk kota Semarang bagian Barat. Water supply system with capacity of 1,050 liter/second, serving West Semarang.	825	
7	Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi Toll Road	Pembangunan dan pengelolaan jalan tol sekitar 60 km dari kota Medan - Bandara Kualanamu - Tebing Tinggi. Construction and operations of approximately 60 km of toll road onnecting Medan - Kualanamu Airport - Tebing Tinggi.	4,700	
8	Proyek Air Minum - Umbulan Water Supply System - Umbulan	Penyaluran air curah 4.000 liter/detik dari Kabupaten Pasuruan ke 5 Pemda Jawa Timur. Supply of 4,000 liter/second of raw water from Pasuruan Regency to 5 local governments in East Java.	3,500	

Throughout 2011, IIGF continued with the various process stages that are necessary towards the provision of guarantee facilities for a number of PPP infrastructure projects. These projects, and their progress status as at year-end 2011, are presented in the following table.

Status Status	Rencana Tindak Lanjut dari PII IIGF Follow-up
Sedang melaksanakan Pra-Kualifikasi (PQ) untuk menetapkan shortlisted bidders. Pre-Qualification (PQ) process to determine shortlisted bidders.	Secara paralel sedang menyusun Guarantee Application Package termasuk Implementation Plan. In parallel, development of Guarantee Application Package including Implementation Plan.
Draft Pre-FS telah disusun oleh PLN dan akan di review oleh konsultan. The Pre-FS draft has been prepared by PLN and will be reviewed by consultant.	Koordinasi dengan para pemangku kepentingan (PLN, Bappenas dan PII) untuk menyusun final Pre-FS dan dokumen transaksi. Coordination with respective stakeholders (PLN, Bappenas and IIGF) to develop final Pre-FS and project transaction document.
Draft Pre-FS telah disusun oleh PLN dan akan di review oleh JICA. The Pre-FS draft has been prepared by PLN and will be reviewed by JICA .	Koordinasi dengan para pemangku kepentingan (PLN, Bappenas dan JICA) untuk menyusun final Pre-FS dan dokumen transaksi. Coordination with respective stakeholders (PLN, Bappenas and JICA) to develop final Pre-FS and project transaction document.
Telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyiapan Perjanjian Proyek antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PII. Signing of Agreement of Cooperation for Project Guarantee Preparation between the Provincial Government of Central Kalimantan and IIGF.	Pelaksanaan Pre-Appraisal Works sebagai bantuan untuk menyusun CTA, amandemen RfP, GA dan RA. Conducting Pre-Appraisal Works in support of the development of CTA, RfP amendment, GA and RA.
Screening Form telah diserahkan oleh BPJT kepada PII. The Screening Form has been submitted by BPJT to IIGF.	BPJT perlu melengkapi dokumen sebagai syarat kelengkapan GAP serta pelaksanaan Pre-Appraisal Works. BPJT needs to complete project documentation as pre-requisite for GAP and Pre-Appraisal Works .
Melakukan market survey untuk menyusun draft Pre-FS. Conducting a market survey to develop the Pre-FS draft.	Menyusun Pre-FS dan dokumen transaksi untuk proses penjaminan. Developing Pre-FS and transaction document for guarantee process.
Kajian teknis terhadap proyek telah dilakukan. Conducting technical review on the project.	Pelaksanaan Pre-Appraisal works sebagai bantuan untuk persiapan dan kelengkapan proyek. Implementation of Pre-Appraisal Works in support of project preparation and completion.
PII telah menerbitkan Surat Konfirmasi Kelanjutan Proyek dan PT SMI/IFC melakukan penyempurnaan Pre-FS. IIGF has issued Confirmation to Proceed and PT SMI/IFC conducted Pre-FS improvements.	Koordinasi dengan PT SMI/IFC untuk penyiapan kelengkapan dokumen Usulan Penjaminan (Guarantee Application Package/GAP). Coordination with PT SMI/IFC in preparing the GAP documentation.

Menciptakan Nilai untuk Kemajuan di Masa Depan

Creating Value for Future Progress

PII senantiasa berupaya meningkatkan kapabilitasnya sebagai penyedia penjaminan proyek KPS infrastruktur antara lain melalui pengembangan perangkat formal kebijakan dan prosedur operasi perusahaan di berbagai aspek aktivitas organisasinya.

PII continuously improves its capabilities as guarantees provider for PPP infrastructure projects by means of among others establishing formal policies and operational procedures in a wide range of organizational activities.

Strengthening Our Guarantee Capacity

Strengthening Our Guarantee Capacity

Kapasitas PII untuk melakukan penjaminan proyek-proyek infrastruktur masih sepenuhnya mengandalkan ekuitas perusahaan, berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disetor penuh dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sampai dengan akhir tahun 2011, Pemerintah telah melakukan penyetoran dana total sebesar Rp 3,5 triliun sebagai PMN di PII. Tambahan penyertaan modal terakhir dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 1,5 triliun, yang bersumber dari APBN 2011.

Penambahan PMN sebesar Rp 1,5 triliun di akhir tahun 2011 secara efektif memungkinkan PII untuk menjamin lebih banyak proyek KPS infrastruktur dalam beberapa tahun mendatang.

Penambahan PMN tersebut merupakan implementasi rencana Pemerintah bagi pemenuhan modal dasar untuk mengoptimalkan fungsi PII, dan sekaligus menunjukkan konsistensi

At present, IIGF's capacity to underwrite infrastructure projects relies entirely on its fully paid-in capital, in the form of State Capital Injection (PMN) derived from the Indonesian State Budget (APBN). Up until year-end 2011, the Government of Indonesia has remitted a total amount of Rp 3.5 trillion as PMN at IIGF. The latest PMN addition was made on 30 December 2011 in the amount of Rp 1.5 trillion, taken from the 2011 State Budget.

The additional PMN placement of Rp 1.5 trillion at the end of 2011 effectively enables IIGF to underwrite a greater number of PPP infrastructure projects for several years ahead.

The increase of PMN is in line with the Government's plans to optimize the function of IIGF by providing the full amount of its authorized capital, and also reflects the Government's policies





kebijakan dan komitmen Pemerintah terhadap percepatan pembangunan infrastruktur melalui implementasi KPS. Di sisi lain, penambahan PMN tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi di proyek KPS infrastruktur, dan meningkatkan leverage PII untuk memperoleh fasilitas penjaminan bersama (*co-guarantee*), terutama dengan lembaga multilateral.

PII juga dapat menempuh opsi penjaminan bersama (*co-guarantee*) untuk mengatasi keterbatasan kapasitas penjaminan proyek. Struktur ini dapat dilakukan dengan pihak *co-guarantor* seperti lembaga-lembaga pembangunan multilateral, institusi keuangan internasional, atau Pemerintah Republik Indonesia. Meskipun penjaminan proyek dilakukan melalui struktur penjaminan bersama, proses penjaminan termasuk evaluasi proyek/ *appraisal* tetap dilakukan oleh PII sesuai dengan Kebijakan Satu Pelaksana (*Single Window Policy*).

and commitment to accelerate infrastructure development through the implementation of the PPP scheme. At the same time, the addition of PMN is expected to bolster the confidence on the part of the private sector to invest in PPP infrastructure projects, while providing more leverage for IIGF in obtaining co-guarantee facilities especially from multilateral institutions.

To increase its capacity in project underwriting, IIGF also have the option to engage in co-guarantee schemes. These can be implemented in cooperation with a variety of project co-guarantors such as multilateral development institutions, international financial institutions, or the Government of Indonesia. While project underwriting may be conducted through a co-guarantee structure, IIGF will conduct the guarantee process including project appraisal, in accordance with the Single Window Policy.



Saat ini PII sedang melakukan finalisasi fasilitas penjaminan senilai US\$ 480 juta dari World Bank.

Meningkatkan Kelayakan Proyek untuk Penjaminan

Konsep KPS merupakan suatu struktur yang kompleks dalam implementasinya. Pengalaman praktis sejak tahun 2010 dalam memproses proyek-proyek KPS infrastruktur untuk kelayakan penjaminan menunjukkan bahwa potensi bisnis penjaminan PII masih belum optimal, terutama karena faktor-faktor yang berada di luar kendali PII. Selain keterbatasan kapasitas penjaminan dan kesulitan pengadaan lahan, kendala eksternal yang sering dijumpai adalah ketidaksiapan di pihak pemilik proyek (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/PJPK).

Untuk mendukung efektivitas implementasi skema KPS pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur, PII juga terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dan edukasi mengenai KPS. Sosialisasi dan edukasi KPS ditujukan untuk kepentingan berbagai kalangan pemangku kepentingan termasuk kalangan PJPK (Pemerintah Daerah/Kota, BUMN) serta instansi dan lembaga Pemerintah yang terkait dengan proses-proses KPS.

At present, IIGF is finalizing the process for US\$ 480 million worth of guarantee facilities from the World Bank.

Enhancing Project Viability for Guarantee

Implementing the PPP structure is a complex undertaking. Practical experience gained since 2010 in processing a variety of PPP infrastructure projects for the guarantee provision has shown that IIGF business potential for project underwriting is not yet optimum, due mostly to external factors beyond the control of IIGF. Aside from limited guarantee capacity and problems in land acquisition, another prevalent external issue concerns the low level of preparedness on the part of project owners (Contracting Agency/CA).

In support of more effective implementation of the PPP scheme in the development of infrastructure projects, IIGF continues to engage in education and socialization initiatives on the concept of PPP. These initiatives are directed for the benefit of a various stakeholders, including CAs (Regional/Municipal Government, State-Owned Enterprises) and various Government agencies and bodies that are relevant in the PPP process.



Pada tahun 2011, PII telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dan edukasi KPS dan penjaminan infrastruktur, antara lain:

- Workshop “Acuan Kategori dan Distribusi Risiko Infrastruktur Proyek KPS Infrastruktur” di Bali pada tanggal 25 – 26 Februari 2011 yang diikuti oleh PJPK, Konsultan Hukum, Teknik dan Keuangan, Lembaga Keuangan seperti World Bank dan ADB, serta Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait.
- Executive Workshop Public-Private Partnership (PPP) tanggal 3 – 5 Maret 2011 bertempat di Melbourne dan Sydney, Australia, bekerjasama dengan University of New South Wales (UNSW), Australia yang diikuti oleh para pemangku kepentingan dari beberapa Kementerian.
- Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2011 tanggal 11–13 April di JCC Jakarta. PII menyelenggarakan serangkaian edukasi dan *business gathering* untuk para pemangku kepentingan seperti PJPK, bank dan lembaga keuangan, investor, konsultan, media massa, kalangan akademis dan masyarakat umum.
- Workshop dan diskusi tentang “PPP Infrastructure – the Canadian Model Experience” pada tanggal 6 Juni 2011 di Jakarta bekerjasama dengan pihak Kedutaan Besar Kanada dan Davis, LLP.
- Workshop bertajuk “Political Risk Guarantee and Insurance in Infrastructure PPP Projects” pada tanggal 8-9 Juni 2011 yang menghadirkan pakar sekaligus praktisi bidang *Political Risk Insurance*.

Throughout 2011, IIGF engaged in a number of education and socialization initiatives on PPP and infrastructure underwriting, including:

- Workshop on ‘Reference for Risk Category and Distribution in PPP Infrastructure Projects’ held in Bali on 25-26 February 2011, attended by CAs, various legal, technical and financial consultants, financial institutions such as the World Bank and the ADB, as well as relevant Government ministries and agencies.
- Executive Workshop on Public Private Partnership (PPP) held in Melbourne and Sydney, Australia, on 3-5 March 2011, in cooperation with the University of New South Wales, Australia, and attended by stakeholders from various Government ministries.
- Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2011 on 11–13 April at JCC, Jakarta. IIGF organized a series of education and business gathering events for stakeholders that included CAs, banks and financial institutions, investors, consultants, mass media, academicians and the general public.
- Workshop and discussions on ‘PPP Infrastructure - the Canadian Model Experience’ on 6 June 2011 in Jakarta organized by IIGF in cooperation with the Canadian Embassy and Davis, LLP.
- Workshop on ‘Political Risk Guarantee and Insurance in Infrastructure PPP Projects’ on 8-9 June 2011, featuring various experts and practitioners in Political Risk Insurance.



- Workshop “Canadian PPP Best Practice for Benchmarking” pada tanggal 27-29 Oktober 2011 di Bali, diikuti oleh partisipan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) dan Biro Hukum Kementerian Keuangan.
- Workshop “Pengadaan Proyek Infrastruktur - Pembelajaran dari Proyek PLTU Jawa Tengah” pada tanggal 21-23 Desember 2011 di Bandung, yang diikuti oleh para PJK proyek SPAM Umbulan, SPAM Semarang Barat, SPAM Bandar Lampung dan Badan Pengelola Jalan Tol.

PJI juga melakukan sosialisasi dan promosi mengenai KPS untuk kalangan pemangku kepentingan yang lebih luas selain yang terlibat langsung dalam proses-proses KPS infrastruktur. Upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2011 antara lain adalah:

- Penyelenggaraan acara Media Gathering pada tanggal 13 Oktober 2011 di Jakarta, untuk memberi edukasi mengenai PJI dan sekaligus menjalin hubungan baik dengan pihak media.
- Menjadi narasumber dan moderator pada acara Indonesia Infrastructure - Tollroad Stakeholders Forum di Jakarta tanggal 23-24 November 2011, dimana PJI memberikan pandangan mengenai KPS bidang jalan tol dan struktur penjaminan proyek.

- Workshop on ‘Canadian PPP Best Practice for Benchmarking’ on 27-29 October 2011 in Bali, attended by participants from the Directorate General of Debt Management (DJPU), Center for Fiscal Risk Management (PPRF) and the Legal Bureau of the Ministry of Finance.
- Workshop on “Procurement of Infrastructure Projects - Lessons from the Central Java Power Plant Project” on 21-23 December 2011 in Bandung, attended by the respective CAs of Umbulan Potable Water Project, West Semarang Potable Water Project, Bandar Lampung Potable Water Project, and Toll Road Management Companies.

IIGF also engaged in socialization and promotion initiatives on PPP for the benefit of a wider audience other than those stakeholders that are directly involved in the various PPP infrastructure processes. In 2011, these initiatives included:

- Organizing a Media Gathering event on 13 October 2011 in Jakarta in order to provide education on IIGF and maintain a cordial relationship with the mass media.
- Speaker and moderator in the Indonesia Infrastructure – Tollroad Stakeholders Forum in Jakarta on 23-24 November 2011, where IIGF shared its views on PPP toll road projects and the structuring of project guarantee.



- Menjadi salah satu pembicara pada Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis Ketenagalistrikan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung pada tanggal 8-10 November 2011.
- Menjadi pembicara dalam acara Asia Finance Risk Mitigation Forum yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank (ADB) tanggal 2 Desember 2011 di Singapura.

Meningkatkan Proses-Proses Internal

PII terus berupaya meningkatkan kapabilitasnya sebagai penyedia fasilitas penjaminan proyek infrastruktur KPS melalui pengembangan perangkat formal kebijakan dan prosedur operasi perusahaan di berbagai aspek organisasinya. Pengembangan perangkat kebijakan dan prosedur tersebut juga dilakukan dalam rangka meningkatkan standar tata kelola (*governance*), konsistensi dan transparansi dalam proses pemberian penjaminan sesuai dengan praktik internasional terbaik.

Beberapa dokumen kebijakan formal dan panduan operasional perusahaan yang telah diselesaikan pada tahun 2011 antara lain adalah:

- Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur
- Acuan Alokasi Risiko
- Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sosial
- Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Dana
- Prosedur Operasi Standar bagi Audit Internal
- Kebijakan Harga (Pricing)

- IIGF was one of the speakers in the National Seminar on Electricity Technology and Business organized by Institut Teknologi Bandung on 8-10 November 2011.
- IIGF was one of the speakers in the Asia Finance Risk Mitigation Forum organized by the Asian Development Bank (ADB) in Singapore on 2 December 2011.

Improving Internal Processes

IIGF continues to strive to improve its capabilities as a provider of guarantee facilities for PPP infrastructure projects through the continuing development of formal Company policies and operational procedures for a variety of organizational activities. The development of formal company policies and procedures is also intended to improve the standards for governance, consistency and transparency in guarantee provision processes according to international best practice.

A number of formal documents on Company policies and operational procedures have been completed in 2011, including:

- Guidelines of Provision of Infrastructure Guarantee
- Risk Allocation Guidelines
- Framework of Social and Environment Management
- Policies and Procedures for Fund Management
- Standard Operating procedures for Internal Audit

- Penyempurnaan terhadap dokumen Panduan Operasional
- Kerangka Pengelolaan Risiko
- Kerangka Penilaian Klaim.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia

Setelah dua tahun beroperasi, PII kini memiliki kelengkapan struktur organisasi maupun kapasitas Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif sebagai penyedia penjaminan proyek infrastruktur KPS.

- Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
PII terus mengembangkan dan menyempurnakan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan SDM perusahaan. Kelengkapan kebijakan di bidang SDM tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja dimana karyawan dapat bekerja secara produktif dan termotivasi untuk mencapai hasil yang terbaik.
- Rekrutmen Karyawan
Pada tahun 2011, struktur organisasi PII telah dikembangkan dan mencakup seluruh fungsi yang dibutuhkan. Sesuai dengan perkembangan dan peningkatan kegiatan operasional sejak tahun 2010, misalnya, PII telah membentuk fungsi baru yaitu *Pre-Appraisal Works* (PAW) serta melakukan perubahan struktur kerja di beberapa fungsi yang lain.

Pada saat bersamaan, PII juga telah melengkapi kebutuhan personil di tiap-tiap fungsi, sehingga kegiatan organisasi dan operasional dapat berlangsung dengan lebih optimal. PII juga merekrut tenaga-tenaga profesional berpengalaman untuk berbagai posisi dan fungsi kerja yang dibutuhkan. Selain aspek profesionalisme, rekrutmen dilakukan dengan prinsip kesetaraan kesempatan, tanpa membedakan gender, ras dan suku ataupun agama.

- Pricing Policies
- Improvements on the Operation Manual document
- Risk Management Framework
- Claim Assessment Framework.

Growing Our Human Resources

After two full years in operations, IIGF has developed the organizational structure and human resources capacity that are needed to effectively operate as a provider of guarantee facilities for PPP infrastructure projects.

- Policies on Human Resources Management
IIGF continues to develop and enhance various Company policies on human resources management. The availability of the various policies is expected to result in the creation of a work environment that promotes employee productivity as well as the motivation to excel in work.
- Employee Recruitment
In 2011, IIGF's organizational structure has been fully developed to comprise of all the necessary functions. In line with ongoing developments as well as the increase in operational activities since 2010, IIGF has seen fit to establish a new function, the Pre-Appraisal Works (PAW) unit, and to re-arrange the work structure in a number of other functions.

At the same time, IIGF has also completed the personnel requirement in each function, enabling more optimum operational and organizational activities. To do this, IIGF recruited experienced professionals to fill certain positions or functions as needed. Other than professionalism, IIGF observes equal opportunity employment in personnel recruitment without discrimination in terms of gender, race, ethnicity or religion.

Pada akhir tahun 2011, jumlah karyawan tetap (selain Komisaris dan Direksi) dan karyawan kontrak di PII tercatat sebanyak 21 orang dan 9 orang, atau naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 12 orang karyawan tetap dan tidak ada karyawan kontrak.

As at year-end 2011, there are 21 permanent employees at IIGF (other than Commissioners and Directors) and 9 contracted employees, representing a considerable increase from a year earlier of just 12 permanent employees and there were no contracted employees.

- **Pengembangan Kompetensi Karyawan**
Sebagai suatu organisasi yang relatif baru berdiri, dan terutama mengingat sifat unik bidang usaha yang dijalankan, pengembangan kompetensi inti karyawan di bidang penjaminan dan risiko terkait konsep KPS masih menjadi salah satu fokus strategis PII di tahun 2011. Hal ini juga menjadi penting mengingat komitmen PII untuk mengembangkan dan menerapkan standar serta praktik internasional terbaik dalam aktivitas operasionalnya.

- **Development of Employee Competence**
As a relatively new organization, and especially considering the unique nature of its business activities, the development of employee core competencies in underwriting and risk related to the PPP concept remained one of IIGF's strategic focuses in 2011. This is also important in view of its commitment to develop and implement international best practice and standards in its operational activities.

Upaya pengembangan kompetensi karyawan dilakukan terutama dengan mengikutsertakan karyawan pada berbagai seminar dan lokakarya mengenai KPS dan aspek-aspek kerjanya dengan nara sumber profesional yang berkompeten, baik di dalam maupun di luar negeri.

Development of employee competencies is undertaken mostly by sending employees to participate in a variety of workshops and seminars, domestic as well as overseas, featuring competent professionals on PPP and its various working mechanisms as speakers.

No	Topik Pelatihan	Frekuensi (x pelatihan)
1	Public Private Partnership	4
2	Risk Allocation and ERM	7
3	Finance and Accounting	6
4	Procurement	2
5	GA and IT	6
6	Others	8

Pada tahun 2011, total biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan tercatat sebesar Rp 1,4 miliar dan US\$ 162.000.

In 2011, total expenses incurred for employee training and education amounted to Rp 1.4 billion and US\$ 162,000.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“Perusahaan”) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan penjaminan bagi pengembangan proyek infrastruktur dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (“the Company”) is a State-Owned Enterprise (SOE) engaged in the provision of guarantee facilities for infrastructure development projects in the Public Private Partnership (PPP) scheme.

Perusahaan memperoleh pendapatan usaha dari aktivitas penjaminan dan pengelolaan dana. Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi (*guarantee fee dan processing fee*) serta pendapatan provisi dan komisi terkait dengan proses penjaminan (*arranging fee, ceded commissions, dan provisi dan komisi lain-lain*). Pendapatan dari pengelolaan dana diperoleh dari penempatan aset keuangan Perusahaan pada berbagai instrumen investasi keuangan seperti penempatan dana pada deposito berjangka di bank, serta penempatan dana pada portofolio obligasi baik yang tersedia untuk dijual maupun untuk dimiliki hingga jatuh tempo.

Beban usaha Perusahaan terdiri dari beban penjaminan, administrasi dan umum, serta pengembangan terkait dengan komunikasi dan sosialisasi usaha Perusahaan.

The Company generates operating revenues from activities in project guarantee and fund management. Revenues from project guarantee consists of premium revenues (guarantee fees and processing fees) as well as guarantee-related fees and commissions (arranging fees, ceded commissions, and other fees and commissions). Revenues from fund management is derived from placement of the Company’s financial assets on a variety of financial investment instruments such as time deposit placements in banks and portfolio investment in bonds, consisting of available for sale bonds and held to maturity bonds.

The Company’s expenses consist of underwriting expenses, general and administrative expenses, and development expenses related to the communication and socialization of the Company’s business.



Kinerja Keuangan 2011

2011 Financial Performance

Berikut ini adalah analisa dan pembahasan mengenai hasil-hasil operasional dan posisi keuangan Perusahaan pada tahun 2011, yang disajikan berdasarkan Laporan Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Auditor Independen.

The following is an analysis and discussions on the Company's results of operations and financial position for the year 2011, presented on the basis of the Financial Statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) for the years ended 31 December 2011 and 2010 that have been audited by Independent Auditors.

Hasil-Hasil Operasional Results of Operations

(dalam ribuan Rupiah)

	2011	2010
Pendapatan	228.349.244	77.107.079
Beban Operasi	37.218.439	15.067.587
Laba Sebelum Pajak	191.130.805	62.039.492
Laba Bersih	157.141.089	46.597.011

Pendapatan

Perusahaan membukukan total pendapatan sebesar Rp 228,35 miliar pada tahun 2011, naik dari pendapatan sebesar Rp 77,11 miliar pada tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari pengelolaan dana serta adanya perolehan pendapatan dari aktivitas penjaminan.

Revenues

The Company posted total revenues of Rp 228.35 billion in 2011, up from revenues of Rp 77.11 billion in the previous year, mainly due to the increase in revenues from fund management as well as additional revenue stream from guarantee activities.

Pendapatan dari pengelolaan dana tercatat meningkat dari Rp 77,11 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 183,12 miliar pada tahun 2011 yang dikontribusikan dari pendapatan bunga deposito berjangka sebesar Rp 75,66 miliar di tahun 2010 dan Rp 172,03 miliar pada tahun 2011, atau naik sebesar 127% dan pendapatan dari bunga obligasi sebesar Rp 1,45 miliar di tahun 2010 menjadi Rp 11,09 miliar di tahun 2011, atau naik sebesar 87%.

Peningkatan pendapatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan portofolio investasi dalam deposito berjangka dari Rp 1.001,85 miliar pada akhir tahun 2010 menjadi sebesar Rp 3.383,71 miliar pada akhir tahun 2011. Selain itu, Perusahaan juga meningkatkan jumlah portofolio investasi dalam bentuk obligasi dari Rp 30,00 miliar di akhir tahun 2010 menjadi Rp 318,04 di akhir tahun 2011.

Perusahaan pada tahun 2011 juga telah membukukan pendapatan provisi dan komisi terkait aktivitas penjaminan sebesar Rp 45,23 miliar.

Beban Operasi

Beban usaha pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 37,22 miliar, dibandingkan Rp 15,07 miliar pada tahun 2010. Komponen terbesar beban usaha adalah beban administrasi dan umum serta beban penjaminan, yang mewakili berturut-turut 66,2% dan 35,3% dari total beban usaha pada tahun 2011.

Beban administrasi dan umum meningkat sebesar Rp 11,69 miliar dari Rp 12,94 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 24,63 miliar di tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama mencerminkan kenaikan pada beban pegawai sebesar Rp 5,93 miliar seiring dengan penambahan pegawai di tahun 2011; kenaikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 2,23 miliar seiring meningkatnya aktivitas bisnis; dan kenaikan beban sewa sebesar Rp 1,31 miliar karena adanya penambahan sewa ruangan kantor, untuk mengakomodasi peningkatan jumlah pegawai.

Beban penjaminan meningkat sebesar Rp 11,03 miliar dari Rp 2,11 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 13,13 miliar di tahun 2011, sejalan dengan meningkatnya intensitas aktivitas proses penjaminan proyek pada tahun 2011.

Revenues from fund management increased from Rp 77.11 billion in 2010 to Rp 183.12 billion in 2011. The increase was the contribution of a 127% growth in interest income from time deposit placements from Rp 75.66 billion in 2010 to Rp 172.03 billion in 2011, and an 87% growth in income from bonds from Rp 1.45 billion in 2010 to Rp 11.09 billion in 2011.

The increase in revenues from fund management is in line with the growth in portfolio investment in time deposit placements from Rp 1,001.85 billion at year-end 2010 to Rp 3,383.71 billion at year-end 2011. Meanwhile, portfolio investment in bonds also rose from Rp 30.00 billion at year-end 2010 to Rp 318.04 billion at year-end 2011.

In 2011, the Company has also begun to post fees and commissions income from guarantee-related activities amounting to Rp 45.23 billion.

Operating Expenses

Operating expenses in 2011 amounted to Rp 37.22 billion, compared to Rp 15.07 billion in 2010. General and administrative expenses and guarantee expenses accounted for 66.2% and 35.3%, respectively, of total operating expenses in 2011.

General and administrative expenses increased by Rp 11.69 billion to Rp 24.63 billion in 2011, from Rp 12.94 billion in 2010. The increase primarily reflected an increase of Rp 5.93 billion in personnel expenses in line with additional employees recruited in 2011; an increase of Rp 2.23 billion in business travel expenses in line with the increase in business activities; and an increase of Rp 1.31 billion in rent expenses due to the need to rent additional office spaces to accommodate the increase in personnel.

Guarantee expenses grew by Rp 11.03 billion to Rp 13.13 billion in 2011, from Rp 2.11 billion in 2010, in line with the increasing intensity of activities in project guarantee processing in 2011.

Termasuk dalam klasifikasi beban usaha, Perusahaan membukukan penghasilan keuangan sebesar Rp 3,75 miliar pada tahun 2011 dan sebesar Rp 1,17 miliar di tahun 2010. Kenaikan pada penghasilan keuangan terutama disebabkan oleh kenaikan saldo rata-rata pada rekening koran di bank Perusahaan.

Laba Bersih

Perolehan laba bersih tercatat mencapai sebesar Rp 157,14 miliar pada tahun 2011, meningkat lebih tiga kali lipat dari laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 46,60 miliar. Perolehan laba-bersih tersebut mencerminkan tingkat Return on Equity sebesar berturut-turut 7,0% dan 4,2% pada tahun 2011 dan tahun 2010

Posisi Keuangan Financial Position

(dalam ribuan Rupiah)

	2011	2010
Aset	3.738.631.127	2.052.921.455
Kewajiban	34.842.648	6.324.444
Ekuitas	3.703.788.479	2.046.597.011

Aset

Total aset Perusahaan tercatat tumbuh sebesar 82,1% menjadi Rp 3.738,63 miliar di akhir tahun 2011, dari Rp 2.052,92 miliar setahun sebelumnya. Pertumbuhan aset tersebut terutama mencerminkan adanya penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah pada bulan Desember 2011 sebesar Rp 1.500,0 miliar, yang menyebabkan kenaikan pada akun kas dan setara kas serta portofolio investasi Perusahaan.

Kas dan setara kas meningkat menjadi Rp 2.632,39 miliar pada akhir tahun 2011 dari Rp 2.006,0 miliar setahun sebelumnya. Dibandingkan dengan akhir tahun 2010, saldo penempatan deposito berjangka di bank dengan tenor 3-bulan atau kurang pada akhir tahun 2011 tercatat meningkat sebesar Rp 1.621,78 miliar, sementara saldo pada rekening giro di bank tercatat menurun sebesar Rp 995,29 miliar sejalan dengan penempatan dalam portofolio inventasi deposito berjangka dan obligasi selama tahun berjalan.

Portofolio investasi Perusahaan meningkat menjadi Rp 1.078,12 miliar pada akhir tahun 2011 dari Rp 30,0 miliar setahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan dilakukannya penempatan pada deposito berjangka dengan tenor lebih dari 3-bulan sebesar Rp 760,08 miliar, penempatan pada obligasi tersedia untuk dijual sebesar Rp 100,52 miliar, serta penambahan pada obligasi dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp 187,52 miliar.

The Company also posted finance income of Rp 3.75 billion in 2011 and Rp 1.17 billion in 2010, as part of its operating expenses. The increase in financial income was mainly due to the increase in the average balances of the Company's current accounts in banks.

Net Profits

Net profits in 2011 amounted to Rp 157.14 billion, representing an increase of more than three-fold over net profits of Rp 46.60 billion posted in 2010. Net profits posted for the respective years represented Return on Equity of 7.0% and 4.2%, respectively, for 2011 and 2010.

Assets

The Company's total assets rose by 82.1% to reach Rp 3,738.63 billion as at year-end 2011, from Rp 2,052.92 billion a year earlier. The growth in assets was mainly due to additional State Capital Injection by the Government of Rp 1,500.0 billion in December 2011, which were reflected in the increases in the Company's cash and cash equivalent and investment portfolio accounts.

Cash and cash equivalent increased to Rp 2,632.39 billion as at year-end 2011 from Rp 2,006.0 billion a year earlier. Compared to the position at year-end 2010, time deposit placements in banks with a tenor of 3-month or less at year-end 2011 showed an increase of Rp 1,621.78 billion, while current account placements in banks decreased by Rp 995.29 billion, in line with the increase in portfolio investments in time deposit placements and in bonds during the year under review.

The Company's portfolio investments grew to Rp 1,078.12 billion at year-end 2011, from Rp 30.0 billion a year earlier. The increase reflected additional placements of Rp 760.08 billion in time deposit accounts with tenor greater than 3-month; Rp 100.52 billion in available for sale bonds, and Rp 187.52 billion in held to maturity bonds.

Kewajiban

Kewajiban Perusahaan tercatat meningkat dari Rp 6,32 miliar di akhir tahun 2010 menjadi Rp 34,84 miliar pada akhir tahun 2011. Peningkatan kewajiban Perusahaan terutama mencerminkan peningkatan sebesar Rp 22,31 miliar pada akun pendapatan tangguhan, yaitu bagian dari arranging fee proyek PLTU Jawa Tengah (refundable) yang baru dapat dikembalikan dan akan diakui pada saat proyek dimulai (financial close).

Ekuitas

Total ekuitas tercatat sebesar Rp 3.703,79 miliar di akhir tahun 2011, dibandingkan Rp 2.046,60 setahun sebelumnya. Peningkatan ekuitas tersebut mencerminkan kenaikan pada modal disetor akibat penambahan penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp 1.500,0 miliar pada akhir tahun 2011, serta kenaikan pada saldo laba ditahan dari laba bersih tahun 2011.

Rasio-Rasio Keuangan Financial Ratios

Dalam Persen

In Percentage

	2011	2010	
Margin Laba Operasi	82.1%	79.0%	Operating Profit Margin
Margin Laba Bersih	68.8%	60.4%	Net Profit Margin
Return on Equity	7.0%	4.2%	Return on Equity

Liabilities

The Company's total liabilities increased from Rp 6.32 billion at year-end 2010 to Rp 34.84 billion at year-end 2011. The increase in total liabilities mostly reflected an increase of Rp 22.31 billion in the unearned income account, representing part of the arranging fees (refundable) for the Central Java Power Plant project, which will be refunded and recognized as income at the time of financial close of the project.

Shareholders' Equity

Total shareholders' equity amounted to Rp 3,703.79 billion as at year-end 2011, compared to Rp 2,046.60 billion a year earlier. The increase in shareholders' equity reflected the increase in fully paid capital from additional State Capital Injection by the Government of Rp 1,500.0 billion at year-end 2011, as well as the increase in retained earnings from 2011 net profits.

Pengungkapan Lain-lain Other Disclosures

Kapasitas Penjaminan

Besarnya kapasitas penjaminan merupakan faktor penting dalam menentukan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang dapat dijamin oleh Perusahaan, serta kredibilitas Perusahaan dalam menjamin suatu proyek tertentu. Sampai dengan akhir tahun 2011, Perusahaan memiliki kapasitas penjaminan yang berasal dari penyertaan modal oleh Pemerintah sejumlah Rp 3.500 miliar.

Perusahaan menerapkan suatu kebijakan dalam pemberian penjaminan pada proyek KPS, sebagai berikut:

- Untuk proyek < Rp 1 triliun: termasuk risiko Terminasi (komponen ekuitas dan pinjaman) dengan estimasi eksposur = *Total Project Cost*
- Untuk proyek > Rp 1 triliun: di luar risiko Terminasi (komponen pinjaman) dengan estimasi eksposur = *periodical payment* dari komponen *Capital Recovery*

Guarantee Capacity

The amount of guarantee capacity is an important factor that determines how much the Company can provide guarantee facilities to infrastructure projects as well as the Company's credibility in underwriting a certain project. Up to year-end 2011, the Company has a guarantee capacity derived from the Government's equity participation in the Company's fully paid capital of Rp 3,500 billion.

The Company has established a policy for the provision of guarantee facilities to PPP projects, as follows:

- For projects < Rp 1 trillion: including Termination risk (equity and debt components) with estimated exposure = *Total Project Cost*
- For projects > Rp 1 trillion: excluding Termination risk (debt component) with estimated exposure = *periodic payment* of *Capital Recovery* component

- Saldo minimal dari modal Perusahaan dijaga sekitar Rp 200 miliar (di luar nilai penjaminan).

Selain melalui penyertaan modal Pemerintah, Perusahaan juga dapat menambah kapasitas penjaminan yang dimiliki melalui kerja sama fasilitas penjaminan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, MIGA dan Asian Development Bank.

Kebijakan Pengelolaan Dana

Perusahaan mengelola dana yang diperoleh dalam rangka penyertaan modal oleh Pemerintah dengan menempatkannya pada instrumen pasar uang dan pasar modal. Kebijakan pengelolaan dana didasarkan pada prinsip kehati-hatian, melalui strategi investasi pada *core instrument* dan pada *satellite instrument*.

Pada tahun 2011, investasi *core instrument* dilakukan melalui penempatan pada deposito berjangka di bank dengan peringkat (rating) AAA, AA atau setidaknya A sebagai persyaratan minimum. Sementara investasi pada *satellite instrument* dilakukan melalui portofolio surat hutang yaitu obligasi Pemerintah dan obligasi korporat BUMN dan korporat swasta dengan rating minimum AA-, baik untuk tujuan diperdagangkan maupun untuk dimiliki hingga jatuh tempo, sehingga diperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Pada tahun 2011, Perusahaan juga mulai menjajagi kerja sama dengan beberapa perusahaan manajemen investasi untuk penempatan dana pada instrumen reksadana terproteksi.

Total jumlah dana yang dikelola per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar berturut-turut Rp 3.701,75 miliar dan Rp 1.031,85 miliar.

Ikatan yang Material Untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2011, Perusahaan tidak mempunyai ikatan material terkait investasi barang modal.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa

Tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa atau jarang terjadi pada tahun 2011.

- Minimum balance in the Company's capital account is kept at around Rp 200 billion (excluding the value of guarantee facilities).

In addition to State Capital Injection, the Company can also expand its guarantee capacity through co-guarantee cooperation with international financial institution such as the World Bank, MIGA and the Asian Development Bank.

Policies in Fund Management

The Company manages funds derived from the Government's equity participation through placements in money market and capital market instruments. Fund management is undertaken with a prudent investment strategy through placements in core instruments and in satellite instruments.

In 2011, placement in core instruments is undertaken in time deposit accounts with banks possessing AAA, AA or at least A ratings as a minimum requirement. Meanwhile, placement in satellite instruments is undertaken through portfolio investment in Government bonds and corporate bonds issued by SOEs and private sector corporations with a minimum rating of AA-, comprising both available for sale bonds and held to maturity bonds in order to maximize investment returns. In 2011, the Company also initiated preliminary discussion with a number of investment management companies for fund placement in protected mutual fund products.

Total amount of funds under management as at 31 December 2011 and 2010 were Rp 3,701.75 billion and Rp 1,031.85 billion, respectively.

Material Commitments in Capital Expenditures

In 2011, the Company has no material commitments regarding capital expenditures.

Financial Information with Extraordinary Events

There was no financial information about extraordinary events occurring in 2011.

Dampak Perubahan Harga

Tidak ada dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan laba bersih Perusahaan.

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2011.

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembagian dividen ditentukan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan tahun 2011, belum ada kebijakan tertentu mengenai pembagian dividen.

Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang

Perusahaan mengelola dana Penempatan Modal Negara untuk penjaminan dengan menginvestasikan dana-dana tersebut pada instrumen pasar uang dan pasar modal sesuai prinsip kehati-hatian, dengan tujuan untuk memelihara nilai dana, menjaga likuiditas Perusahaan, dan mengoptimalkan imbal-hasil dari dana-dana yang diinvestasikan.

Total jumlah dana yang dikelola per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar berturut-turut Rp 3.701,75 miliar dan Rp 1.031,85 miliar.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2011, tidak terdapat transaksi material oleh Perusahaan yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi dengan Pihak yang Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perusahaan maupun dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan entitas sepengendali sebagai pihak yang berelasi. Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati.

Impact of Price Changes

There was no material impact of any changes in price on the Company's revenues and net income.

Subsequent Events

There are no events of material importance subsequent to the balance sheet date that need to be disclosed in the 2011 Financial Statements.

Dividend Policy

Dividend policy is determined by the shareholders in the General Meeting of Shareholders. Up to 2011, the Company does not have definite policies regarding the distribution of dividends.

Investments, Expansion, Divestment, Acquisition or Debt Restructuring

The Company manages funds derived from State Capital Injection for guarantee purposes by investing those funds in money market and capital market instruments in accordance with prudent principle, with the objective of preserving the value of funds, maintaining the Company's liquidity, and optimizing returns on invested funds.

Total amount of funds under management as at 31 December 2011 and 2010 were Rp 3,701.75 billion and Rp 1,031.85 billion, respectively.

Material Transactions with Conflict of Interest

Throughout 2011, the Company did not engage in any material transaction with conflict of interest.

Transactions with Related Parties

In the course of doing business, the Company engages in transactions with the Government of Indonesia as the Company's shareholders, and also with State-Owned Enterprises as entities under a common control and as such are considered related parties. The Company engages in fund placements in deposit accounts and bonds of related parties, whereas such transactions are done under the agreed terms and conditions.

Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Bank Syariah Mandiri	32,057,336	-
Bank Jabar Banten	16,065,589	5,917,648
PT BPD Sumatera Utara	14,812,483	-
Bank Tabungan Negara	11,800,597	15,436,058
Bank Rakyat Indonesia	4,206,104	26,481,363
PT Pembangkit Listrik Negara	1,655,708	681,755
Sukuk Ritel SR003	1,605,935	-
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1,456,097	684,271
Bank Mandiri	624,410	10,771,351
Sukuk IFR06	479,882	-
PT Jasamarga	201,178	-
PT Indosat	21,196	-
Bank Negara Indonesia	-	1,633,333
	84,986,515	61,605,779
Persentase terhadap Jumlah Pendapatan Percentage of Total Revenue	37.22%	79.90%

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun 2011 tidak terdapat perubahan terhadap peraturan, regulasi atau undang-undang lain yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan.

Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Changes in Laws and Regulations

In 2011, there were no changes in any rulings, regulations or laws that had a significant impact on the Company.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Daftar Isi	
No.	Isi
1	Pengantar
2	Struktur Organisasi
3	Profil Perusahaan
4	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
5	Strategi Bisnis
6	Struktur Organisasi
7	Profil Perusahaan
8	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
9	Strategi Bisnis
10	Struktur Organisasi
11	Profil Perusahaan
12	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
13	Strategi Bisnis
14	Struktur Organisasi
15	Profil Perusahaan
16	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
17	Strategi Bisnis
18	Struktur Organisasi
19	Profil Perusahaan
20	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
21	Strategi Bisnis
22	Struktur Organisasi
23	Profil Perusahaan
24	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
25	Strategi Bisnis
26	Struktur Organisasi
27	Profil Perusahaan
28	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
29	Strategi Bisnis
30	Struktur Organisasi
31	Profil Perusahaan
32	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
33	Strategi Bisnis
34	Struktur Organisasi
35	Profil Perusahaan
36	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
37	Strategi Bisnis
38	Struktur Organisasi
39	Profil Perusahaan
40	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
41	Strategi Bisnis
42	Struktur Organisasi
43	Profil Perusahaan
44	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
45	Strategi Bisnis
46	Struktur Organisasi
47	Profil Perusahaan
48	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
49	Strategi Bisnis
50	Struktur Organisasi
51	Profil Perusahaan
52	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
53	Strategi Bisnis
54	Struktur Organisasi
55	Profil Perusahaan
56	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
57	Strategi Bisnis
58	Struktur Organisasi
59	Profil Perusahaan
60	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
61	Strategi Bisnis
62	Struktur Organisasi
63	Profil Perusahaan
64	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
65	Strategi Bisnis
66	Struktur Organisasi
67	Profil Perusahaan
68	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
69	Strategi Bisnis
70	Struktur Organisasi
71	Profil Perusahaan
72	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
73	Strategi Bisnis
74	Struktur Organisasi
75	Profil Perusahaan
76	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
77	Strategi Bisnis
78	Struktur Organisasi
79	Profil Perusahaan
80	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
81	Strategi Bisnis
82	Struktur Organisasi
83	Profil Perusahaan
84	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
85	Strategi Bisnis
86	Struktur Organisasi
87	Profil Perusahaan
88	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
89	Strategi Bisnis
90	Struktur Organisasi
91	Profil Perusahaan
92	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
93	Strategi Bisnis
94	Struktur Organisasi
95	Profil Perusahaan
96	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
97	Strategi Bisnis
98	Struktur Organisasi
99	Profil Perusahaan
100	Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan

Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian dan Kewajaran.

Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness.



**Nilai-nilai Tata Kelola
Perusahaan yang Baik selalu
menjadi landasan Perseroan
dalam menjalankan mandatnya.**

The values of Good Corporate
Governance are a cornerstone of
the Company in carrying out its
mandate.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Implementation

Di tahun 2011, Perseroan telah mengembangkan struktur organ tata kelola serta pedoman-pedoman, kebijakan dan prosedur standar untuk memastikan penerapan GCG secara efektif.

In 2011, the Company has developed the necessary governance structure as well as related manuals, policies and standard procedures, to ensure effective implementation of GCG practices.

Perseroan dibentuk dengan mandat untuk menyediakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Mandat ini dijalankan oleh Perseroan dengan selalu berlandaskan pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. GCG di Perseroan mengacu pada Rapat Umum Pemegang Saham, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

The Company was established with a mandate to provide guarantee for infrastructure projects within the Public Private Partnership (PPP) scheme. To carry out this mandate, the Company relies on Good Corporate Governance (GCG) practices of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The practice of GCG at the Company refers to the General Meeting of Shareholders, its Articles of Association, and all prevailing laws and regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola Perseroan, yang memegang seluruh kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Kewenangan tersebut termasuk antara lain wewenang untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris

The General Meeting of Shareholders (GMS) forum is the highest organ in the Company's governance structure, which holds all the powers that are not delegated to the Board of Commissioners or the Board of Directors, as defined in the Limited Liability Company Law and/or the Company's Articles of Association. These include, among others, the authority to determine the Company's Work and Budget Plan as well as Long-term Plan, to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and to approve the Company's annual report including to



dan Direksi, serta untuk menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2011, Perseroan menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS, sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Januari 2011, dengan agenda: (i) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2011; (ii) Persetujuan Kontrak Manajemen tahun 2011; dan (iii) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2011.
2. Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 April 2011, dengan agenda: (i) Menyetujui pengeluaran/ penempatan saham dalam portepel sejumlah 1.000.000 (satu juta) masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah); (ii) Menyetujui penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah); dan (iii) Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pengeluaran/

ratify the Financial Statements and the Board of Commissioners Supervisory Report.

In 2011, the Company held 3 (three) GMS, as follows:

1. The General meeting of Shareholders on 26 January 2011, with the agenda of: (i) Approval of the Work and Budget Plan for 2011; (ii) Approval of the Management Contract for 2011; and (iii) Approval of the Work and Budget Plan of the Partnership and Community Development Program for 2011.
2. The General Meeting of Shareholders on 15 April 2011, with the agenda of: (i) Approval of the issuance of 1,000,000 (one million) authorized capital shares with a nominal value of Rp 1,000,000 (one million Rupiah) per share; (ii) Approval of additional state equity participation of Rp 1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah); and (iii) Approval of amendments to Article 4 Sub-article (2) and Sub-article (3) of the Company's Articles of Association to reflect the issuance of

penempatan saham dalam portepel dan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud di atas.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Mei 2011, dengan agenda: (i) Pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2010 yang terdiri dari persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2010, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2010 termasuk *acquitt et de charge* terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, persetujuan pencapaian kinerja manajemen sesuai Kontrak Manajemen tahun buku 2010, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2010; dan (ii) Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2011.

authorized capital shares and the addition of paid-up capital as described above.

3. The General Meeting of Shareholders on 27 May 2011, with the agenda of: (i) Ratification of the Annual Report for fiscal year 2010, comprising approval of Annual Report for fiscal year 2010, ratification of Financial Statements for fiscal year 2010 including to grant *acquitt et de charge* to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, approval of results of Management Contract for fiscal year 2010, and ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report for fiscal 2010; and (ii) Appointment of Public Accountant for fiscal year 2011.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas pengawasan secara umum dan/atau khusus sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, memberikan nasihat dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi, dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi kepengawasannya, Dewan Komisaris berhak untuk memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan. Apabila dipandang perlu, anggota Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif, berhak untuk memeriksa kontrak-kontrak, dokumen pendukung, kondisi keuangan, transaksi pihak yang berelasi ataupun tindakan yang dilakukan Direksi, untuk memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tanggung jawabnya. Apabila Dewan Komisaris menetapkan bahwa anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif, telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi dari tugas dan tanggung jawabnya. Penggantian anggota Direksi dan Komisaris hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.

Duties, Responsibilities and Authority

The Board of Commissioners is responsible for general and/or specific supervisory duties as defined in the Company's Articles of Association, to provide advice and supervise the implementation of recommendations by the Board of Commissioners to the Board of Directors, and to provide input to the General Meeting of Shareholders. The Board of Commissioners acts in an oversight function to the Board of Directors and is not involved in the day-to-day operations of the Company.

In discharging its oversight function, the Board of Commissioners has the right to receive information about the Company from the Board of Directors. If deemed necessary, members of the Board of Commissioners, individually or collectively, may examine contracts, supporting documents, the Company's financial condition, transactions with related parties, or actions taken by the Board of Directors, in order to ensure that the Board of Directors has fulfilled its responsibilities. Should the Board of Commissioners determine that members of the Board of Directors, individually or collectively, have taken actions contrary to the Company's vision, mission and Articles of Association, the Board of Commissioners has the right to temporarily relieve the respective Director(s) from duties. Replacement of Commissioners and Directors can only be done with approval of the GMS.

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah keanggotaan Dewan Komisaris haruslah memadai untuk memberikan manfaat dari keberagaman sudut pandang, keahlian dan latar belakang yang dimiliki.

Per akhir tahun 2011, keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Komisaris Utama	Freddy Rikson Saragih	President Commissioner
Komisaris	Ayu Sukorini	Commissioner

Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan di bab Data Perusahaan, halaman 148-149 dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2011, Dewan Komisaris mengadakan rapat secara periodik dengan tingkat kehadiran masing-masing Komisaris sebesar 100%.

Rapat-rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Direksi dan pejabat senior atau staf Perseroan lainnya sesuai dengan agenda yang dibahas dalam masing-masing rapat.

Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris tahun 2011 diputuskan melalui Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor S-462/MK.06/2011 tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Di tahun 2011, Dewan Komisaris selain menerima gaji/honorarium bulanan juga menerima tunjangan/fasilitas berupa Tunjangan Hari Raya serta tantiem atas pencapaian kinerja Perseroan tahun 2010.

Composition of the Board of Commissioners

The numbers of membership in the Board of Commissioners should be sufficient to benefit from the diversity of their point of views, skills and backgrounds.

As at year-end 2011, the composition of the Company's Board of Commissioners consisted of 2 members as follows:

Brief profiles of members of the Board of Commissioners are presented in the Corporate Data section, page 148-149 of this Annual Report.

Meetings of the Board of Commissioners

In 2011, the Board of Commissioners held regular meetings, with 100% attendance of the respective Commissioners in each meeting.

These meetings were also attended by members of the Board of Directors and other senior staff or employee of the Company as needed according to the agenda of the respective meetings.

Remuneration of the Board of Commissioners

Remuneration of the Board of Commissioners for 2011 was determined by Decision of Shareholders No. S-462/MK.06/2011 concerning the Determination of Salary/Honorarium, Benefits and Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners.

In 2011, aside from monthly salaries/honorariums, the Board of Commissioners also received benefits/facilities in the form of Annual Holiday Allowance and incentive for Company's performance in 2010.

Komite-Komite di Bawah Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Sampai dengan akhir tahun 2011, Dewan Komisaris belum membentuk komite-komite dimaksud sesuai dengan kewenangannya. Hal ini disebabkan belum selesainya persiapan yang dibutuhkan, urgensi pembentukannya yang dikaitkan dengan volume transaksi yang relatif kecil dan Perseroan baru mulai berkembang, serta mengingat sumberdaya Perseroan masih lebih banyak terserap untuk aktivitas operasional sehari-hari.

Perseroan merencanakan untuk membentuk 1 (satu) komite di bawah Komisaris, yaitu Komite Audit yang akan membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal, serta terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit termasuk oleh auditor eksternal.

In discharging its supervisory duties, the Board of Commissioners may be assisted by committees under the Board of Commissioners. Up until year-end 2011, the Board of Commissioners had not set up such committees as it was authorized to establish. This was due to the non-completion of the necessary preparations and the low urgency for such committees in view of the still relatively small transaction volume at this early stage of the Company's operations, while the limited resources of the Company have to be concentrated more on daily operational activities.

The Company intends to establish 1 (one) committee under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, which will assist the Board of Commissioners in supervising and evaluating aspects of financial reporting, regulatory compliance, risk management and internal control implementation, as well as audit planning and implementation including those by external auditors.

Direksi

Board of Directors

Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang

Direksi adalah organ pengambil keputusan utama dalam Perseroan. Anggota Direksi bekerja sama dengan jajaran manajemen utama dalam operasional sehari-hari untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan. Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan wajib bertindak untuk kepentingan Perseroan.

Direksi memiliki kewenangan antara lain untuk bertindak dan menjalankan suatu transaksi atas nama Perseroan, dan mewakili Perseroan di dalam pengadilan. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya tersebut, Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Duties, Responsibilities and Authority

The Board of Directors is the primary decision-making body of the Company. Members of the Board of Directors work with key management personnel in day-to-day operational activities to achieve the Company's objectives. Members of the Board of Directors, individually or collectively, are responsible for the management of the Company and are required to act in the best interest of the Company.

The Board of Directors is authorized, among other matters, to act and carry out transactions on behalf of the Company, and to represent the Company in a court of law. In discharging its duties, responsibilities and authority, the Board of Directors is supervised by the Board of Commissioners.

Komposisi Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2011, keanggotaan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	Sinthya Roesly	President Director
Direktur Keuangan & Administrasi	Armand Hermawan	Director Finance & Administration
Direktur Operasi	Yadi J. Ruchandi	Director Operations

Profil singkat masing-masing anggota Direksi disajikan di bab Data Perusahaan, halaman 150-151 dalam Laporan Tahunan ini.

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas Direksi dimaksudkan untuk memungkinkan Direksi secara kolektif berfungsi efektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Direktur Utama: Bertanggung jawab untuk memimpin Direksi, mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi-fungsi Direksi, dan memberikan arahan kepada anggota Direksi lain mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam rapat-rapat Direksi.

Direktur Keuangan & Administrasi: Bertanggung jawab atas pengelolaan dana, pricing dan pemrosesan klaim, treasury dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, serta aspek administrasi dan umum sebagai fungsi pendukung bagi aktivitas operasional sehari-hari Perseroan.

Direktur Operasi: Bertanggung jawab atas aktivitas bisnis Perseroan, termasuk aktivitas pengembangan usaha, konsultasi dan bimbingan kepada PJPk dan market serta melakukan appraisal proyek.

Rapat Direksi

Pada tahun 2011, Direksi mengadakan rapat baik yang terjadwal secara periodik maupun yang tidak terjadwal, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi sebesar 100%. Direksi juga melaksanakan koordinasi internal di luar rapat-rapat tersebut, serta membuat resolusi secara sirkular.

Composition of the Board of Directors

As at year-end 2011, memberships of the Board of Directors of the Company consist of:

Brief profiles of members of the Board of Directors are presented in the Corporate Data section, page 150-151 of this Annual Report.

Divisions of Duties among Directors

Divisions of Duties among Directors
Divisions of duties among the Directors enable the effective functioning of the Board of Directors as a collective body in the implementation of its assigned duties and responsibilities.

President Director: Responsible for leadership of the Board of Directors, to coordinate the implementation of different functions of the Directors, and to provide direction to other Directors regarding issues that are discussed in Board of Directors' meetings.

Director, Finance & Administration: Responsible for fund management, pricing and claim processing, treasury and accountancy, human resources management, as well as general and administrative aspect as a support function in the Company's day-to-day operational activities.

Director, Operations: Responsible for the Company's business activities, including business development, providing consultation and guidance for CAs and the market, and for project appraisal.

Meetings of the Board of Directors

In 2011, the Board of Directors held periodic scheduled meetings as well as non-scheduled meetings, with 100% attendance of the respective Director in each meeting. Aside from these meetings, the Board of Directors also engaged in internal coordination as well as circular resolutions.

Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi tahun 2011 diputuskan melalui Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor S-462/MK.06/2011 tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Di tahun 2011 Direksi selain menerima gaji bulanan juga menerima tunjangan / fasilitas berupa tunjangan perumahan, tunjangan cuti dan tunjangan hari raya serta tantiem atas pencapaian kinerja Perseroan tahun 2010.

Pelatihan bagi Direksi

Sepanjang tahun 2011 Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan konferensi nasional maupun internasional dengan topik yang berkaitan dengan bisnis penjaminan pada khususnya maupun tentang infrastruktur pada umumnya.

Daftar pelatihan, seminar dan konferensi yang telah diikuti antara lain sebagai berikut:

Remuneration of the Board of Directors

Remuneration of the Board of Directors for 2011 was determined by Decision of Shareholders No. S-462/MK.06/2011 concerning the Determination of Salary/Honorarium, Benefits and Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners.

In 2011, aside from monthly salary/honorarium, the Board of Directors also received benefits/ facilities comprising housing allowance, leave allowance, Annual Holiday Allowance and incentive for Company's performance in 2010.

Training for the Board of Directors

Throughout 2011, members of the Board of Directors attended a number of workshops and seminars as well as domestic and overseas conferences on topics related to underwriting in particular and on infrastructure in general.

The following is a list of those workshops, seminars and conferences:

No	Rincian Kegiatan / Details of Activities	Tanggal / Date
1	Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition, Jakarta	11-13 April 2011
2	Asia Public Policy Forum FE UI and Harvard Kennedy School , Jakarta	8-Mei-2011
3	Bank Mandiri CFO Forum, Jakarta	1 Juni 2011
4	Workshop Kementerian PU "Perumusan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Sektor Konstruksi Indonesia"	17 Juni 2011
6	The Infrastructure in a Market Economy Executive Program at Harvard Kennedy School	10-21 Juli 2011
7	Seminar Bank BRI "Economic dan Market Outlook", Jakarta	19 Juli 2011
8	Seminar Nasional Hukum (UNPAD)	20 Juli 2011
9	Indonesia Investment Summit 2011, Jakarta	20 Juli 2011
10	Workshop Bappenas : "Best Practice" Kelembagaan KPS dan Usulan Kelembagaan KPS di Indonesia, Jakarta	26 Juli 2011
11	World Bank Singapore- Infrastructure Finance Summit , Singapore	6-September-11
12	Ambassadors Roundtable on Infrastructure Development, Jakarta	12-September-11
13	Business Forum Indonesia - Netherlands, Port Development & Logistic, Jakarta	10 Oktober 2011
14	PPP Capacity Building Workshop untuk Proyek Air Minum Semarang Barat, Jakarta	18 Oktober 2011
15	Speaker in Islamic Finance in Indonesia – Opportunities and Challenges, Jakarta	20 Oktober 2011
16	Studi Banding ke Hunter Valley Coal Rail - Australia	29 Oktober - 3 November 2011
17	Narasumber embahasan Aspek Syariah Penjaminan dalam Proyek KPS untuk Infrastruktur , Jakarta	4-November-11
18	Pembicara untuk Diskusi dengan tema " Menimbang Ide Pembentukan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur" oleh Kementerian Keuangan RI, Jakarta	4-November-11
19	Seminar dan Pameran Nasional Teknologi dan Bisnis Ketenagalistrikan 2011 ITB, Bandung	9-November-11
20	Speaker for Asian Urban Forum : Financing Future Cities	15-17 November 2011
21	IABC Business Conference & ABA Regional Forum	17- 19 November 2011
22	Asia & Middle East Government Funds Roundtable , Singapore	17-18 November 2011

No	Rincian Kegiatan / Details of Activities	Tanggal / Date
23	Public Communications Training, Jakarta	22-Nop-11
24	Speaker for Transport Stakeholders open Forum - Toll Roads, Subject : 'Role Guarantees for Transport Infrastructure Development', Jakarta	24-Nop-11
25	Speaker at Indonesia Power : How the New Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) is Driving Private Sector Involvement in Indonesian Power: A Close Look at the Pemalang IPP, Jakarta	29-Nop-11
26	Speaker for Asia Finance and Risk Mitigation Forum 2011, Singapore	2 Desember 2011

Internal Audit

Internal Audit

Unit Internal Audit bertanggung jawab untuk membantu Direksi mewujudkan sistem kendali internal di dalam Perseroan untuk menjamin pelaksanaan tugas korporasi sesuai mandat yang diterima dan peraturan yang berlaku, dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Internal Audit bersifat independen terhadap unit-unit kerja dan fungsional lainnya di Perseroan, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Unit Internal Audit Perseroan telah dilengkapi dengan Piagam Internal Audit sebagai dasar dari pelaksanaan tugas-tugasnya.

Kegiatan Internal Audit selama 2011 meliputi:

- Penyusunan *Internal Audit Charter* dan *Internal Audit Procedure*
- Terlibat sebagai anggota Tim Penyusunan Dokumen Proses Bisnis dan ERM dengan dibantu oleh Konsultan KPMG
- Terlibat sebagai anggota Tim Pengelola *Diagnostic Assessment* atas *Praktik Good Corporate Governance* oleh BPKP
- Memberikan masukan dan saran atas beberapa hal sebagaimana diminta oleh Direksi dan unit/ fungsi lain dalam Perseroan

Sampai dengan akhir tahun 2011, unit Internal Audit dipimpin oleh Sdr. I Gede Susila Aryana, CISA.

The Internal Audit unit assists the Board of Directors in establishing internal control systems within the Company to ensure the fulfillment of corporate missions according to the mandate and prevailing regulations, with due regards to efficiency and effectiveness as well as the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. In discharging its duties and functions, Internal Audit is independent of other work and functional units within the Company, and reports directly to the President Director. The Internal Audit unit has been equipped with an Internal Audit Charter as the basis for the implementation of its duties and function.

Throughout 2011, Internal Audit engaged in the following activities:

- Formulation of the Internal Audit Charter and Internal Audit Procedures
- Involved in the team for the Formulation of Business Processes and ERM Documents with assistance from KPMG consultants.
- Involved in the team for Diagnostic Assessment on Good Corporate Governance Practice by BPKP
- Provided input and suggestions on a number of issues as requested by the Board of Directors and by other units/functions within the Company

As at year-end 2011, the Internal Audit unit was led by I Gede Susila Aryana, CISA.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk membantu Direksi memonitor penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan, di samping melaksanakan program komunikasi perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta kegiatan kesekretariatan perusahaan.

Sampai dengan akhir tahun 2011, Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabat oleh Sdri. Adita Irawati.

The Corporate Secretary is responsible for assisting the Board of Directors in monitoring the implementation of Good Corporate Governance at the Company, in addition to the implementation of the Company's corporate communications programs, Corporate Social Responsibility programs, and corporate secretariat activities.

As at year-end 2011, the position of Corporate Secretary is served by Adita Irawati.

Perkara Hukum

Legal Proceedings

Selama tahun 2011, tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan Perseroan, ataupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Akses terhadap Informasi atas Perusahaan

Dalam rangka keterbukaan informasi, Perseroan menyediakan akses publik kepada informasi mengenai Perseroan di situs web Perseroan, www.iigf.co.id dan email info@iigf.co.id. Melalui situs web Perseroan, pemangku kepentingan dan masyarakat umum juga dapat mengakses berbagai publikasi mengenai Perseroan, termasuk Profil Perusahaan, Laporan Tahunan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

Dari waktu ke waktu, Perseroan juga mengeluarkan siaran pers terkait dengan perkembangan penting yang terjadi di Perseroan.

Throughout 2011, there were no legal proceeding involving either the Company or members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Access to Information on the Company

In the interest of information disclosure, the Company provides public access to information on the Company in its corporate web site, www.iigf.co.id and email info@iigf.co.id. In this web site, stakeholders and the interested public can also access a variety of Company publications including Company Profile and Annual Reports, as well as other official Company documents.

From time to time, the Company also issues press releases concerning current significant developments within the Company.

No	Tanggal / Date	Ringkasan Press Release / Summary of Press Release
1	28 April 2011	Proses tender proyek KPS PLTU Jawa Tengah memasuki tahap akhir dengan dilakukannya penyerahan dokumen penawaran (bid submission) oleh para calon investor di keesokan harinya. KPS PLTU tender process plant project in Central Java to do the final stage of the tender document submission (bid submission) by the prospective investors in the next day.
2	23 September 2011	Dokumen Proyek KPS PLTU Jawa Tengah terkait penjaminan telah diinisial oleh para pihak. KPS PLTU Project Documents related power plant in Central Java has diinisial assurance by the parties.
3	6 Oktober 2011	Penandatanganan Dokumen Perjanjian Proyek KPS PLTU Jawa Tengah yang terdiri dari Perjanjian Jual Beli Listrik, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres. The signing of the PPP Project Agreement Document Central Java power plant consisting of Power Purchase Agreement, Guarantee Agreement and the Agreement Regres.
4	13 Oktober 2011	Penyampaian perkembangan terkini perusahaan khususnya terkait Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres terkait proyek Kerjasama Pemerintah Swasta ("KPS")/PPP PLTU Jawa Tengah melalui media gathering. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dengan media sebagai mitra perusahaan. Submission of recent developments, especially related companies Signing of Underwriting Agreement and the Agreement related Regres Public Private Partnership projects ("KPS") / PPP power plant in Central Java through the media gathering. This event will also be a meeting with the media as a corporate partner.
5	30 Oktober 2011	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Proyek Kereta Api Kalimantan Tengah sebagai salah satu proyek dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan. Provincial Government of Central Kalimantan and PT Indonesia Infrastructure Guarantee Corporation (Corporation) signed a Cooperation Agreement Railway Project in Central Kalimantan as one project in the Master Plan to Accelerate Economic Development and Expansion of Indonesia (MP3EI) Borneo Corridor

Pedoman Kode Etik Perusahaan

Company Code of Conduct

Suatu langkah maju yang penting bagi terselenggaranya praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perseroan adalah diterbitkannya dokumen Pedoman Kode Etik Perusahaan pada tahun 2011. Dokumen Pedoman Kode Etik berisi sekumpulan standar etika perilaku dalam menjalankan bisnis di Perseroan, yang diharapkan dapat mempengaruhi dan membentuk interaksi internal (organ/unit dan karyawan Perseroan) maupun eksternal (mitra usaha, afiliasi dan pemangku kepentingan lainnya) secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran etis, berpikir etis dan berperilaku etis.

The publication of the Company's Code of Conduct document in 2011 represented major progress towards the implementation of Good Corporate Governance practices within the Company. The Code of Conduct document compiles a set of standard ethical behaviors in doing business at the Company. These standards are expected to guide and shape all internal (organ/units and employees of the Company) as well as external (business partners, affiliations and other stakeholders) interactions in a consistent manner, based on the principles of ethical sensibility, ethical reasoning and ethical conduct.

Kebijakan Perilaku Perusahaan

Merupakan pedoman berperilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dalam berinteraksi, bersikap dan bertindak sesuai etika dan ketentuan yang ada, antara lain dalam hal:

- penyalahgunaan jabatan
- etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan
- kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja
- kesempatan kerja yang adil
- standar etika hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
- integritas Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
- hak atas kekayaan intelektual
- kebijakan pengungkapan informasi
- pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi
- informasi orang dalam
- keterlibatan dalam aktivitas politik
- perlindungan dan penggunaan aset secara efisien
- citra Perseroan
- larangan kepemilikan dan penggunaan alkohol dan/atau narkoba, psikotropika dan zat aditif

Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

Pihak yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan/atau SVP Legal/Compliance seperti diatur dalam *Operations Manual* PII. Pihak pelapor harus mengungkapkan identitas yang jelas dan akan dilindungi kerahasiaannya.

Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perseroan.

Pernyataan Kepatuhan

Komitmen dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan mitra kerja dalam menerapkan Pedoman Kode Etik ditunjukkan dengan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan oleh masing-masing individu.

Policies on Ethical Conduct

Provides a guideline for the interactions, attitude and actions of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Company, in line with ethical standards and prevailing rules, concerning:

- abuse of power
- ethics in interacting with stakeholders
- concern for environment and work health and safety
- equal opportunity employment
- ethics in the interactions among Commissioners, Directors and employees
- integrity of Commissioners, Directors and employees
- intellectual rights
- policies on information disclosure
- giving and receipt of gifts and donations
- insider information
- involvement in political activities
- maintenance and efficient utilization of assets
- corporate reputation
- prohibition from possession and use of alcoholic beverages and/or narcotic, psychotropic and addictive substances.

Reporting Violation of Code of Conduct

A person with knowledge of, or a reasonable suspicion of, a violation of the Code of Conduct may report such knowledge or suspicion to the President Director and/or the SVP of Legal/ Compliance as described in IIGF Operations Manual. The reporting party shall disclose his/her identity, which will remain confidential.

Penalty for Violation of Code of Conduct

Violation to the Code of Conduct will incur a penalty in accordance with prevailing Company regulations.

Statement of Compliance

Each individual of the Board of Commissioners, Board of Directors, employees and business partners of the Company shall express their commitment to abide by the Code of Conduct by signing a Statement of Compliance.

Akuntan Independen Independent Auditor

Laporan Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2011 telah diaudit oleh auditor independen Drs. Haryanto Sahari, CPA, dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan. Auditor independen dan KAP tersebut juga telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010.

The Financial Statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) or IIGF, for the fiscal year ending 31 December 2011 have been audited by independent auditor Drs. Haryanto Sahari, CPA, from the Public Accountant Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Partners. The same independent auditor and KAP also performed the audit on the Company's Financial Statements for fiscal year ending 31 December 2010.

Diagnostic Check Penerapan GCG oleh BPKP Diagnostic Check on GCG Implementation by BPKP

Di tahun 2011, Perseroan bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan *diagnostic assessment* terhadap penerapan GCG di Perseroan yang bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait aspek-aspek penerapan GCG yang perlu diperbaiki di masa mendatang.

In 2011, the Company cooperated with the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) in conducting a diagnostic assessment on the implementation of GCG at the Company, in order to discover feedback on aspects of GCG that need to be improved in the future.

Pengelolaan Risiko

Risk Management



11

Kategori Risiko KPS
PPP Risk Categories



PII menggunakan pendekatan yang jelas dan komprehensif dalam mengelola risiko dengan mempertimbangkan risiko unik yang melekat dalam berbagai kegiatan dan proyek.

IIGF use a clear and comprehensive approach in managing risks taking into account the unique risks inherent in various activities and projects.

Pengelolaan Risiko

Risk Management

Pengelolaan risiko merupakan salah satu fokus utama dalam operasional PII, yang dilaksanakan melalui suatu kerangka Enterprise Risk Management (ERM) yang komprehensif.

Risk management is one of the main focuses in IIGF operations, implemented through a comprehensive Enterprise Risk Management (ERM) framework.

Kerangka Risiko Risk Framework

Dalam mencapai sasaran perusahaan, PII membangun kerangka pengelolaan perusahaan yang terintegrasi, termasuk Kerangka Pengelolaan Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management /ERM). Sebagai organisasi yang menyediakan penjaminan risiko untuk proyek-proyek infrastruktur, PII menggunakan pendekatan yang jelas dan komprehensif dalam mengelola risiko dengan mempertimbangkan risiko unik yang melekat dalam berbagai kegiatan dan proyek. Kerangka ini kemudian menjadi acuan untuk mengelola risiko dalam aspek-aspek perusahaan dan dalam kaitannya dengan aspek proyek infrastruktur untuk mencapai sasaran bisnisnya.

Tolok Ukur Pengelolaan Risiko PII terhadap Standar Internasional.

Kerangka Pengelolaan Risiko PII telah mengacu kepada standar internasional dengan dibantu oleh konsultan yang kredibel di bidangnya. Referensi utama yang digunakan yaitu:

- COSO Enterprise Risk Management Framework; and
- ISO 31000:2009.

In achieving the corporate objectives, IIGF establish integrated management framework, including the Enterprise Risk Management (ERM) framework. As the organization that provides guarantee coverage for risks in infrastructure projects, IIGF use a clear and comprehensive approach in managing risks taking into account the unique risks inherent in various activities and projects. The framework then provides high-level guidance on how IIGF can manage its risks in corporate wide aspect and in the related infrastructure project risk aspect to achieve defined business objectives.

Benchmarking IIGF Risk Management to International Standards

IIGF Risk Management Framework has been benchmarked to international standards with the assistance of credible Risk Management consultant. The main references are:

- COSO Enterprise Risk Management Framework; and
- ISO 31000:2009.



Pemetaan tentang bagaimana kerangka ERM PII dibandingkan dengan referensi standar diuraikan dalam Table 1 di bawah ini.

The mapping of how IIGF ERM framework compared to the standard references are illustrated in Table 1 below.

Perbandingan Kerangka ERM PT PII dengan Standar Internasional
Benchmarking of IIGF ERM framework with International Standards

ISO 31000:2009 ERM Framework	COSO – ERM Framework	IIGF ERM Framework
Scope, Terms, and Definition	Internal Environment	A. Introduction F. Appendixes
Principles		B. 4. Risk Management Principles
Framework		
Mandate & commitment	Internal Environment	B. 1. Risk Management Mission Statement
Design		D. Risk Management Governance D. 1. Governance Model D. 2. Roles and Responsibilities
Implementation	Control Activities	B. 5. Embedding of ERM
Monitoring & Review		B. 6. ERM Framework Evaluation
Continual Improvement		A. 7. Review and Modification of The Risk Management Policies
Process		
Communication & Consultation	Information & Communication	A. 6. Communication B. 2. Risk Management Philosophy
Establishing the Context	Objective Setting	A. 3. Objective of IIGF Risk Management
	Internal Environment	B. 3. Risk Appetite and Tolerance C. Definition and Risk Category
Risk Assessment - Identification - Analysis - Evaluation	Event Identification Risk Assessment	E. Risk Management Process E. 1. Risk Identification E. 2. Risk Evaluation
Risk Treatment	Risk Response	E. 3. Risk Treatment
Monitoring & Review	Monitoring	E. 4. Risk Monitoring
Recording		E. 5. Risk Reporting

Tata Kelola Risiko

Risk Governance

Berdasarkan ERM, PII menerapkan 3 garis pertahanan (pemilik risiko, pihak yang menetapkan standard dan penyedia jaminan kepatuhan) untuk implementasi Pengelolaan Risiko dengan fungsi bisnis sebagai pemilik risiko. Dengan demikian, unit Pengelolaan Risiko PII independen terhadap area risiko yang tinggi atau memiliki kendali tambahan untuk memastikan hasil yang obyektif dari unit Pengelolaan Risiko. Suatu Komite Pengelolaan Risiko (terdiri dari Direksi dan Kepala Divisi Pengelolaan Risiko) bertanggung jawab untuk mengelola implementasi pengelolaan risiko, termasuk menetapkan *risk appetite* dan toleransi risiko serta implementasi kegiatan pengelolaan risiko tersebut.

Based on the ERM, IIGF implements 3 lines of defense (i.e. risk owner, standard setter and assurance provider) for Risk Management implementation with business function as risk owner. Thus, the Risk Management unit in IIGF is independent from high risk area or with additional control to ensure objective output from RM unit. A Risk Management Committee (e.g. consist of Board of Directors and Risk Management Division Head) is responsible to manage risk management implementation, which includes defining risk appetite and tolerance and implementation of RM activities

Identifikasi Risiko

Risk Identification

Kategori Risiko

Pada dasarnya, risiko PII mirip dengan perusahaan sejenis lainnya. Meskipun tidak ada entitas yang sifatnya sama secara spesifik, baik nasional maupun internasional, beberapa kemiripan fitur ditemukan pada perusahaan penyedia asuransi.

PII mengelompokkan risiko-risiko berdasarkan kategori sebagai berikut:

- Risiko Strategik, termasuk seluruh risiko terkait perencanaan, penerapan dan pemantauan strategi;
- Risiko Reputasi, termasuk seluruh risiko terkait persepsi atau publikasi negatif terhadap PII
- Risiko Finansial, termasuk seluruh risiko terkait risiko pasar dan risiko likuiditas;
- Risiko Operasional, termasuk seluruh risiko terkait penyelewengan internal/ eksternal, kegagalan atau kelemahan personil, proses atau sistem, pengelolaan mitra kerja / vendor, dan kerusakan aset fisik. Kategori ini juga termasuk risiko Kepatuhan dan risiko Hukum.
- Risiko Kredit Mitra Kerja, termasuk seluruh risiko terkait ketidakmampuan mitra kerja untuk memenuhi kewajiban kontraktual.

Risk Category

Basically, the universe of risks to IIGF is similar to other typical companies. Although there is no specific entity with similar nature, either nationally or internationally, some resemblance features are found in insurance companies.

The IIGF categorize risks into the following category:

- Strategic risk, include all risks related to strategy planning, execution and monitoring
- Reputation Risk, include all risks related to negative perceptions or publications toward IIGF
- Financial Risk, include all risks related to Market risk and Liquidity risk
- Operational Risk, include all risks related to internal/external fraud, personnel, process or system failure/ weakness, counterparty/ vendor management, damage to physical assets. This category includes Compliance risk and Legal risk
- Counterparty credit risk, include all risks related to inability of counterparty to meet the contractual obligation

Risiko-Risiko PT PII Risks in IIGF



Penilaian Risiko Risk Assessment

Penilaian risiko sangat penting dalam mendukung proses pengelolaan risiko. Di PII, yang bisnis utamanya erat dengan kuantifikasi kewajiban kontinjen, pengembangan model risiko mendapat perhatian khusus.

The risk assessment plays very important role for supporting the risk management process. In IIGF, as the core business relates to quantifying the contingent liabilities, specific attention is provided to development of risk model.

Pengembangan Model Risiko

Terhadap risiko pasar dan risiko kredit, model kuantifikasi risiko (meliputi simulasi keuangan, analisis sensitifitas, stress test, dsb) dibutuhkan untuk mengelola eksposur dari risiko tersebut terhadap modal penjaminan. Terhadap risiko operasi (terkait penjaminan proyek), teknik kuantifikasi risiko dilakukan dengan menjalankan simulasi stokastik untuk mengukur Nilai Risiko (eksposur pembayaran klaim).

Development of Risk Model

On market risks and credit risks, a risk quantification (e.g. financial simulation, sensitivity analysis, stress test, etc.) model is required to manage the exposure from these risks to the guarantee capital. On the operations (related to project guarantee) risks, risk quantification techniques are performed by running stochastic simulation model to measure Value at Risk (payout exposure).

Model Pengalokasian Modal

Tujuan model ini adalah untuk menetapkan kriteria yang jelas dalam mengukur eksposur risiko dengan mengembangkan matriks penilaian risiko untuk digunakan dalam penilaian risiko korporat. Selama masih bisa diterapkan, model pengalokasian modal PII akan mencakup hal-hal berikut:

- mempertimbangkan proses pemantauan untuk mengumpulkan informasi terhadap probabilitas dan korelasi risiko
- menggunakan distribusi empiris untuk menghasilkan VaR dalam mengurangi ketergantungan terhadap distribusi Normal

Capital Provisioning Model

The purpose of this model is to establish clear criteria in measuring risk exposure by expanding the risk assessment matrix to be used for corporate level risk assessment. To the extent it is possible and contextual, IIGF capital provisioning model shall:

- Consider monitoring process to collect information to set more accurate probability and correlations
- Use empirical distribution to generate VaR to remove dependency on arbitrary selection of the normal distribution

- menggunakan probabilitas kondisional terhadap peristiwa risiko
- mempertimbangkan waktu prosedur regres
- memperhitungkan pemulihan klaim dan kewajiban lainnya

Pemantauan dan Pelaporan Risiko

Untuk membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan risiko yang efektif, ERM PII menetapkan suatu acuan Indikator Risiko Utama (IRU) untuk pemantauan dan pengendalian implementasinya. Pelaporan pengelolaan risiko dan daftar distribusinya perlu juga dibangun dan dikembangkan. Terhadap isu kendali risiko, suatu Kendali Risiko Individu dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan praktik pengelolaan risiko akan menjadi bagian dari pemantauan implementasi ERM PII.

- use conditional probability of risk events
- Consider timing of recourse procedures
- Incorporating recoveries and other liabilities

Risk Monitoring and Reporting

In order to have an effective monitoring and reporting mechanism on risks, IIGF ERM stipulates the need to have a guideline for Key Risk Indicator (KRI) on monitoring and control implementation monitoring. The Risk Management reporting framework and distribution list shall also be developed and implemented. On risk control issues, a Risk Control Self Assessment (RCSA) and KPIs that reflects Risk Management practice would also be the part of the IIGF ERM implementation monitoring.

Kategori Risiko KPS

PPP Risk Category

Sebagaimana diuraikan dalam dokumen “KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko” yang diterbitkan PII, kategori Risiko KPS dikembangkan sebagai suatu daftar kelompok risiko yang generik, yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa risiko spesifik kepada setiap proyek KPS.

1. Risiko Lokasi adalah kelompok risiko dimana lahan proyek tidak tersedia atau tidak dapat digunakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan dalam biaya yang diperkirakan, atau bahwa lokasi dapat menimbulkan suatu beban atau kewajiban bagi pihak tertentu. Dengan demikian, risiko-risiko yang termasuk kategori ini adalah:
 - a). Risiko pembebasan lahan;
 - b). Risiko ketidaksesuaian lokasi lahan;
 - c). Risiko lingkungan.
2. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi adalah risiko desain, konstruksi atau uji operasi suatu fasilitas proyek atau elemen dari prosesnya, dilakukan dengan cara yang menyebabkan dampak negatif terhadap biaya

As stipulated in the document “PPP in Indonesia: Risk Allocation Reference” issued by PII, the Risk Category is developed as a generic list of risk grouping which is expected to be of use for the identification of risk events specific to each PPP’s project.

1. Site risk is the risk that the project land will be unavailable or unable to be used at the required time, in the manner or at the cost anticipated, or that the site will generate unanticipated liabilities. Thus, risks included in this category are:
 - a). Land acquisition risk;
 - b). Land site unsuitability risk;
 - c). Environmental risk.
2. Design, construction and commissioning risk is the risk that the design, construction or commissioning of the facility or certain elements of each of these processes, are carried out in a way which results in adverse cost and/or project

dan pelayanan proyek. Dengan demikian, risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a). Risiko perencanaan ;
- b). Risiko desain;
- c). Risiko penyelesaian;
- d). Risiko kenaikan biaya;
- e). Risiko uji operasi.

3. Risiko Sponsor adalah risiko dimana BU dan/ atau sub-kontraktornya tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada PJPK.

4. Risiko Finansial adalah risiko-risiko terkait aspek kelayakan finansial proyek. Risiko-risiko tersebut dapat berupa:

- a). Risiko ketidakpastian pembiayaan;
- b). Risiko parameter finansial;
- c). Risiko struktur finansial;
- d). Risiko asuransi.

5. Risiko Operasional adalah risiko dimana proses penyediaan layanan infrastruktur sesuai kontrak - atau suatu elemen dari proses tersebut (termasuk input yang digunakan atau sebagai bagian dari proses itu) - akan terpengaruh dengan cara yang menghalangi BU dalam menyediakan layanan kontrak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan/atau sesuai proyeksi biaya. Dengan demikian, risiko termasuk dalam kategori ini adalah:

- a). Risiko ketersediaan layanan;
- b). Risiko pemeliharaan;
- c). Risiko cacat tersembunyi (*latent defect*);
- d). Risiko teknologi;
- e). Risiko utilitas;
- f). Risiko sumber daya atau input;
- g). Risiko hubungan industri.

6. Risiko Pendapatan (revenue) adalah risiko bahwa pendapatan proyek tidak dapat memenuhi proyeksi tingkat kelayakan finansial, karena perubahan yang tak terduga baik permintaan proyek atau tarif yang disepakati atau kombinasi keduanya. Karenanya, risiko termasuk dalam kategori ini adalah:

- a). Risiko permintaan; dan
- b). Risiko tarif.

delivery consequences. Thus, risks included in this category are:

- a). Planning risk;
- b). Design risk;
- c). Completion risk;
- d). Cost overrun risk;
- e). Commissioning risk.

3. Sponsor risk is the risk where the Project Company (PC) and/or its sub-contractors are unable to fulfill their contractual obligations to the government.

4. Financial risk is the risk related to financial viability aspects of the project. This may refer to a number of risks, including the following:

- a). Financial uncertainty risk;
- b). Financial parameter risk;
- c). Financial structure risk;
- d). Insurance risk.

5. Operating risk is the risk that the process for delivering the contracted services – or an element of that process (including the inputs used within or as part of that process) – will be affected in a way which prevents the PC from delivering the contracted services according to the agreed specifications and/or within the projected costs. Thus, risks included in this category are:

- a). Service availability risk;
- b). Maintenance risk;
- c). Latent defect risk;
- d). Technology risk;
- e). Utilities risk;
- f). Resource or input risk;
- g). Industrial relations risk.

6. Revenue risk is the risk that the project revenue is unable to meet the projected level of financial viability, due to unexpected changes to either the project demand or the agreed tariff or combination of both. Thus, risks included in this category are:

- a). Demand risk; and
- b). Tariff risk.

7. Risiko Konektivitas Jaringan adalah risiko terjadinya dampak negatif akibat perubahan dari kondisi jaringan saat ini atau rencana masa depan. Risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:
 - a). Risiko konektivitas dengan jaringan eksisting;
 - b). Risiko pengembangan jaringan;
 - c). Risiko fasilitas pesaing.
 8. Risiko Interface adalah risiko dimana metode atau standar penyediaan layanan akan menghalangi atau mengganggu penyediaan layanan yang dilakukan sektor publik atau sebaliknya. Risiko ini termasuk ketika kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai/tidak cocok dengan yang dilakukan oleh BU, atau sebaliknya.
 9. Risiko Politik adalah risiko yang dipicu tindakan/tiadanya tindakan PJP yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang merugikan secara material dan mempengaruhi pengembalian ekuitas dan pinjaman. Risiko yang termasuk kategori ini adalah:
 - a). Risiko Mata Uang yang Tidak Dapat Dikonversi atau Ditransfer;
 - b). Risiko pengambilalihan;
 - c). Risiko perubahan regulasi dan perundangan;
 - d). Risiko sub-sovereign atau parastatal;
 - e). Risiko perijinan;
 - f). Risiko perubahan tarif pajak.
 10. Risiko Kahar (force majeure) adalah risiko terjadinya kejadian kahar yang sepenuhnya di luar kendali kedua belah pihak (misalnya bencana alam atau akibat manusia) dan akan mengakibatkan penundaan atau default oleh BU dalam pelaksanaan kewajiban kontraknya.
 11. Risiko Kepemilikan Aset adalah risiko terjadinya peristiwa seperti kejadian kehilangan (misalnya hilangnya kontrak, force majeure), perubahan teknologi, dan lainnya, yang menyebabkan nilai ekonomi aset menurun, baik selama atau pada akhir masa kontrak.
7. Network connectivity risk is the risk that the government-controlled network(s) needed for the PC to deliver the agreed services will be removed, not adequately maintained or otherwise changed. Thus, risks included in this category are:
 - a). Connectivity with the existing network risk;
 - b). Network development risk;
 - c). Competing facility risk.
 8. Interface risk is the risk that the method or standard of delivery of the contracted services will prevent or in some way frustrate the delivery of the public sector delivered services or vice versa. The risk includes when the quality of works done by government not conform/ suitable with those done by the PC, vice versa.
 9. Political Risk is the risk of unforeseeable action/ inaction by the CA or any other government authority that materially and adversely affects the expected return on equity, debt service or otherwise results in increased costs to the PC.
 - a). Currency inconvertibility and non-transfer risk;
 - b). Expropriation risk;
 - c). Change in law (legislative and government policy) risk;
 - d). Sub-sovereign or parastatal risk;
 - e). Regulatory consent risk;
 - f). Tax rate change risk.
 10. Force majeure risk is the risk that a specified event entirely outside the control of either party (e.g. act of god, man-made catastrophic event) will occur and will result in a delay or default by the PC in the performance of its contractual obligations.
 11. Asset ownership risk is the risk that events such as loss events (e.g. contract loss, force majeure), technological change, construction of competing facilities or premature obsolescence will occur, with the result that the economic value of the asset may vary, either during or at the end of the contract term, from the value upon which the financial structure of the project is based.

Cakupan Risiko Penjaminan Infrastruktur

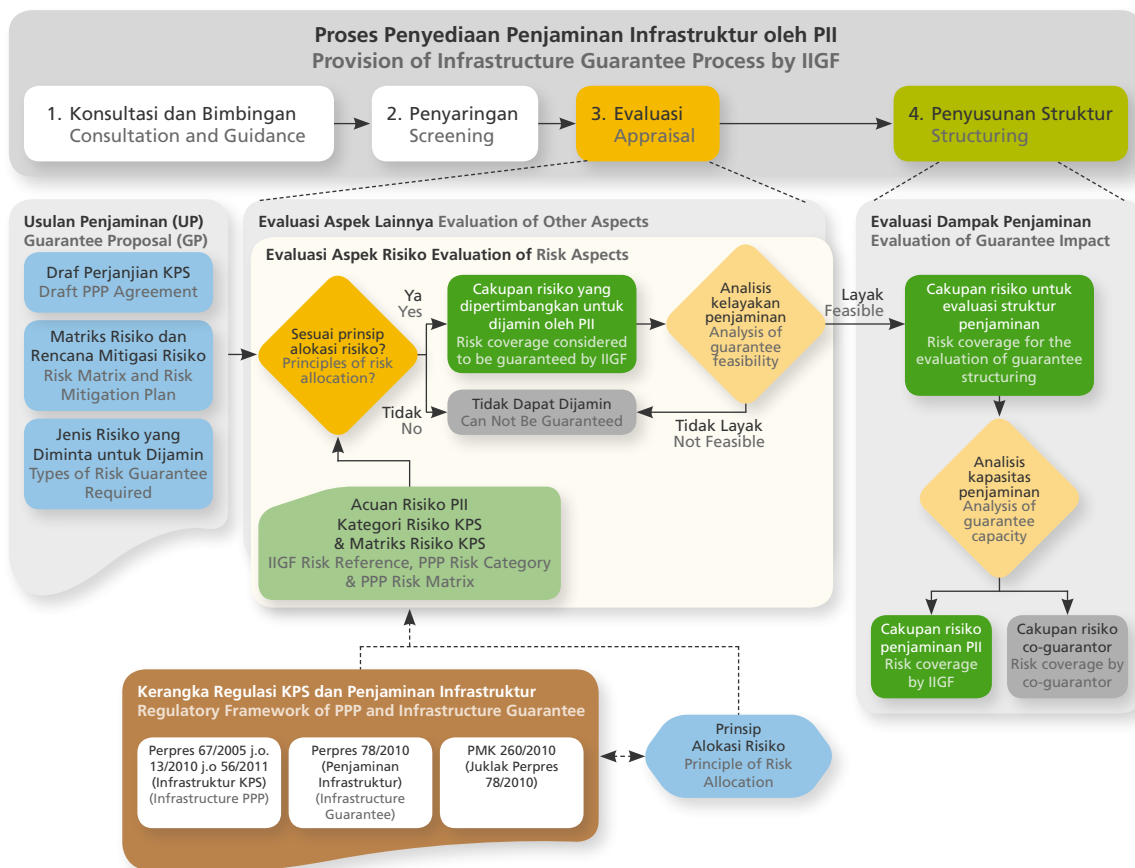
Cakupan Risiko Penjaminan Infrastruktur

Pada dasarnya, penjaminan infrastruktur oleh PII mencakup kewajiban finansial PJPK dalam suatu perjanjian KPS. Dalam menentukan cakupan penjaminan risiko infrastruktur dalam suatu proyek KPS tersebut, sesuai mandat dalam regulasi, PII mengevaluasi aspek risiko secara komprehensif (mengacu kepada dokumen Acuan Allocation Risiko PII), sebagaimana digambarkan pada diagram berikut.

Basically, the infrastructure guarantee provided by IIGF covers CA's financial obligation in the PPP agreement. In determining the coverage for infrastructure risks in a PPP project, in compliance with the regulation, IIGF conducts a comprehensive evaluation (with reference to IIGF Risk Allocation Reference) as shown in the following schematic.

Kaitan Acuan Risiko PII dan Kerangka Regulasi Penjaminan Infrastruktur

Link between IIGF Risk Reference and Regulatory Framework for Infrastructure Guarantee



Secara umum, berikut adalah daftar sebagian dari risiko-risiko (merupakan kewajiban finansial PJPK dalam Perjanjian KPS) yang dapat dijamin PII:

1. Lisensi, Izin dan Persetujuan

Cakupan terhadap risiko akibat keterlambatan atau kegagalan dalam memberikan lisensi, izin atau persetujuan (keterlambatan yang berdampak negatif terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan dimulai perolehan pendapatan).

2. Keterlambatan/Kegagalan Financial Close

Cakupan terhadap risiko keterlambatan atau kegagalan financial close yang diakibatkan tindakan/tidak bertindakannya PJPK (selain isu lahan dan isu perijinan).

3. Perubahan Regulasi dan Perundangan

Cakupan terhadap kerugian sebagai dampak dari perubahan regulasi/ perundangan yang berdampak negatif terhadap proyek, seperti peraturan pajak, struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi spesifikasi teknis proyek dan menyebabkan perubahan biaya. Berlaku hanya jika kontrak secara eksplisit terhadap dan terikat dengan regulasi/ perundangan yang berlaku (melindungi terhadap perubahan regulasi/ perundangan), dimana lazim bagi PJPK untuk menanggung risiko perubahan regulasi/ perundangan yang bersifat diskriminatif.

4. Wanprestasi

Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindakannya PJPK yang melanggar kontrak, atau merubah kontrak secara sepihak.

5. Integrasi dengan Jaringan

Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindakannya PJPK (atau otoritas yang berwenang) yang mempengaruhi operasional/ pendapatan proyek karena kegagalan (atau tidak memadainya) integrasi dengan jaringan eksisting atau yang direncanakan.

6. Risiko Fasilitas Pesaing

Cakupan terhadap risiko adanya fasilitas/ infrastruktur sejenis yang dibangun dan akan bersaing dengan penyediaan layanan yang diperjanjikan.

In general, the following non-exhaustive list includes some of the risks (stemming from the CA's financial obligation in the PPP Agreement) that can be covered by IIGF:

1. Licenses, permits, and approvals

Coverage for delay or failure to grant licenses, permits, and approvals (delays that would have adverse effects on construction costs, financing charges, and the commencement of revenue).

2. Financial close delay/failure

Coverage for any delay/failure of financial closure due to any other action/inaction on the part of the CA (beyond land and licenses/ permits/approvals).

3. Change in law/regulations

Coverage for impact of change in law/ regulation in event that change in law adversely affects project, such as tax law, law on tariff structure, or law that affects project's technical specifications and results in changes in costs. Applies only if contract is explicit in its basis on and ties with existing law (i.e., protects from changes in law), where it is common for CA to bear the risk of discriminatory change of law.

4. Breach of contract

Coverage for CA's action/inaction in violation of contract, or CA's changing clauses of contract unilaterally.

5. Integration with network

Coverage for actions/inaction that affect project operations/revenue by failure (or inadequate) integration with existing or future networks.

6. Competing facility risk

Coverage for the risk that other similar facility/infrastructure is built which eventually competes with the delivery of the contracted services.

7. Risiko Pendapatan

Cakupan terhadap pemenuhan/penerapan kewajiban PJKP terhadap pendapatan proyek. Cakupan berlaku hanya jika PJKP secara kontraktual menyetujui pembayaran atas layanan infrastruktur/proyek (anuitas/dukungan fiskal terhadap kesenjangan kelayakan/pendapatan minimum).

8. Risiko Permintaan

Cakupan terhadap perubahan, yang ditanggung BU akibat tindakan CA, yang mempengaruhi permintaan layanan proyek.

9. Risiko Harga

Cakupan terhadap pemenuhan tingkat pendapatan yang tidak tercapai akibat perubahan tarif secara sepihak.

10. Risiko Ekspropriasi

Cakupan terhadap tindakan pengambilalihan proyek oleh CA atau otoritas lainnya yang menyebabkan berakhirnya kontrak proyek.

11. Risiko Tidak Dapat dilakukannya Konversi dan Transfer Mata Uang

Cakupan terhadap risiko pendapatan/profit dari proyek tidak dapat dikonversi ke mata uang asing dan/atau tidak dapat direpatriasi ke negara asal investor.

12. Risiko Parastatal atau Sub-nasional

Cakupan terhadap risiko suatu entitas sub-nasional atau parastatal yang bertindak sebagai CA pada suatu proyek yang gagal memenuhi pembayaran kontraktual atau kewajiban materil lainnya (karena keputusan sepihak).

13. Risiko Kahar yang Mempengaruhi PJKP

Cakupan terhadap risiko bahwa suatu kejadian di luar kendali kedua belah pihak (bencana alam atau akibat tindakan manusia) yang akan terjadi dan dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan CA untuk memenuhi kinerja kewajiban kontraktual.

14. Risiko Interface

Cakupan terhadap risiko bahwa metode atau standar layanan sektor publik akan menghambat layanan kontraktual atau sebaliknya. Risiko ini termasuk jika kualitas pekerjaan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan BU.

7. Revenue Risk

Coverage to fulfill/enforce CA's obligations on revenue. Coverage applies only to CA's contractually agreed payments (annuity/viability gap/minimum revenue).

8. Demand Risk

Coverage for change, borne of CA's actions, that have an influence on demand for the project's services.

9. Pricing Risk

Coverage to fulfill level of revenue that was not reached due to unilateral change of tariff.

10. Expropriation Risk

Coverage for takeover by CA or other public agencies causing end of project contract.

11. Currency inconvertibility & non-transfer Risk

Coverage for risk that the revenue/profit from the project could not be converted to the foreign currency and/or repatriated to the investor's home country.

12. Sub-sovereign or Parastatal risk

Coverage for risk that the subsovereign or parastatal entity which act as the CA in the project has failed to perform its contractual payment or other material obligations (i.e. due to unilateral decision).

13. Force Majeure Risk Affecting CA

Coverage for risk that a specified event entirely outside the control of either party (e.g. act of god, man-made catastrophic event) will occur and will result in a delay or default by CA in the performance of its contractual obligations.

14. Interface Risk

Coverage for risk that the method or standard of delivery of the contracted services will prevent or in some way frustrate the delivery of the public sector delivered services or vice versa. The risk includes when the quality of works done by the government does not conform/unsuitable with those done by the PC, vice versa.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Rp **466** Juta Miliion



**Total biaya yang dianggarkan
Perseroan untuk kegiatan
Program Bina Lingkungan di
tahun 2011.**

**Total budget allocated for
the Company's Community
Development Program in 2011.**

Program Tanggung Jawab Perusahaan

Corporate Responsibility Program

PII melakukan rangkaian aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai bagian penting dari keseluruhan upaya untuk menunjang keberlangsungan Perseroan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.

IIGF engages in Corporate Social Responsibility activities as an important part of efforts in support of accomplishing the Company's vision and mission statements.

Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PII wajib berpartisipasi aktif melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Selain itu, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) juga mengacu kepada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Waktu telah diatur dalam beberapa ketentuan, bagi PII CSR bukan hanya menjadi kepatuhan tapi sudah menjadi bagian penting untuk menunjang keberlangsungan perusahaan mencapai visi misinya.

As a State-Owned Enterprise (SOE), IIGF has an obligation to participate and implement its corporate social responsibility commitments through the Partnership Program and Community Development Program (PKBL), as regulated in Law No. 19 /2003 on SOE and in Regulation of State Minister for SOE No. PER-05/MBU/2007 on Partnership Program of SOE with Small Enterprises and Community Development Program. The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs also refers to regulations in Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies. Timeframes have been set or several provisions, for PII, CSR is not just compliance but is an important part of supporting corporate sustainability in achieving the Company's vision and mission.

Program Bina Lingkungan Community Development Program

Aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PII dilakukan di bawah payung Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), dengan sumber dana dari penyisihan laba bersih Perseroan sesuai ketentuan. Mengingat PII masih dalam tahap

Corporate social responsibility activities at IIGF are implemented through the Partnership Program and Community Development program (PKBL), using funds allocated from the Company's net profits as per regulation. As IIGF is still in its early



awal operasi, pelaksanaan PKBL hingga tahun 2011 dilakukan melalui aktivitas yang termasuk ruang lingkup Program Bina Lingkungan.

Untuk memastikan efektivitas Program Bina Lingkungan dalam memberdayakan kondisi sosial komunitas sekitar dan masyarakat umum, PII menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

- Kontribusi untuk masyarakat sejalan dengan arah bisnis Perseroan, sehingga fokus utama tiap program atau kegiatan selalu berkaitan dengan pengembangan infrastruktur serta dilakukan di lokasi sekitar proyek yang ditangani Perseroan.
- Sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberi manfaat maksimal dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- Memberi dampak positif bagi masyarakat dan Perseroan dengan hasil yang dapat diukur.
- Mengandung aspek peningkatan pemahaman tentang infrastruktur melalui lembaga pendidikan.

operational stage, the implementation of PKBL in 2011 was still limited in scope to activities in the Community Development Program.

To ensure effectiveness in improving the social welfare of local communities and society in general, IIGF implements Community Development initiatives on the basis of the following principles:

- Contributing to society in accordance with the Company's business activities, by focusing on infrastructure development-related programs or activities, in areas around the location of the Company's project undertakings.
- Fulfilling the actual needs of recipient communities so as to provide optimum short- and long-term benefits.
- Resulting in measurable positive impact both for the recipient communities and for the Company.
- Supporting increased community knowledge on infrastructure through educational institutions.

Aktivitas di Tahun 2011

Activities in 2011

Pada tahun 2011, aktivitas CSR Perseroan difokuskan pada bidang pendidikan untuk peningkatan kapasitas guru-guru sekolah di wilayah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan lokasi PLTU Jawa Tengah, proyek pertama yang dijamin oleh PII, dan Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai lokasi proyek air minum Bandar Lampung yang ikut difasilitasi oleh PII sebagai model proyek KPS di sektor air. Sedangkan bantuan sarana pendidikan diberikan kepada 14 Sekolah Dasar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

The Company's CSR activities in 2011 were focused on educational support through capacity building initiatives for school teachers in Batang Regency, Central Java Province, which is the location of the Central Java Power Plant as the first infrastructure project underwritten by IIGF, and in Bandar Lampung Township, Lampung Province, which is the location of the Bandar Lampung Potable Water project being processed by IIGF as a PPP model project in the water sector. IIGF also donated teaching facilities for 25 elementary schools located in Batang Regency, Central Java.

Peningkatan Kapasitas Guru Sekolah Dasar

Capacity Building for Elementary School Teachers

Di tahun 2011, PII menyelenggarakan lokakarya untuk guru Sekolah Dasar dengan mengambil tema 'Paradigma Baru dalam Mengajar'. Melalui lokakarya ini para guru didorong melakukan proses belajar mengajar yang 'Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan'. Para guru diharapkan dapat mengembangkan proses pembelajaran sesuai tuntutan perkembangan dan kondisi lokal. Sehingga dalam jangka panjang, guru-guru yang melakukan proses ini akan membuat sekolahnya menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dan dampaknya.

In 2011, IIGF organized a workshop for elementary school teachers with the theme of 'New Paradigm in Teaching'. In the workshop, participant teachers are encouraged to apply a teaching and learning process that is 'Active, Creative, Effective, and Fun'. Participant teachers are then expected to be able to develop learning processes suited to current issues and local conditions. In the long run, the application of these learning processes will lead to a teaching and learning environment in schools that is more receptive to change and its ramifications.

Lokakarya dua hari tersebut dihadiri oleh sekitar 25 guru yang diundang dari sejumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan di Kotamadya Bandar Lampung, Lampung, yang terdiri dari:

The two-day workshop was attended by 25 teachers who were invited from a number of elementary schools in Batang Regency, Central Java, and Bandar Lampung Township, Lampung, as follow:

Kabupaten Batang, Jawa Tengah:

1. SDN Ujung Negro 1
2. SDN Ujung Negro 2
3. SDN Karanggeneng 1
4. SDN Karanggeneng 2
5. SDN Juragan
6. SDN Bakalan
7. SDN Wonokerso 1
8. SDN Wonokerso 2
9. SDN Kenconorejo 1
10. SDN Kenconorejo 2
11. SDN Kenconorejo 3
12. SDN Ponowareng
13. SDN Kedungsegog 1
14. SDN Kedungsegog 2

Batang Regency, Central Java:

1. SDN Ujung Negro 1
2. SDN Ujung Negro 2
3. SDN Karanggeneng 1
4. SDN Karanggeneng 2
5. SDN Juragan
6. SDN Bakalan
7. SDN Wonokerso 1
8. SDN Wonokerso 2
9. SDN Kenconorejo 1
10. SDN Kenconorejo 2
11. SDN Kenconorejo 3
12. SDN Ponowareng
13. SDN Kedungsegog 1
14. SDN Kedungsegog 2



Kotamadya Bandar Lampung, Lampung :

- 15. SDN 1 Palapa
- 16. SDN 1 Perumnas Wayhalim
- 17. SDN 2 Sukaraja
- 18. SD 1 Rawalaut
- 19. SDN 2 Rawalaut

Bandar Lampung Township, Lampung:

- 15. SDN 1 Palapa
- 16. SDN 1 Perumnas Wayhalim
- 17. SDN 2 Sukaraja
- 18. SD 1 Rawalaut
- 19. SDN 2 Rawalaut

Bantuan Sarana Pendidikan

Donation of Teaching Facilities

Pelaksanaan lokakarya untuk peningkatan kapasitas guru tersebut kemudian diikuti dengan program lanjutan bantuan sarana pendidikan berupa perangkat komputer , proyektor dan buku-buku perpustakaan sekolah. Bantuan diserahkan kepada 14 sekolah dasar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang telah mengikuti lokakarya 'Paradigma Baru Dalam Mengajar'. Bantuan ini diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah tersebut untuk meningkatkan wawasan dan kualitas proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas guru maupun anak didik.

Following the workshop on capacity building for teachers, IIGF made a donation of teaching facilities in the form of Personal Computer sets, projectors and books for school libraries. These were donated to the 14 elementary schools in Batang Regency, Central Java, whose teachers had earlier participated in the 'New Paradigm of Teaching' workshop. In this way, IIGF hopes to assist in improving the horizon and quality of teaching and learning environment in the beneficiary schools, which will ultimately help towards improving the quality of teachers and their students.

Total biaya yang dianggarkan Perseroan untuk kegiatan Program Bina Lingkungan di tahun 2011 mencapai sebesar Rp 466 juta.

Total budget allocated for the Company's Community Development Program in 2011 amounted to Rp 466 million.

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

BOC and BOD Letter of Statement

Laporan tahunan berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab manajemen PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing dibawah ini.

Annual report and the accompanying financial statements and related financial information, are the responsibility of the management of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund and have been approved by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners whose signatures appear bellow.

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Freddy Rikson Saragih
Komisaris Utama
President Commissioner



Ayu Sukorini
Komisaris
Commissioners

Direksi Board of Directors



Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director



Yadi J. Ruchandi
Direktur Operasi
Director of Operations



Armand Hermawan
Direktur Keuangan
Director of Finance

Laporan Keuangan

Financial Report

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (Persero)**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2011 DAN 2010/
*31 DECEMBER 2011 AND 2010***

**PERNYATAAN DIREKSI
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (Persero)**

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), kami menyatakan bahwa:

- (a) laporan keuangan Perusahaan menyajikan secara wajar posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan
- (b) laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (Persero)**

In accordance with resolution of the Directors of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company"), in the opinion of the Board of Directors:

- (a) *the financial statements of the Company are drawn up so as to present fairly the financial position as at 31 December 2011 and 2010, and the result of its operations, changes in equity and cash flows for the years then ended; and*
- (b) *the financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*



Sinthya Roesly
Presiden Direktur/*President Director*



Armand Hermawan
Direktur Keuangan/*Finance Director*

JAKARTA
7 March 2012



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta laporan pendapatan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We have audited the accompanying statement of financial position of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") as at 31 December 2011 and 2010, and the related statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2011 and 2010, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA

7 Maret / March 2012

Drs. Haryanto Sahari, CPA

Surat Izin Praktek Akuntan Publik/Licence of Public Accountant No. AP.0223

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statements and the auditor's report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian Financial Accounting Standards and auditing standards, and their application in practice.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran – 1 - Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2011</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2010</u>	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	2,632,388,309	5	2,005,997,131	Cash and cash equivalents
Investasi	1,078,119,828	6	30,000,000	Investments
Piutang	9,837,824	7	8,373,260	Receivables
Piutang lainnya	59,130		-	Other receivables
Biaya dibayar di muka dan uang muka	1,117,579		735,656	Prepaid expenses and advances
Aset tetap	3,344,874	8	2,026,592	Fixed assets
Beban tangguhan	10,494,214	9	5,403,819	Deferred expenses
Aset pajak tangguhan	2,699,782	11c	86,194	Deferred tax asset
Uang jaminan	<u>569,587</u>		<u>298,803</u>	Refundable deposits
JUMLAH ASET	<u>3,738,631,127</u>		<u>2,052,921,455</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	1,379,309	10	1,448,044	Account payables
Utang pajak	1,894,210	11a	76,006	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	8,591,363	12	4,573,354	Accrued expenses, provisions and other payables
Pendapatan tangguhan	22,312,500	13	-	Unearned income
Kewajiban imbalan pasca kerja	<u>665,266</u>	14	<u>227,040</u>	Employee benefit obligation
	<u>34,842,648</u>		<u>6,324,444</u>	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal dasar 4.000.000 lembar, ditempatkan disetor penuh 3.500.000 lembar (2010: 2.000.000 lembar), dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (jumlah penuh) per saham	3,500,000,000	15	2,000,000,000	Share capital - authorised, 4,000,000 shares, issued and fully paid 3,500,000 shares (2010: 2,000,000 shares), with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek tersedia untuk dijual	516,379		-	Unrealised gain from available-for-sale financial assets
Saldo laba Ditentukan penggunaannya	2,300,000	16	-	Retained earnings Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	<u>200,972,100</u>		<u>46,597,011</u>	Unappropriated
	<u>3,703,788,479</u>		<u>2,046,597,011</u>	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>3,738,631,127</u>		<u>2,052,921,455</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 2 - Schedule

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2011</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2010</u>	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan penjaminan				Revenue from guarantee
- Pendapatan provisi dan komisi	45,227,438		-	- Fees and commission
- Pendapatan premi	-		-	- Premium income
Pendapatan pengelolaan dana, kotor	<u>183,121,806</u>		<u>77,107,079</u>	Income from investment, gross
	<u>228,349,244</u>	17	<u>77,107,079</u>	
Beban usaha				Operating expenses
Penjaminan	(13,130,939)	18	(2,105,294)	Guarantee
Administrasi dan umum	(24,627,858)	18	(12,937,467)	General and administrative
Pengembangan	(1,729,954)	18	(792,681)	Development
Penyusutan	(1,280,770)	18	(384,822)	Depreciation
Penghasilan keuangan, kotor	3,748,482		1,166,625	Finance income, gross
(Kerugian)/keuntungan kurs, bersih	(115,866)		82	Foreign exchange (loss)/gain, net
Lain-lain	<u>(81,534)</u>		<u>(14,030)</u>	Others
	<u>37,218,439</u>		<u>15,067,587</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	191,130,805		62,039,492	Profit before income tax
Beban pajak	<u>(33,989,716)</u>	11b	<u>(15,442,481)</u>	Tax expenses
Laba tahun berjalan	157,141,089		46,597,011	Profit for the year
Pendapatan komprehensif lain				Other comprehensive income
- Perubahan bersih aset keuangan tersedia untuk dijual	<u>516,379</u>		<u>-</u>	- Change in fair value of available-for-sale financial assets
Jumlah pendapatan komprehensif	<u>157,657,468</u>		<u>46,597,011</u>	Total comprehensive income

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 3 - Schedule

**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2011 AND 2010**
(Expressed in thousand of Rupiah, unless
otherwise stated)

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang tersedia untuk dijual/ Unrealised gain from available- for-sale financial assets	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah/ Total	
			Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
15	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000	Increase of share capital
Penambahan modal saham						Profit/total comprehensive
Laba/jumlah pendapatan						income for the year
komprehensif tahun berjalan					46,597,011	
Saldo 31 Desember 2010	2,000,000,000	-	-	46,597,011	2,046,597,011	Balance at 31 December 2010
15	1,500,000,000	-	-	-	1,500,000,000	Increase of share capital
Penambahan modal saham						Appropriation retained earnings
Pencadangan saldo laba						Corporate social responsibility
Program kemitraan dan bina			2,300,000	(2,300,000)	-	programme allocated from
lingkungan yang dialokasikan						profit/total comprehensive income
dari laba/jumlah pendapatan						year 2010
tahun 2010						Profit/total comprehensive
Laba/jumlah pendapatan						income for the year
komprehensif tahun berjalan		516,379	-	(466,000)	(466,000)	
					157,657,468	
Saldo 31 Desember 2011	3,500,000,000	516,379	2,300,000	200,972,100	3,703,788,479	Balance at 31 December 2011

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 4 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2011 AND 2010**
(Expressed in thousand of Rupiah, unless
otherwise stated)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Laba sebelum pajak penghasilan	191,130,805	62,039,492	Profit before income tax
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:			Add items not affecting cash flows:
- Beban penyusutan	1,280,770	384,822	- Depreciation
- Beban penyisihan imbalan pasca kerja	<u>438,226</u>	<u>227,040</u>	- Provision for employee benefits obligation
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	<u>192,849,801</u>	<u>62,651,354</u>	Operating cash flows before changes in working capital
Perubahan modal kerja:			Changes in working capital:
- Piutang	(1,464,564)	(8,373,260)	- Account receivables
- Piutang lainnya	(59,130)	-	- Other receivables
- Biaya dibayar di muka dan uang muka	(381,923)	(735,656)	- Prepaid expenses and advances
- Beban tangguhan	(5,090,395)	(5,403,819)	- Deferred expenses
- Utang usaha	(68,735)	1,448,044	- Account payables
- Utang pajak	1,818,204	76,006	- Taxes payable
- Biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain	3,559,244	4,573,354	- Accrued expenses and other payables
- Pendapatan tangguhan	22,312,500	-	- Unearned income
- Pembayaran pajak final	<u>(36,603,304)</u>	<u>(15,528,675)</u>	- Payment for final income tax
	<u>(15,978,103)</u>	<u>(23,944,006)</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>176,871,698</u>	<u>38,707,348</u>	Net cash flow provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penempatan investasi	(1,047,603,449)	(30,000,000)	Placement for investment
Pembelian aset tetap	(2,599,052)	(2,411,414)	Acquisition of fixed assets
Penempatan uang jaminan	<u>(270,784)</u>	<u>(298,803)</u>	Refundable deposit
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(1,050,473,285)</u>	<u>(32,710,217)</u>	Net cash flow used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan modal saham	1,500,000,000	2,000,000,000	Share capital received
Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan	<u>(7,235)</u>	-	Payment for corporate social responsibility programme
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>1,499,992,765</u>	<u>2,000,000,000</u>	Net cash flow provided from financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	626,391,178	2,005,997,131	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	<u>2,005,997,131</u>	-	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>2,632,388,309</u>	<u>2,005,997,131</u>	Cash and cash equivalents at end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam hal memberikan penjaminan pada proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta ("KPS") di bidang infrastruktur.

Perusahaan beroperasi sebagai suatu "single window" sebagai Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk semua penjaminan yang diberikan pemerintah pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis dan struktur penjaminan – yang disokong (*backstop*) oleh, bila diperlukan, neraca Perusahaan, neraca Pemerintah RI, neraca lembaga penjaminan multilateral, atau kombinasinya – untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk:

- a) Sebagai katalisator investasi non-publik dalam bidang infrastruktur di Indonesia dengan memitigasi risiko besar dalam KPSs yang terstruktur dengan baik, terkait atas kepentingan investor;
- b) Meningkatkan kualitas dari KPSs dengan menyediakan sebuah kerangka penilaian yang jelas untuk penjaminan; dan
- c) Melindungi Kewajiban kontijensi Pemerintah Republik Indonesia melalui penjaminan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No.AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010, dated 27 January 2010.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company is engaged to provide the guarantees for the Public Private Partnership ("PPP") projects in the infrastructure sector.

The Company operates as a "single window" for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided to infrastructure projects proposed by the government's Contracting Agencies ("CA"). The Company employs various types and structures of guarantees – back-stopped, as necessary, by the Company balance sheet, the Government of Indonesia ("GOI") balance sheet, the International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD"/"World Bank") Guarantee and Credit Facilities, or a combination thereof – for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

The primary objective of the Company is to:

- a) Help catalyse private investments in infrastructure in Indonesia by mitigating critical risks in well-structured PPP's constraining investors' interest;
- b) Improve the quality of PPP's by establishing a clear appraisal framework for guarantees; and
- c) Ring-fence GOI's liability vis-à-vis guarantees

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/2 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2010.

Pada 31 Desember 2011 and 2010, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

2011/2010

Komisaris Utama	Freddy Rikson Saragih	President Commissioner
Komisaris	Ayu Sukorini	Commissioner
Direktur Utama	Sinthya Roesly	President Director
Direktur	Armand Hermawan Yadi Jaya Ruchandi	Directors

Pada 31 Desember 2011, Perusahaan memiliki 36 tenaga kerja (2010: 18 tenaga kerja).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Perusahaan disusun oleh Direksi dan diselesaikan pada tanggal 7 Maret 2012.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

The Company is domiciled in Indonesia, its office is located at Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

As at 31 December 2011 and 2010, the members of the Company's Board of Commissioners and Directors were as follows:

As at 31 December 2011, the Company had 36 manpower (2010: 18 manpower).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

These financial statements were prepared by the Directors and completed on 7 March 2012.

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the Company's financial statements, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah which is the Company's functional currency. The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang saat perolehan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) baru dan revisi yang efektif pada tahun 2011. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

PSAK No. 1 (revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan"

Standar yang direvisi melarang penyajian penghasilan dan beban (yakni "perubahan ekuitas nonpemilik") dalam laporan perubahan ekuitas, mengharuskan "perubahan ekuitas nonpemilik" disajikan terpisah dari perubahan ekuitas pemilik. Seluruh "perubahan ekuitas nonpemilik" disajikan dalam suatu laporan kinerja.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**a. Basis of preparation of the financial statements (continued)**

The cash flows statement is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, and short-term investment with original maturities of three months or less.

Figures in the financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

Changes to the statement of financial accounting standards and interpretation of the statement of financial accounting standards

On 1 January 2011, the Company adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that were mandatory for application from that date. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

SFAS No. 1 (revised 2009), "Presentation of Financial Statements"

The revised standard prohibits the presentation of items of income and expense (that is "non-owner changes in equity") in the statement of changes in equity, requiring "non-owner changes in equity" to be presented separately from owner changes in equity. All "non-owner changes in equity" are required to be shown in a performance statement.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)****a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)****Standar akuntansi baru**

Entitas dapat memilih untuk menyajikan satu laporan kinerja (laporan pendapatan komprehensif) atau dua laporan (laporan laba rugi dan laporan pendapatan komprehensif). Seluruh penghasilan dan beban disajikan sebagai bagian aktivitas normal entitas.

Perusahaan memilih menyajikan satu laporan. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar.

Penerapan dari standard dan interpretasi baru/revisi berikut, tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan efek material terhadap laporan keuangan untuk periode sekarang ataupun sebelumnya:

- PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas"
- PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi"
- PSAK No. 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan"
- PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan"
- PSAK No. 25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)****a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)****New accounting standards**

Entities can choose whether to present one performance statement (the statement of comprehensive income) or two statements (the income statement and statement of comprehensive income). All items of income or expenses are to be presented as arising from the entity's ordinary activities.

The Company has elected to present one statement. The financial statements have been prepared under the revised disclosure requirements.

The adoption of these new and revised standards and interpretations did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effects on the amounts reported for the current or prior financial periods:

- SFAS No. 2 (Revised 2009), "Statement of Cash Flows"
- SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures"
- SFAS No. 8 (Revised 2010), "Events after the Reporting Period"
- SFAS No. 23 (Revised 2010), "Revenue"
- SFAS No. 25 (Revised 2009), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
- SFAS No. 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets"
- SFAS No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)****a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)****Standar akuntansi baru (lanjutan)**

Pencabutan standar dan interpretasi ini tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- PSAK 21, "Akuntansi Ekuitas"
- ISAK 1, "Penentuan Harga Pasar Dividen"

Standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi telah diterbitkan dan diwajibkan untuk tahun yang dimulai sejak atau setelah 1 Januari 2012:

- PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"
- PSAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja"
- PSAK 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan"
- PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK 15 – PSAK 24, "Batasan Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya"
- ISAK 20, "Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham"
- ISAK 23, "Sewa Operasi – Insentif"

Pencabutan standar akuntansi dan interpretasi berikut ini telah diterbitkan dan diwajibkan untuk tahun yang dimulai sejak atau setelah 1 Januari 2012:

- PSAK 11, "Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing"
- PSAK 52, "Mata Uang Pelaporan"
- ISAK 4, "Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs"

Perusahaan masih menganalisa dampak standar dan interpretasi baru/revisi serta pencabutan standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)****a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)****New accounting standards (continued)**

The withdrawals of these standards and interpretations did not result in significant changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial year:

- SFAS 21, "Equity Accounting"
- ISFAS 1, "Determining Market Price of Dividend"

The following new and revised accounting standards and interpretations have been published and are mandatory for financial years beginning on or after 1 January 2012:

- SFAS 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"
- SFAS 24 (Revised 2010), "Employee Benefits"
- SFAS 46 (Revised 2010), "Income Taxes"
- SFAS 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation"
- SFAS 60, "Financial Instruments: Disclosures"
- ISFAS 15 – SFAS 24, "The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction"
- ISFAS 20, "Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders"
- ISFAS 23, "Operating Leases Incentives"

The following withdrawals of accounting standards and interpretations have been published and are mandatory for financial years beginning on or after 1 January 2012:

- SFAS 11, "Translation of Financial Statements in Foreign Currencies"
- SFAS 52, "Reporting Currencies"
- ISFAS 4, "Allowable Alternative Treatment of Foreign Exchange Differences"

The Company is still assessing the impact of these new or revised SFAS and ISFAS and withdrawals of those standards and interpretations on the financial statements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan likuiditas tinggi dengan masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

d. Aset keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori sebagai berikut: pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan ini pada saat awal pengakuannya.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the exchange rate prevailing at that date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less.

d. Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivable, held-to-maturity investments, or available-for sale, as appropriate. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

- (i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading which is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term. The Company has no financial assets that are classified as held for trading.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/7 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

d. Aset keuangan (lanjutan)

d. Financial assets (continued)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

(ii) Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivative dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset lancar kecuali dengan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Keuntungan dan kerugian diakui di laporan keuangan ketika aset keuangan ini dihentikan pengakuannya atau terdapat penurunan nilai, juga melalui proses amortisasi. Kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka dan *security deposit* diklasifikasikan dalam kategori ini.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. They are classified as current assets except for maturities greater than 12 months after the balance sheet date. These are classified as non-current assets. Gains and losses are recognised in the statement of income when the loans and receivables are derecognised or impaired, as well as through the amortisation process. The Company's cash and cash equivalents, investment in time deposits and security deposits are classified in this category.

(iii) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

(iii) Held-to-Maturity ("HTM") investments

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta management mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Investasi pada obligasi tertentu di klasifikasikan dalam kategori ini.

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that management has the positive intention and ability to hold them to maturity. These are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method. The Company's investment in certain bonds is classified in this category.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/8 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

d. Aset keuangan (lanjutan)

d. Financial assets (continued)

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual

(iv) Available-for-Sale ("AFS") financial assets

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, dan tidak diklasifikasikan dalam tiga kelompok sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi pada obligasi tertentu di klasifikasikan dalam kategori ini.

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rate, exchange rate or which are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in stockholders' equity until the financial assets are derecognised. The Company's investment in certain bonds is classified in this category.

e. Aset tetap dan penyusutan

e. Fixed assets and depreciation

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives:

	<u>Tahun/Years</u>	
Prasarana kantor	3	Leasehold improvement
Peralatan komputer	3	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	3	Office equipments, furnitures and fixtures

Nilai residu dan umur manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap tanggal neraca.

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each balance sheet date.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/9 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

e. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

**e. Fixed assets and depreciation
(continued)**

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the income statement during the financial period in which they are incurred.

Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada akhir tahun. Jika indikasi tersebut terjadi, Perusahaan memperkirakan kembali nilai perolehan aset tersebut dan mengakui penurunan nilai aset sebagai beban dalam laporan laba rugi.

The Company conducts a review to determine whether there is any indication of asset value impairment at the end of the year. If any such indications exist, the Company estimates the recoverable amount of their assets and recognises the impairment in asset values as an expense in the statement of income.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the statements of income.

f. Perpajakan

f. Taxation

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode kewajiban, untuk semua akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan kewajiban atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan Undang-Undang) yang telah diberlakukan pada tanggal neraca dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau kewajiban pajak tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is provided in full using the balance sheet liability method, for all temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the balance sheet date and are expected to apply when the related deferred income tax is realised or the deferred income tax liability is settled.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)****AKUNTANSI****2. SUMMARY OF
ACCOUNTING POLICIES (continued)****f. Perpajakan (lanjutan)**

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat ketika surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan/ banding, ketika hasil keberatan/banding diputuskan.

g. Kewajiban imbalan kerja**Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan kewajiban imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari kewajiban imbalan pensiun.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal neraca dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

f. Taxation (continued)

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

g. Employee benefits obligation**Short-term employee benefits**

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.

Pension benefits

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in Law No.13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the balance sheet in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past services cost. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/11 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

g. Kewajiban imbalan kerja (lanjutan)

**g. Employee benefits obligation
(continued)**

Imbalan pension (lanjutan)

Pension benefits (continued)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial yang jumlahnya lebih besar dari 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan tersebut.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions when exceeding 10% of defined benefit or 10% of fair value of the programme's asset are charged or credited to income over the average remaining service lives of the relevant employees.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mensyaratkan karyawan tersebut untuk bekerja selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode tersebut.

Past-service costs are recognised immediately in the statements of income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees' vesting period. In this case, the past-service costs are amortised on a straight-line basis over the vesting period.

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Current service costs are expensed in the prevailing period.

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Perusahaan memberikan manfaat imbalan cuti panjang. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan kepada karyawan yang bekerja hingga mencapai masa waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perusahaan. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode akuntansi yang pada dasarnya sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasca-kerja lainnya. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang berkualifikasi.

The Company provides long service leave. The entitlement to this benefit is usually based on the completion of a certain service period by the employee in accordance with the Company's regulations. The estimated costs of these benefits are recognised over the period of employment, using an accounting method similar to that for other post-employment benefits. These obligations are valued annually by an independent qualified actuary.

h. Utang usaha dan lain-lain

h. Account and other payables

Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Pt PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/12 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Penyisihan

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya, dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

j. Pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, dan pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

(i) *Guarantee fee* dibebankan karena jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan exposure oleh perusahaan.

(ii) *Processing fee* dibebankan karena adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *arranging fee*, *ceded commission*, dan pendapatan provisi dan komisi lainnya. *Arranging fee* terdiri dari bagian yang dapat dikembalikan dan bagian yang tidak dapat dikembalikan. Pendapatan dari bagian yang tidak dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat kontrak penjaminan ditandatangani; sementara pendapatan dari bagian yang dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat proyek dimulai (*financial close*); terlepas dari kelangsungan penjaminan proyek itu sendiri di masa yang akan datang. *Ceded commission* adalah pendapatan dari peningkatan struktur penjaminan yang dilakukan dengan pihak penjamin lain. Pendapatan dari *ceded commission* dan fees dan pendapatan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.

j. Revenue and expenses

Revenue from guarantee consists of premium income; and fees and commissions.

Premium income consists of *guarantee fee* and *processing fee*. Revenue from *guarantee fee* is recognised based on the duration of *guarantee period* depending on the arrangement in the contract. Revenue from *processing fee* is recognised when earned.

(i) *Guarantee fee* is charged due to the guarantee provided to the beneficiaries on the basis of *guarantee exposure* of the company.

(ii) *Processing fee* is charged due to process activity if the claim is delivered to the guarantor.

Fees and commissions consist of *arranging fee*, *ceded commission*, and other fees and commissions. *Arranging fee* consists of a refundable and non-refundable fee portion. Revenue from a non-refundable portion of *arranging fee* is recognised upon signing of the *guarantee contracts*; while revenue from a refundable portion of *arranging fee* is recognised upon the commencement of the project (*financial close*); regardless the continuance of the *guarantee projects* itself in the future. *Ceded commission* is revenue from the enhancement of *guarantee structure* with other *guarantee/insurance parties*. Revenue from *ceded commission* and other fees and commissions is recognised when earned.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/13 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari pendapatan bunga dan investasi pendapatan tetap diakui pada saat diperoleh.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

k. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (revisi 2010), tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan dalam catatan pada laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Revenue and expenses (continued)

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised when earned.

Expenses are recognised on an accrual basis.

k. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor risiko keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

(1) Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena kebanyakan transaksi Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk factors

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

(1) Market risk

(i) Foreign currency exchange rate risk

The Company has no significant foreign exchange risks since most of the Company's transactions are performed using the Company's functional currency.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)****(1) Risiko pasar (lanjutan)****(ii) Risiko suku bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur Perusahaan pada fluktuasi suku bunga pasar terutama timbul dari kas dan setara kas. Perusahaan memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan risiko suku bunga Perusahaan sesuai dengan pasar. Informasi mengenai suku bunga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

(2) Risiko kredit

Perusahaan tidak mempunyai risiko kredit yang signifikan karena dalam tahun berjalan piutang perusahaan dominan berasal dari pendapatan bunga dari penempatan deposito.

(3) Risiko likuiditas

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan.

b. Manajemen risiko modal

Tujuan perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**a. Financial risk factors (continued)****(1) Market risk (continued)****(ii) Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company's exposure to interest rate risk arises primarily from cash and cash equivalents. The Company monitors the changes in market interest rates to ensure that the Company's interest rates are in line with the market. Information relating to interest rates is disclosed in the notes to the financial statements.

(2) Credit risk

The Company has no significant credit risk because in the current year the Company's receivables predominantly arise from interest income from placement of time deposits.

(3) Liquidity risk

The Company has no significant liquidity risk.

b. Capital risk management

The Company's objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Manajemen risiko modal (lanjutan)**

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

c. Estimasi nilai wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan kewajiban keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya dikarenakan jatuh temponya dalam jangka pendek atau dikarenakan instrumen keuangan tersebut dikenakan tingkat suku bunga pasar.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING**

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Kewajiban imbalan kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan sejumlah asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban imbalan kerja.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**b. Capital risk management (continued)**

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

c. Fair value estimation

Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Employee benefits obligation

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/16 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

Asumsi penting lainnya untuk kewajiban imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Penyusutan aset tetap

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap. Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukkan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investment returns.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

Depreciation of fixed assets

Management determines the estimated useful lives and related depreciation charges for the fixed assets. Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write off or write down technically obsolete assets or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Kas	81,955	173,720	Cash on hand
Bank	8,675,870	1,003,969,565	Cash in banks
Deposito	<u>2,623,630,484</u>	<u>1,001,853,846</u>	Time deposit
	<u>2,632,388,309</u>	<u>2,005,997,131</u>	

Deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang saat perolehan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 8,50% - 9,25% per tahun di 2011 (2010: 7,00% - 10,00%).

Time deposits with original maturities of three months or less earned interest rates ranging between 8.50% - 9.25% per annum in 2011 (2010: 7.00% - 10.00%).

6. INVESTASI

6. INVESTMENTS

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Deposito	760,082,346	-	Time deposits
Investasi dengan pendapatan tetap			Fixed Income
- Investasi tersedia untuk dijual	100,516,379	-	- Available-for-sale investments
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo	<u>217,521,103</u>	<u>30,000,000</u>	- Held-to-maturity investments
	<u>1,078,119,828</u>	<u>30,000,000</u>	

a) Deposito

Deposito dengan periode jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 9,00% - 10,00% per tahun di 2011.

a) Time deposits

Time deposits with more than 3 months and up to 6 months maturities period and earned interest rates ranging between 9.00% - 10.00% per annum in 2011.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/17 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

6. INVESTMENTS (continued)

b) Inventasi dengan pendapatan tetap

b) Fixed Income

- Investasi tersedia untuk dijual

- Available-for-sale investments

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Saldo awal	-	-	<i>Beginning balance</i>
Penempatan investasi	100,000,000	-	<i>Placement of investment</i>
Penjualan investasi	-	-	<i>Sales of investment</i>
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual	<u>516,379</u>	<u>-</u>	<i>Unrealised gain on available for sales financial assets</i>
	<u>100,516,379</u>	<u>-</u>	

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

- Held-to-maturity investments

Investasi pada obligasi dengan periode jatuh tempo 5 tahun dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 9,60% - 9,70% per tahun.

Investment in bonds with 5 years maturities and earned interest rates ranging between 9.60% - 9.70% per annum.

7. PIUTANG USAHA

7. ACCOUNT RECEIVABLES

Piutang usaha merupakan piutang atas pendapatan bunga deposito dan obligasi yang belum diterima.

Account receivables mainly represent interest from time deposits and bonds.

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

	<u>2011</u>				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pelepasan/ Disposals</u>	<u>Reklasifikasi Reclassification</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>
Harga perolehan :					Acquisition cost:
Prasarana kantor	1,370,668	2,150,903	-	-	3,521,571 <i>Leasehold improvement</i>
Peralatan komputer	14,108	228,945	-	-	243,053 <i>Computer equipments</i>
Peralatan kantor, furnitur dan perlengkapan	<u>1,026,638</u>	<u>219,204</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,245,842</u> <i>Office equipments, furnitures and fixtures</i>
	<u>2,411,414</u>	<u>2,599,052</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,010,466</u> ✓
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(190,371)	(917,152)	-	-	(1,107,523) <i>Leasehold improvement</i>
Peralatan komputer	(588)	(12,042)	-	-	(12,630) <i>Computer equipments</i>
Peralatan kantor, furnitur dan perlengkapan	<u>(193,863)</u>	<u>(351,576)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(545,439)</u> <i>Office equipments, furnitures and fixtures</i>
	<u>(384,822)</u>	<u>(1,280,770)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,665,592)</u>
Nilai buku	<u>2,026,592</u>				<u>3,344,874</u> Net book value

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/18 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

	2010				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pelepasan/ Disposals</u>	<u>Reklasifikasi Reclassification</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>
Harga perolehan :					
Prasarana kantor	-	1,370,668	-	-	1,370,668
Peralatan komputer	-	14,108	-	-	14,108
Peralatan kantor, furnitur dan perlengkapan	-	1,026,638	-	-	1,026,638
	-	2,411,414	-	-	2,411,414
Akumulasi penyusutan:					
Prasarana kantor	-	(190,371)	-	-	(190,371)
Peralatan komputer	-	(588)	-	-	(588)
Peralatan kantor, furnitur dan perlengkapan	-	(193,863)	-	-	(193,863)
	-	(384,822)	-	-	(384,822)
Nilai buku	<u>-</u>				<u>2,026,592</u>

Acquisition cost:
Leasehold improvement
Computer equipments
Office equipments, furnitures and fixtures

Accumulated depreciation:
Leasehold improvement
Computer equipments
Office equipments, furnitures and fixtures

Net book value

9. BEBAN TANGGUHAN

Beban tangguhan terutama merupakan biaya *advisory* yang berhubungan dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

9. DEFERRED EXPENSES

Deferred expenses mainly represent advisory costs related to the processing and arranging activities in obtaining long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

10. UTANG USAHA

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan provisi penjaminan.

10. ACCOUNT PAYABLES

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee provision.

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Utang pajak

a. Taxes payable

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Pajak penghasilan:		
- Pasal 21	1,118,427	1,527
- Pasal 23 dan 4(2)	526,477	74,479
- Pajak Pertambahan Nilai	249,306	-
	<u>1,894,210</u>	<u>76,006</u>

Income tax:
Article 21 -
Article 23 and 4(2) -
Value Added Tax -

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/19 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

b. Beban/(manfaat) pajak penghasilan

b. Income tax expense/(benefit)

Beban/(manfaat) pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

Tax expenses/(benefit) of the Company consist of the following:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pajak penghasilan final	(36,603,304)	(15,528,675)	<i>Final income tax</i>
Pajak kini	-	-	<i>Current tax</i>
Manfaat pajak tangguhan	<u>2,613,588</u>	<u>86,194</u>	<i>Deferred tax benefit</i>
	<u>(33,989,716)</u>	<u>(15,442,481)</u>	

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>191,130,805</u>	<u>62,039,492</u>	<i>Profit before income tax</i>
Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	47,782,701	15,509,873	<i>Tax calculated at applicable tax rate</i>
Pengaruh atas:			<i>Effects of:</i>
- Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	(46,717,572)	(19,568,426)	<i>- Revenues subjected to final income tax</i>
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan	141,827	151,815	<i>- Non-deductible expenses</i>
- Pengakuan rugi pajak tahun lalu	<u>(3,820,544)</u>	<u>-</u>	<i>- Recognition of prior year tax loss</i>
	(2,613,588)	(3,906,738)	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Aset pajak tangguhan dari rugi pajak yang tidak diakui	<u>-</u>	<u>3,820,544</u>	<i>Unrecognise deferred tax asset from tax loss carry forward</i>
	(2,613,588)	(86,194)	
Pajak penghasilan final	<u>36,603,304</u>	<u>15,528,675</u>	<i>Final income tax</i>
Beban pajak penghasilan	<u>33,989,716</u>	<u>15,442,481</u>	<i>Income tax expenses</i>

c. Aset pajak tangguhan

c. Deferred tax asset

	<u>1 Januari/ January 2011</u>	<u>Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statements of income</u>	<u>31 Desember/ December 2011</u>	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	-	1,573,033	1,573,033	<i>Tax loss carry forward</i>
Penyisihan bonus	-	914,453	914,453	<i>Provision for bonus</i>
Beban penyisihan imbalan pasca kerja	56,760	109,547	166,307	<i>Provision for employee benefits obligation</i>
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	<u>29,434</u>	<u>16,555</u>	<u>45,989</u>	<i>Differences between accounting and tax fixed assets net book value</i>
	<u>86,194</u>	<u>2,613,588</u>	<u>2,699,782</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/20 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

c. Deferred tax asset (continued)

	1 Januari/ January 2010	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statements of income	31 Desember/ December 2010	
Beban penyesuaian imbalan pasca kerja	-	56,760	56,760	Provision for employee benefits obligation
Perbedaan antara accounting dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	-	29,434	29,434	Differences between accounting and tax fixed assets net book value
	<u>-</u>	<u>86,194</u>	<u>86,194</u>	

d. Administrasi pajak di Indonesia

d. Tax administration in Indonesia

Menurut Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau sampai akhir tahun 2013, mana yang lebih dahulu

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. Prior to 2008, the Director General of Tax ("DGT") could assess or amend taxes within ten years of the tax becoming due, or until the end of 2013, whichever is earlier.

Undang-undang juga mengatur untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

There are new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

12. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN

12. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND OTHER PAYABLES

	2011	2010	
Beban <i>advisory</i>	3,529,233	3,459,291	Advisory fees
Bonus dan gaji	3,935,536	823,460	Bonus and salary
Program kemitraan dan bina lingkungan	458,765	-	Corporate social responsibility programme
Lainnya	667,829	290,603	Others
	<u>8,591,363</u>	<u>4,573,354</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/21 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PENDAPATAN TANGGUHAN

Pendapatan tangguhan merupakan bagian dari *arranging fee* yang dapat dikembalikan dan akan diakui pada saat proyek dimulai (*financial close*).

13. UNEARNED INCOME

Unearned income represents a portion from a refundable arranging fee and will be recognised upon the commencement of the project (financial close).

14. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

Kewajiban imbalan pasca kerja diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

14. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Employee benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Nilai saat ini dari kewajiban imbalan pasca kerja	904,321	227,040	<i>Present value of defined obligation</i>
Kerugian aktuarial yang belum diakui	<u>(239,055)</u>	<u>-</u>	<i>Unrecognised actuarial loss</i>
	<u>665,266</u>	<u>227,040</u>	

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense recognised in profit or loss is as follows:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Biaya jasa kini	417,313	227,040	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	<u>20,913</u>	<u>-</u>	<i>Interest cost</i>
	<u>438,226</u>	<u>227,040</u>	

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2011 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, Aktuaris independen pada Laporan bertanggal 29 Februari 2012 menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The employee benefits obligation as of 31 December 2011 is computed by PT Towers Watson Purbajaga, an Independent Actuary whose report dated 29 February 2012 using the "Projected Unit Credit" method used the following assumptions:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Tingkat diskonto	6.75%	9.25%	<i>Present value of defined</i>
Tingkat kenaikan gaji	8%	8%	<i>Salary increment rate</i>
Tingkat mortalita	TMI '99	TMI '99	<i>Mortality rate</i>
Usia pensiun normal	55	55	<i>Retirement age</i>

Pergerakan pada kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Saldo awal tahun	227,040	-	<i>Balance at the beginning of the year</i>
Provisi pada tahun berjalan	<u>438,226</u>	<u>227,040</u>	<i>Provision in the current year</i>
	<u>665,266</u>	<u>227,040</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/22 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

15. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

15. SHARE CAPITAL

The composition of Company shareholders as at 31 December 2011 and 2010 is as follows:

	2011			
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Kepemilikan/ <i>Ownership (%)</i>	Nilai/ <i>Value</i>	
Pemerintah Republik Indonesia	3,500,000	100	3,500,000,000	Government of the Republic of Indonesia
	2010			
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Kepemilikan/ <i>Ownership (%)</i>	Nilai/ <i>Value</i>	
Pemerintah Republik Indonesia	2,000,000	100	2,000,000,000	Government of the Republic of Indonesia

Pada tanggal 30 Desember 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1,5 triliun.

As at 30 December 2011, in accordance with Government Regulation No. 55 Year 2011 regarding addition of Share Capital of the Government of Indonesia into share capital of the Company, share capital has increased by amounting to Rp 1.5 trillion.

Sebelumnya, modal saham telah disetorkan terdahulu dalam dua tahap, Pertama pada 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1 triliun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Dan yang kedua pada 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1 triliun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan.

Prior to that, the share capital was paid-in in two stages, the first on 31 December 2009 amounted to Rp. 1 trillion, based on Government Regulation No. 35 Year 2009 regarding Share Capital of the Government of the Republic of Indonesia for establishment of a company (Persero) in the infrastructure sector. The second on 31 December 2010 amounted to Rp. 1 trillion, based on Government Regulation No. 88 Year 2010 regarding addition of Share Capital of the Government of Indonesia into share capital of the Company.

16. SALDO LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DAN ALOKASI UNTUK PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

16. APPROPRIATED RETAINED EARNING AND ALLOCATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMME

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan telah mempunyai saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 2.300.000 atau 0,07% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Agustus 2011. Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

As of 31 December 2011, the Company has made appropriation of retained earnings, amounting to Rp 2,300,000 or 0.07% of the issued and paid-up capital. This general reserve was approved in the Annual General Meeting of Shareholders dated 11 August 2011. Management intends to increase the general reserve in the future.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/23 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**16. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGUNAANNYA DAN ALOKASI UNTUK
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan mengalokasikan laba/jumlah pendapatan tahun 2010 sebesar Rp 466.000 untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Alokasi tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Agustus 2011.

**16. APPROPRIATED RETAINED EARNING
AND ALLOCATION FOR CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMME
(continued)**

As of 31 December 2011, the Company has allocated profit/total comprehensive income year 2010 amounting to Rp 466,000 for corporate social responsibility programme. This allocation was approved in the Annual General Meeting of Shareholders dated 11 August 2011.

17. PENDAPATAN

17. REVENUES

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pendapatan provisi dan komisi	45,227,438	-	<i>Fees and commission</i>
Deposito	172,032,602	75,655,675	<i>Time deposit</i>
Investasi dengan pendapatan tetap	11,089,204	1,451,404	<i>Fixed income</i>
	<u>228,349,244</u>	<u>77,107,079</u>	

18. BEBAN USAHA

18. OPERATING EXPENSES

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Penjaminan:			Guarantee:
- Pegawai	9,356,131	2,041,215	- Employee cost
- Konsultan	2,668,955	-	- Consultancy
- Perjalanan dinas	891,449	38,182	- Travelling
- Rapat dan konferensi	214,404	25,897	- Meeting and conference
	<u>13,130,939</u>	<u>2,105,294</u>	
Pengembangan:			Development:
- Loka-karya	1,290,446	406,737	- Workshop
- Iklan dan promosi	335,333	98,375	- Advertising and promotion
- Representasi	104,175	287,569	- Representation
	<u>1,729,954</u>	<u>792,681</u>	
Administrasi dan umum:			General and administrative:
- Pegawai	13,719,889	7,786,508	- Employee cost
- Jasa profesional	3,040,832	2,431,104	- Profesional fees
- Sewa	2,219,088	911,101	- Rent
- Perjalanan dinas	2,747,326	522,214	- Travelling
- Perlengkapan kantor	912,966	668,494	- Office equipment
- Rapat dan konferensi	691,272	61,321	- Meeting and conference
- Outsourcing	309,847	182,453	- Outsourcing
- Pelatihan	194,318	51,195	- Training
- Komunikasi	189,833	160,999	- Communication
- Transportasi	121,060	95,647	- Transportation
- Lainnya	481,427	66,431	- Others
	<u>24,627,858</u>	<u>12,937,467</u>	
Penyusutan	<u>1,280,770</u>	<u>384,822</u>	<i>Depreciation</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/24 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

19. INFORMASI SIGNIFIKAN	PIHAK	ISTIMEWA	YANG	19. SIGNIFICANT INFORMATION	RELATED	PARTY
Sifat pihak berelasi				Nature of relationship		
a.	Pemerintah Republik Indonesia		adalah pemegang saham Perusahaan.	a.	The government of the Republic of Indonesia	is a shareholder of the Company.
b.	Direksi		adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahannya dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.	b.	The directors	are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.
c.	Bank dan Badan Usaha Milik Negara		merupakan entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.	c.	Banks and state-owned enterprise	are entities under common controls where the Company places its investment in time deposits and bonds.
Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:				In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:		
a.	Perusahaan		menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:	a.	The Company	invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investment income from related parties is as follows:
				2011		2010
-	Bank Syariah Mandiri		32,057,336	-	Bank Syariah Mandiri	
-	Bank Jabar Banten		16,065,589	-	Bank Jabar Banten	
-	PT BPD Sumatera Utara		14,812,483	-	PT BPD Sumatera Utara	
-	Bank Tabungan Negara		11,800,597	-	Bank Tabungan Negara	
-	Bank Rakyat Indonesia		4,206,104	-	Bank Rakyat Indonesia	
-	PT Pembangkit Listrik Negara		1,655,708	-	PT Pembangkit Listrik Negara	
-	Sukuk Ritel SR003		1,605,935	-	Sukuk Ritel SR003	
-	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		1,456,097	-	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
-	Bank Mandiri		624,410	-	Bank Mandiri	
-	Sukuk IFR06		479,882	-	Sukuk IFR06	
-	PT Jasamarga		201,178	-	PT Jasamarga	
-	PT Indosat		21,196	-	PT Indosat	
-	Bank Negara Indonesia		-	-	Bank Negara Indonesia	
				84,986,515		61,605,779
Persentase terhadap jumlah Pendapatan				37.22%		79.90%
				Percentage of total revenue		
b.	Perusahaan		memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah tersebut adalah sebesar Rp 8.232.851 dan Rp 4.580.976 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010, dan mencerminkan 21,85% dan 30,40% dari jumlah beban operasi setiap tahunnya.	b.	The Company	provides remuneration and facilities to support the operational duties of their Board of Commissioners and Directors. The total of such benefits amounted to Rp 8,232,851 and Rp 4,580,976 for the year ended December 31, 2010 and 2011, representing 21.85% and 30.40% of the total expenses for each year.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/25 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian sewa kantor dengan PT Buana Sakti

Pada tanggal 20 April 2010 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Buana Sakti. Periode sewa adalah untuk tiga (3) tahun dimulai dari 12 April 2010 dan berakhir pada 11 April 2013. Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Buana Sakti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dilakukan di muka. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti dan saluran telepon yang ditahan oleh PT Buana Sakti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

Perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Perusahaan, sebagai Penjamin, menyetujui untuk menjamin, beberapa hal yang tercantum di dalam perjanjian penjaminan sesuai dengan pasal 1837 dari Indonesian Civil Code, sesuai porsi masing-masing atas kewajiban keuangan tertentu dari PLN, sebagai Manajer proyek dari Central Java Coal Fired Steam Power Plant, kepada Bhimasena, sebagai entitas bisnis yang diberikan hak untuk mengimplementasikan proyek tersebut.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima fee tertentu (arranging fee, front-end fee, processing fee dan guarantee fee) dari Bhimasena sejak ditandatanganinya perjanjian sampai 20 tahun kedepan masa penjaminan ketika kondisi-kondisi tertentu telah dipenuhi.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 2010

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

20. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Rent office agreement with PT Buana Sakti

On 20 April 2010, the Company entered into a lease agreement with PT Buana Sakti. The lease period is for three (3) years starting from 12 April 2010 and expires on 11 April 2013. This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Buana Sakti. Payment for the full amount of rent and service charges was made in advance. In addition, the Company also paid in advance for security and the telephone line deposit, which is held by the PT Buana Sakti without liability to the Company for interest. All, security and telephone line deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

Guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia

On 6th October 2011, the Company entered into a guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") and PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") where the Company and the Government, as the Guarantors, have agreed to guarantee, on a several basis which is stated in the guarantee agreement in accordance with Article 1837 of the Indonesian Civil Code, their respective portions of the financial obligation of PLN, the Cooperation project Manager of the Central Java Coal Fired Steam Power Plant (the "Project"), to Bhimasena as the business entity which has been awarded the right to implement the Project.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received certain fees (arranging fee, front-end fee, processing fee and guarantee fee) from Bhimasena at the signing date for the next 20 years of the guarantee period when certain conditions are met.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/26 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**21. KEWAJIBAN
KOMITMEN**

KONTINJENSI

DAN

**21. CONTINGENT LIABILITIES AND CAPITAL
COMMITMENTS**

Perusahaan tidak memiliki kewajiban kontinjensi dan komitmen per 31 Desember 2011 dan 2010.

The Company has no contingent liabilities and capital commitment as at 31 December 2011 and 2010.

22. REKLASIFIKASI

22. RECLASSIFICATION

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Certain accounts in the financial statement for the year ended 31 December 2010 have been reclassified to conform with the presentation of accounts of the financial statements for the year ended 31 December 2011, as follows:

	<u>Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Setelah reklasifikasi/ After reclassification</u>	
Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010:				Statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2010:
Pendapatan pengelolaan dana	61,685,663	15,421,416	77,107,079	<i>Income from investment</i>
Pendapatan bunga	1,059,366	107,259	1,166,625	<i>Interest income</i>
Beban pajak	86,194	(15,528,675)	(15,442,481)	<i>Tax expenses</i>
Laporan posisi keuangan 31 Desember 2010:				Statement of financial position as at 31 December 2010:
Kas dan setara kas	1,004,143,285	1,001,853,846	2,005,997,131	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi	1,031,853,846	(1,001,853,846)	30,000,000	<i>Investment</i>
Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010:				Statement of cash flow for year ended 31 December 2010:
Penempatan investasi	(1,031,853,846)	1,001,853,846	(30,000,000)	<i>Cash placement for investment</i>
Kenaikan bersih kas dan setara kas	1,004,143,285	1,001,853,846	2,005,997,131	<i>Net increase in cash and cash equivalents</i>

23. TRANSAKSI NON-KAS

23. NON-CASH TRANSACTIONS

Informasi tambahan terkait laporan arus kas yang merupakan transaksi non-kas adalah sebagai berikut:

Supplemental cash flow information related to non-cash transactions is as follows:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pencadangan saldo laba	2,300,000	-	<i>Appropriation retained earnings</i>
Perubahan nilai pasar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	516,379	-	<i>Changes in fair value of financial assets available for sale</i>
Program kemitraan dan bina lingkungan	(458,765)	-	<i>Corporate social responsibility</i>

**PROGRAM KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN/ *PARTNERSHIP
AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM* –
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(Persero)**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENT***

**31 Desember 2011/
*31 December 2011***

**PERNYATAAN KETUA PELAKSANA
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (Persero)**

**HEAD OF OPERATIONS STATEMENT
OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY
DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (Persero)**

Sesuai dengan keputusan Pengurus Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Organisasi"), kami menyatakan bahwa:

In accordance with resolution of the Committee of the Partnership and Community Development Program PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Organisation"), in the opinion of the Committee:

- (a) laporan keuangan Organisasi menyajikan secara wajar posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2011, laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan
- (b) laporan keuangan Organisasi disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

- (a) *the financial statements of the Organisation are drawn up so as to present fairly the financial position as at 31 December 2011, and a statement of activity and cash flow for the year then ended; and*
- (b) *the financial statements of the Organisation have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities.*

Atas nama dan mewakili Pengurus / *For and on behalf of the Committee*



Adita Irawati
Ketua Pelaksana/Head of Operation

JAKARTA
23 April/April 2012



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PENGURUS**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE COMMITTEE OF**

**PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM –
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Organisasi") tanggal 31 Desember 2011, serta laporan perubahan aktivitas dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pengurus Organisasi. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Organisasi pada tanggal 31 Desember 2011, laporan aktivitas serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

We have audited the accompanying statement of financial position of Partnership and Community Development Program - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Organisation") as at 31 December 2011, and the related statement of activity and cash flow for the period then ended. This financial statement is the responsibility of the Organisation's committee. Our responsibility is to express an opinion on this financial statement based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statement is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statement. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statement referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the Organisation as at 31 December 2011, and a statement of activity and its cash flow for the period then ended in conformity with Financial Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities.

JAKARTA
23 April/April 2012

Drs. Haryanto Sahari, CPA

Surat Ijin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0223

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statement is not intended to present the financial position, statement of activity and cash flow in accordance with accounting principles and practices for non-publicly-accountable entities in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying financial statement and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian Accounting Standard for Non-Publicly-Accountable Entities and auditing standards and their application in practice.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran – 1 - Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2011**

(Dinyatakan dalam rupiah)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2011**

(Expressed in Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2011</u>	
ASET			ASSETS
Piutang dari Badan Usaha			<i>Receivables from</i>
Milik Negara (BUMN) pembina	3	<u>458,765,200</u>	<i>Stated Owned Enterprise (SOE) Administrator</i>
KEWAJIBAN			LIABILITY
Utang operasional		<u>78,973,170</u>	<i>Account payables</i>
JUMLAH ASET BERSIH		<u>379,792,030</u>	NET ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statement.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran – 2 - Schedule

**LAPORAN AKTIVITAS
PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011**
(Dinyatakan dalam rupiah)

**STATEMENT OF ACTIVITY
FOR THE PERIOD ENDED
31 DECEMBER 2011**
(Expressed in Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2011</u>	
Pendapatan			Income
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	5	<u>466,000,000</u>	<i>Partnership and Community Development Program</i>
Beban			Expenses
Penyaluran program	6	(78,973,170)	<i>Program expenses</i>
Beban umum dan administrasi		<u>(7,234,800)</u>	<i>General and administrative expenses</i>
Kenaikan nilai aset bersih		379,792,030	Increase in net assets
Aset bersih - awal periode		<u>-</u>	Net asset – beginning
Aset bersih - akhir periode		<u><u>379,792,030</u></u>	Net asset – ending

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statement.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran – 3 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011**
(Dinyatakan dalam rupiah)

**STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE PERIOD ENDED
31 DECEMBER 2011**
(Expressed in Rupiah)

	<u>31 December/ December 2011</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi		Cash flow from operating activities
Perubahan aset bersih	379,792,030	Change in net assets
Perubahan dalam aset dan kewajiban:		Change in assets and liabilities:
- Piutang dari BUMN pembina	(458,765,200)	- Receivables from SOE Administrator
- Utang operasional	<u>78,973,170</u>	- Account payables
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	-	Net cash flow provided from operating activities
Kas dan setara kas awal tahun	<u>-</u>	Cash and cash equivalents at beginning of the year
Kas dan setara kas akhir tahun	<u><u>-</u></u>	Cash and cash equivalents at end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statement.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011**

(Dinyatakan dalam rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

31 DECEMBER 2011

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM

Pembentukan organisasi khusus pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Organisasi") untuk mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No : SK-077/DIR/CRS/09/2011 pada tanggal 10 September 2011 dan merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, pada Bab II pasal 2 ayat (2) berbunyi "Persero harus melaksanakan PKBL dengan berpedoman pada keputusan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)".

Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan PKBL adalah bersumber dari Saldo Dana Kemitraan posisi 31 Desember 2011 dari 1% dari laba bersih PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2010.

Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Organisasi berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta dan mulai beroperasi pada tahun 2011.

Pada 31 Desember 2011, susunan kepengurusan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL

The Partnership and Community Development Program - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("the Organisation") was established to manage Corporate Social Responsibility (CSR) Program was established based on Director Decision Letter No : SK-077/DIR/CRS/09/2011 on 10 September 2011 and part of the implementation of Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No : PER-05/MBU/2007 dated 27 April 2007, concerning Partnership Programs between State Owned Enterprises (SOE) and Small Entity and Community Development Programs, of which chapter II article 2, paragraph 2 stated "Persero to implement the CSR Program based on decision of the General Meeting of Shareholders (RUPS)".

The source of funds used for the CSR Program is the Partnership Fund Balance on 31 December 2011 which consisted of 1% of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)'s net profit in 2010.

The objective of the organisation is to manage the Corporate Social Responsibility Program.

The Organisation is domiciled in Indonesia, located at Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta, and started its activity in 2011.

As at 31 December 2011, the organisation structure was as follows:

2011

Ketua Pelaksana	:	Adita Irawati	:	Head of operations
Anggota	:	Widita Swastia Asti	:	Member

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011**

(Dinyatakan dalam rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2011**

(Expressed in Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN**

Laporan keuangan disusun oleh Pengurus dan diselesaikan pada tanggal 23 April 2012.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik dan pedoman akuntansi sesuai dengan Surat Edaran nomor SE-02/MBU/Wk/2012 dan SE-01/D5.MBU/2012, tentang Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan PKBL. Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas disusun menggunakan dasar kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, disajikan dalam Rupiah.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES**

This financial statement was prepared by the Committee on 23 April 2012.

Presented below is the summary of significant accounting policies adopted in preparing the financial statements, which conform with the Financial Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities.

a. Basis of preparation of the financial statements

These financial statement have been prepared and presented in conformity with Financial Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities and accounting guidance based on Circular Letter number SE-02/MBU/Wk/2012 and SE-01/D5/MBU/2012, of Declaration of Accounting Guidance and Technical Guidance for Corporate Social Responsibility Programs in SOE and other related law and regulations for CSR. They are prepared on an accrual basis, with the exception of the cash flow statement, for which a cash basis is used.

The cash flow statement is prepared using the indirect method, by classifying cash flows on the basis of operating activities.

Figures in the financial statements are expressed in Rupiah unless otherwise stated.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011**

(Dinyatakan dalam rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2011**

(Expressed in Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

b. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

c. Piutang dari BUMN pembina

Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

Pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan dicatat sebagai piutang sebesar pokok pinjaman yang diberikan dan jasa administrasi pinjaman yang jatuh tempo.

d. Utang operasional

Utang operasional pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

b. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the exchange rate prevailing at the reporting date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

c. Receivables from SOE Administrator

Receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost, less a provision for doubtful accounts. The provision for doubtful accounts is made by management estimation of the collectibility of receivables. A receivable is written off during the period when it is decided not to collect it.

A loan to CSR operation is recorded as receivable with the value of the main loan due.

d. Account payables

Account payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011**

(Dinyatakan dalam rupiah)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2011**

(Expressed in Rupiah)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan PKBL dapat berasal dari :

- a. Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina.
- b. Penerimaan pelimpahan dana dari PKBL lain.
- c. Penggantian beban operasional
- d. Sumbangan.
- e. Pendapatan jasa administrasi pinjaman.

- f. Pendapatan bunga.
- g. Pendapatan lain-lain.

Pendapatan diakui pada saat terpenuhinya kondisi berikut :

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
- b. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Income and expenses

CSR income comes from :

- a. Net income allocation from the SOE Administrator.
- b. Transfer fund from another CSR program.
- c. Reimbursement of operational expenses.
- d. Charity.
- e. Revenue from administration of receivables.
- f. Interest income.
- g. Other income.

Revenue is recognised when the following condition are met :

- a. Revenue can be measured reliably.
- b. The economic benefits of a transaction will flow to the entity.

Expenses are recognised on an accrual basis.

3. PIUTANG DARI BUMN PEMBINA

Akun ini merupakan penerimaan dana PKBL yang masih ditempatkan di BUMN Pembina. Saldo piutang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 458.765.200.

**3. RECEIVABLES FROM THE SOE
ADMINISTRATOR**

The balance represents receipt of CSR program funds which are still in the hand of SOE Administrator. The receivables balance for the year ended 31 December 2011 amounted to Rp 458,765,200.

4. UTANG OPERASIONAL

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk pengeluaran terkait dengan PKBL.

4. ACCOUNT PAYABLES

Account payables mainly represent unpaid disbursements related to the CSR program.

**5. PENDAPATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN**

Pada tanggal 31 Desember 2011, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengalokasikan laba/jumlah pendapatan bersih tahun 2010 sebesar Rp 466.000.000 untuk PKBL. Alokasi tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tanggal 10 September 2011.

**5. INCOME FROM PARTNERSHIP AND
COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM**

As of 31 December 2011, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has allocated net profit/total comprehensive income for year 2010 amounting to Rp 466,000,000 for the CSR Program. This allocation was approved in the Director Decision Letter on 10 September 2011.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN/
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Lampiran 4/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2011**

(Dinyatakan dalam rupiah)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

31 DECEMBER 2011

(Expressed in Rupiah)

6. PENYALURAN PROGRAM

Pada tahun 2011, PKBL yang di laksanakan adalah pelatihan guru-guru yang berlokasi di daerah Jawa Tengah dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 78.973.170.

6. PROGRAM EXPENSES

In 2011, CSR program held a workshop for teachers located in Central Java, with total disbursement of Rp 78,973,170.

7. TINGKAT KINERJA

7. PERFORMANCE

	<u>31 Desember/ December 2011</u>	
Saldo dana per 1 Januari 2011	-	<i>Balance as of 1 January 2011</i>
Penerimaan dana	<u>466,000,000</u>	<i>Funds received</i>
Jumlah dana tersedia	<u>466,000,000</u>	<i>Available funds</i>
Penggunaan dana		<i>Implementation</i>
- Penyaluran dana bina lingkungan	<u>78,973,170</u>	<i>- Community development</i>
Efektivitas penyaluran dana	<u>17%</u>	<i>Fund implementation effectiveness</i>

Data Perusahaan

Corporate Data

Dewan Komisaris

Board of Commissioner



Freddy Rikson Saragih
Komisaris Utama
President Commissioner

Freddy Rikson Saragih adalah Komisaris Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, selama hampir 25 tahun beliau telah mengabdikan diri dan bekerja di bidang pasar modal. Setelah menduduki berbagai jabatan, terakhir beliau menjabat Direktur Riset dan Manajemen Investasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Beliau merupakan figur yang cukup dikenal di kalangan industri pasar modal Indonesia dan sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai konferensi dan seminar bergengsi. Beliau memiliki gelar Master dalam bidang Profesional Accounting (MPAcc) dari Universitas Austin, Texas, Amerika Serikat. Beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan lanjutan dalam bidang Akuntansi dan Pasar Modal di berbagai institusi yang berbasis di Tokyo, Stockholm, Manila dan Washington DC.

Freddy Rikson Saragih is the President Commissioner of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He is currently the Head of the Center for Fiscal Risk Management at the Fiscal Policy Office, Ministry of Finance, Republic of Indonesia. He spent most of his professional life in the capital market industry for almost 25 years in various positions. His most recent position was the Director of the Investment Management and Research Bureau of the Indonesia Capital Market & Financial Institution Supervisory Board (BAPEPAM-LK). Mr. Saragih is a well-known figure in capital market in the industry in Indonesia and is a frequent speaker in many high-profile conferences and seminars. He has a Master's Degree in Professional Accounting (MPAcc.) from the University of Austin, Texas, USA. Mr. Saragih has also participated in many advanced professional trainings and courses in accounting and the capital market from various institutions based in Tokyo, Stockholm, Manila and Washington DC.



Ayu Sukroni
Komisaris
Commissioner

Selain menjabat Komisaris pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Ayu Sukorini adalah Direktur Strategi dan Portofolio Utang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau telah bertugas selama hampir 20 tahun di Kementerian Keuangan dan ditugaskan di berbagai posisi di area Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Pengelolaan Obligasi serta Pengelolaan Utang terutama pada bidang Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan. Beliau terlibat secara langsung dalam eksekusi penerbitan Obligasi Negara sejak tahun 2003 sampai 2007 baik di pasar domestik dan internasional. Beliau memiliki gelar Master of Arts (MA) dalam bidang ekonomi dari Universitas Colorado, Denver, Amerika Serikat, dan gelar sarjana dalam bidang ekonomi dari Universitas Satya Wacana, Salatiga. Beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan profesional lanjutan yang diselenggarakan beberapa institusi di Singapura, Washington DC, Sydney dan Tokyo dalam area Kebijakan Fiskal, Manajemen Risiko dan Pasar Keuangan. Beliau juga berpartisipasi aktif sebagai penyaji dalam berbagai forum pertemuan pengelola utang di London, Washington, Tokyo dan kawasan regional.

In addition to her role as the Commissioner of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Ayu Sukorini is also the Director of Strategy and Debt Portfolio of the Debt Management Office, Ministry of Finance, Republic of Indonesia. For almost 20 years, Ms. Sukorini has been assigned to many important duties in the Ministry of Finance, including in the areas of Fiscal Policy, Government Bond Policy Management and Debt Management, mainly for policy planning and development. She was also actively involved in the execution of the government's bond issuance in the domestic and international markets from 2003 to 2007. Ms. Sukorini has a Master of Arts degree in Economics from the University of Colorado at Denver, and a degree in Economics from Satya Wacana University, Salatiga, Central Java. She has participated in many advanced professional education courses in Fiscal Policy, Risk Management and Interest Rate Market at institutes in Singapore, Washington DC, Sydney and Tokyo. She is also active as a speaker in many international meetings on Debt Management including in London, Washington DC, Tokyo and in South East Asia region.

Direksi

Board of Directors



Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director

Sinthya Roesly adalah Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya, beliau bekerja di PT PLN (Persero) selama lebih dari 16 tahun dengan berbagai penugasan mulai dari keuangan korporat, pendanaan, perencanaan korporat dan strategi, komersial, operasi sistem tenaga listrik dan transmisi, serta konstruksi proyek. Selama di PLN, beliau terlibat secara penuh dalam mendapatkan pembiayaan untuk proyek-proyek PLN baik dari lembaga multilateral dan bilateral, termasuk program percepatan pembangkit 10,000 MW, serta pembiayaan dari perbankan domestik dan internasional. Beliau juga terlibat secara aktif dalam pengembangan *electricity trading mechanism* untuk sistem Jawa-Bali, penyiapan sistem operasi untuk IPP generasi pertama di Indonesia pada akhir tahun 1990, selain keterlibatannya dalam berbagai proses restrukturisasi korporasi dan sektor ketenagalistrikan di Indonesia pada akhir 1990an sampai awal 2000an. Sinthya Roesly pernah menjadi Ketua Kelompok Kerja untuk Energy Market Reform - World Energy Council, Indonesia National Committee dari tahun 2005 – 2006. Sinthya Roesly memiliki gelar Master of Management dari IPMI Business School dan MBA dari Monash University, Australia; gelar MEngSc dalam Power Systems dari University of New South Wales, Australia; dan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia.

Sinthya Roesly is the President Director of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Prior to her current position, Ms. Roesly worked with PT PLN (Persero), the state-owned electricity corporation for more than 16 years. Her various positions ranged from corporate finance, funding, corporate planning and strategy, commerce, transmission and power system operations, as well as project construction. In PLN, Ms. Roesly was involved in securing the financing from multilateral and bilateral agencies for PLN projects, as well as for the 10,000 MW Fast Track Program, and bank loans involving domestic and international banks. She was also actively involved in the development of the electricity trading mechanism in the Java-Bali system, setting up system for operations of the first generation of IPP in Indonesia in the late 1990s, in addition to overseeing corporate and power sector restructuring in Indonesia in the late 1990s and early 2000s. Ms. Roesly was formerly the Head of the Energy Market Reform Working Group, Indonesia National Committee - World Energy Council, 2005-2006. She holds a Master of Management degree from IPMI Business School and an MBA from Monash University, Australia; an MEngSc in Power Systems from the University of New South Wales, Australia, and a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the University of Indonesia.



Yadi J. Ruchandi
Direktur Operasi
Director of Operations

Yadi J. Ruchandi adalah Direktur Operasi dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya, beliau adalah Wakil Presiden Eksekutif dari sebuah integrated logistics and aviation group dan Direktur Keuangan dari sebuah Perusahaan Penerbangan Swasta. Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan investasi perbankan, serta bekerja di berbagai perusahaan dan organisasi terkemuka termasuk Bank American-Express dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Bank Indonesia. Beliau telah memiliki berbagai pengalaman mulai dari *Merger and Acquisition*, negosiasi dan restrukturisasi hutang korporat, *business turnaround* dan pengembangan proyek. Yadi J. Ruchandi adalah seorang Chartered Financial Analyst (CFA) dan memiliki gelar dalam bidang teknik mesin dan MBA dari Thunderbird-American Graduate School of International Management, USA.

Yadi J. Ruchandi is the Director of Operations of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Prior to his current position, he was executive vice president of an integrated logistics and aviation group and CFO of a private airline. He brings broad experience in the financial sector and investment banking from working in high-profile companies and organizations, including American-Express Bank as well as the Indonesian Bank Restructuring Agency. He has considerable deal experiences ranging from merger and acquisition, debt and corporate restructuring and negotiation, business turnaround and project development. He is a CFA holder and has a Bachelor's degree in mechanical engineering from the University of Indonesia and an MBA from Thunderbird- American Graduate School of International Management, USA.



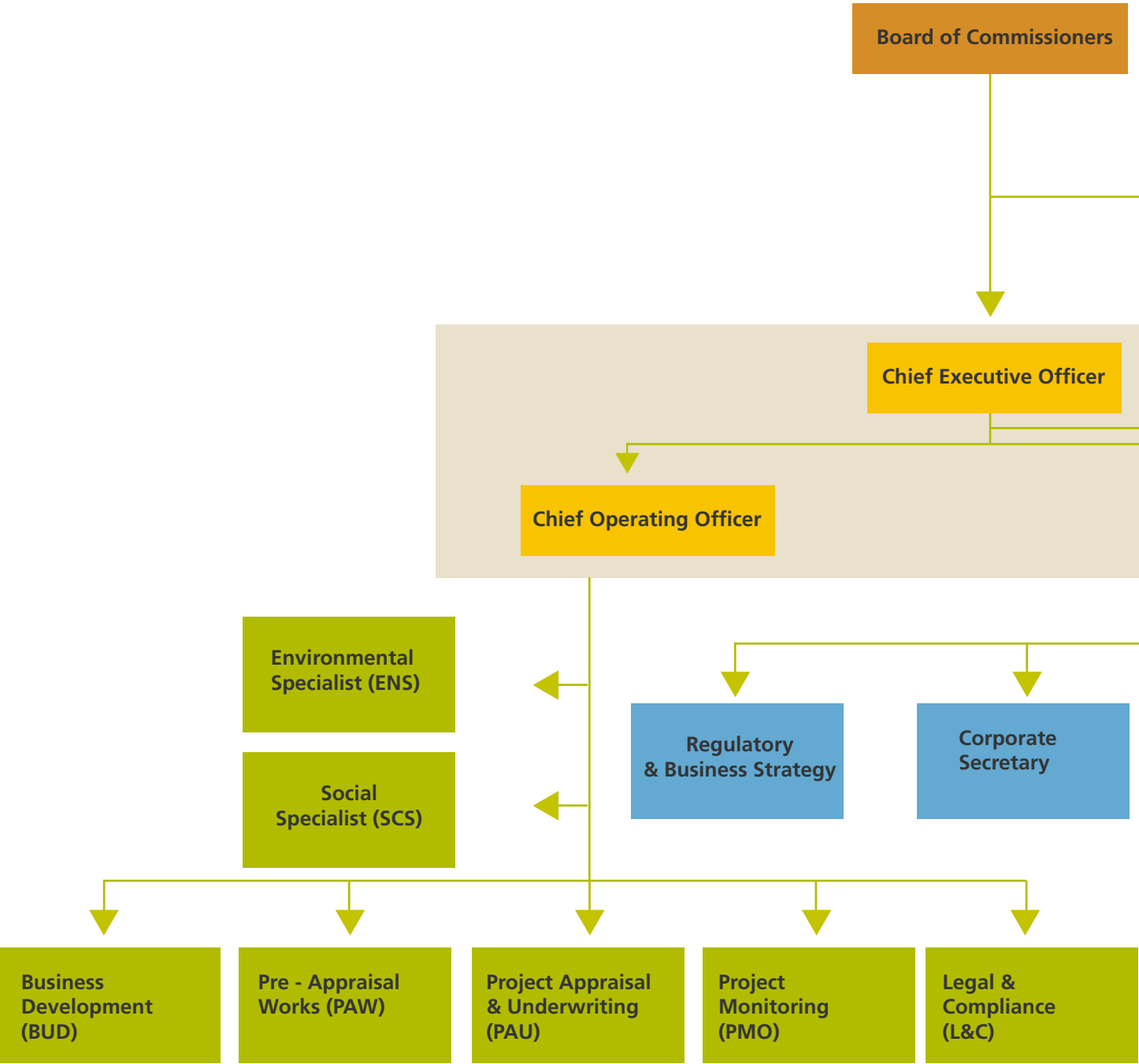
Armand Hermawan
Direktur Keuangan & Administrasi
Director of Finance & Administration

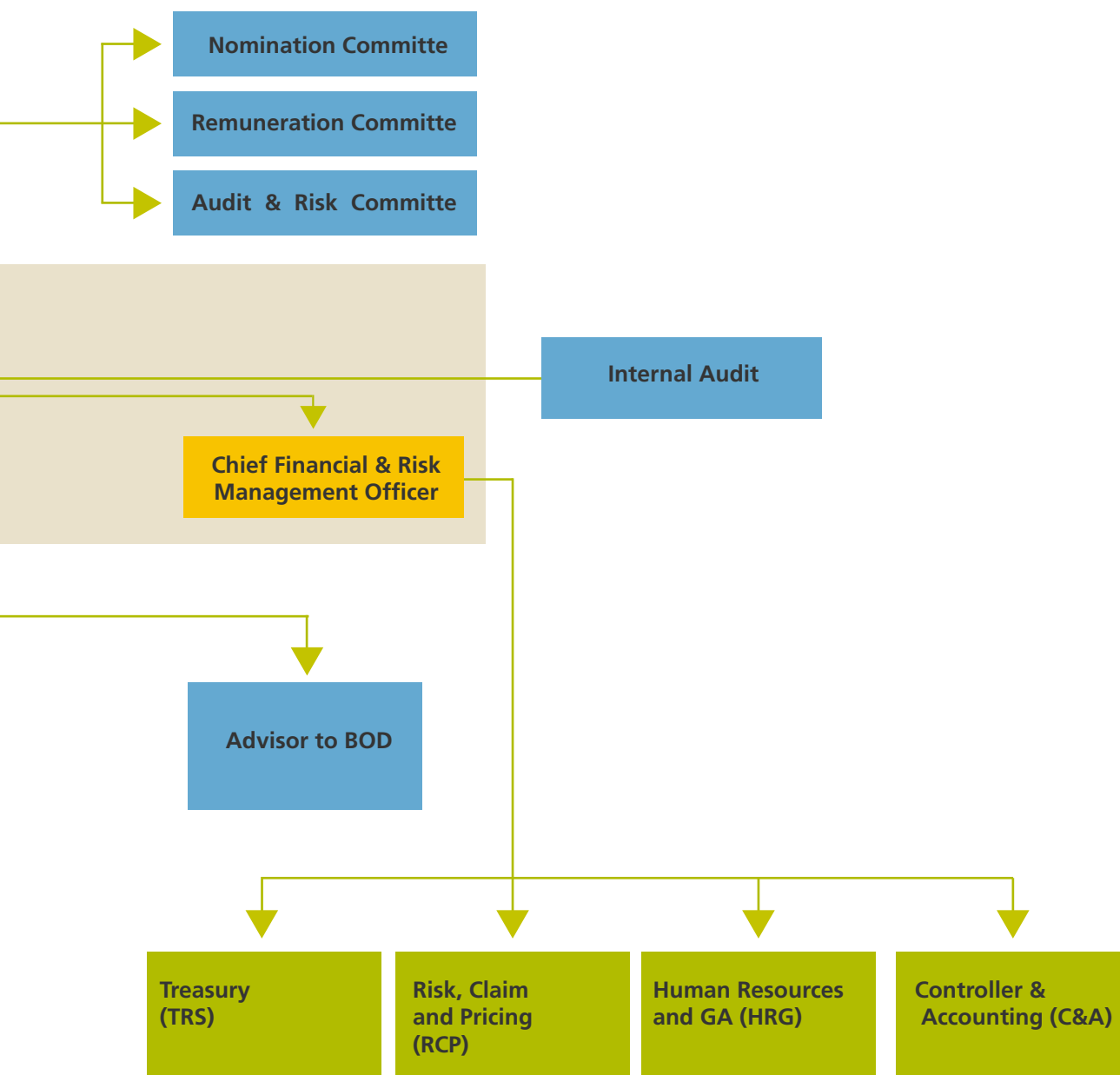
Armand Hermawan adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya, beliau menghabiskan kehidupan profesional di perusahaan telekomunikasi raksasa Indonesia, Indosat. Jabatan terakhir beliau di Indosat adalah Senior Vice President (SVP) dan Chief of Group Controlling Office. Selama di Indosat, beliau dipercaya untuk berperan penting dalam transaksi *Merger and Acquisition* dan aksi korporat lainnya seperti IPO dan penerbitan obligasi syariah. Pada saat beliau di divisi corporate strategy, Indosat mendapatkan award sebagai perusahaan dengan the best strategy dari Asia Money pada tahun 2005. Beliau adalah seorang akuntan terdaftar, memperoleh gelar Master of Commerce and Management (MCM) dari University of Lincoln, NZ dan PhD di bidang keuangan dari University of Newcastle, NSW, Australia.

Armand Hermawan is the Director of Finance and Risk Management of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Previously, he spent his professional life in Indonesia's major telecommunications company PT Indosat, Tbk. His final position in Indosat was Senior Vice President (SVP) and Chief of Group Controlling Office. During his tenure in Indosat, he was entrusted to lead M&A transaction and other corporate actions including IPO and Islamic Bond Issuance. During his period in the corporate strategy division, Indosat was selected as the company with the best business strategy by Asia Money in 2005. A registered accountant, Mr. Hermawan obtained a Master's Degree in Financial Econometrics from the University of Lincoln, New Zealand, and a PhD Degree in Finance from University of Newcastle, NSW, Australia.

Struktur Organisasi

Organization Structure





This page is intentionally left blank
Halaman ini sengaja dikosongkan



IIIGF

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund**

Sampoerna Strategic Square
North Tower 14th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930 Indonesia
Telp: +62 21 57950550
Fax: +62 21 57950040
info@iigf.co.id
www.iigf.co.id